

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2018. LKjIP Kabupaten Rembang disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menginformasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan selama Tahun 2018. Laporan ini sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan visi "**Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan**". Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah mulai dari perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama Tahun 2018 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Rembang, Maret 2019

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
C. Bidang Kewenangan	2
D. Gambaran Umum Daerah	4
E. Kelembagaan Perangkat Daerah	9
F. Aparatur Pemerintah Daerah	11
G. Permasalahan / Isu Pembangunan Daerah	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Visi dan Misi	22
B. Tujuan	23
C. Sasaran	25
D. Strategi dan Arah Kebijakan	28
E. Program Unggulan	29
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang.....	37
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	46
C. Akuntabilitas Keuangan.....	149
BAB IV PENUTUP	161
LAMPIRAN	
1. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018	
2. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Rembang	
3. Sertifikat/Piagam Penghargaan Tahun 2018	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Penyusunan RPJM memerlukan landasan pembangunan yang memiliki cakupan luas sehingga dapat ditetapkan sebagai dasar bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Penetapan RPJM merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasai Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) sasaran adalah sebagai

berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2016	CAPAIAN KINERJA 2017	CAPAIAN KINERJA 2018
1	Terwujudnya Good Governance	100	92,66	79,74
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang mendukung Pencapaian Visi	113,33	110,96	106,23
3	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	126,67	118,94	117,02
4	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan Penganggaran Daerah	88,89	100	100
5	Terciptanya pelayanan public yang cepat, tanggap dan prima	99,33	100,33	100,33
6	Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian	71,26	94,06	77,42
7	Meningkatnya Produksi Perikanan, Kesejahteraan nelayan kecil dan Penyelenggaraan TPI	594,75	278,21	228,91
8	Meningkatnya Kinerja sektor industri dan perdagangan	864,30	325,82	708,52
9	Menurunnya angka pengangguran	107,50	131,66	142,86
10	Menurunnya angka kemiskinan	95,52	86,10	97,06
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	63,3	85,29	90,05
12	Meningkatnya nilai investasi	124,88	131,48	158,62
13	Meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	90,72	81,29	76,22
14	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	682,20	(265,20)	2.280,40
15	Meningkatnya pemertaan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	129,83	105,58	105,77
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas irigasi	72,71	96,81	100,76
17	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	100	111,40	83,04
18	Berkurangnya luas kawasan kumuh	79,17	102,15	124,29
19	Meningkatnya cakupan akses air minum	89,75	100,33	97,68
20	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	79,88	97,91	96,41

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2016	CAPAIAN KINERJA 2017	CAPAIAN KINERJA 2018
21	Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	100	89,77	81,56
22	Meningkatnya ketersediaan air baku	100	90,30	84,63
23	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	100	100	100
24	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	80,32	61,01	105,18
25	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	99,21	97,80	96,43
26	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan Non Formal termasuk pendidikan inklusif	104,52	95,82	97,38
27	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	34,14	99,36	161,63
28	Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olah raga	100	114,17	103,21
29	Menurunnya kasus Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	94,59	94,86	95,1
30	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	-	-	87,99
31	Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	119,47	99,66	134,82
32	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan Gender serta Perlindungan anak	98,28	98,27	104,15
33	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	100	100	121,43
34	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	102,38	107,79	91,55
35	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	100	91,23	95,5
36	Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	97,93	98,51	98,97
37	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	102,63	83,07	107,22
38	Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	100,01	82,00	94,44
	Rata-rata	146,15	99,71	176,74

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 secara keseluruhan 176,74 (kategori sangat berhasil). Dari 38 (tiga

puluh delapan) sasaran strategis yang mempunyai kinerja sangat baik sebesar 28 sasaran, berkinerja baik sebanyak 7 sasaran, berkinerja cukup sejumlah 3 sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara Otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi kesempatan yang luas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dalam hal ini Kewenangan Pemerintahan Daerah diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik, dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Rembang didasarkan pada indikator kinerja yang ada dan ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2018.

B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2018 didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

C. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan Urusan Pemerintahan baik Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Penataan Ruang
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Sosial

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Ketenagakerjaan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan.

Adapun urusan Pemerintahan Pilihan yang ada di Kabupaten Rembang meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Gambaran Umum Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Pada garis koordinat 111°00' - 111°30' dan 6°30' - 7°00' Lintang Selatan, dengan batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Propvinsi Jawa Timur)
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar Sale (10.714 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha) Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN REMBANG

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2015

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313 Ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 Ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis

2.210 Ha (7,58 %), pengairan ½ teknis 3.594 Ha (12,32 %), pengairan sederhana 2.569 Ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 Ha (71,29%).

a. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi, meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41%, ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82%, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34 %.

b. Jenis Tanah

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, terutama di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

a) Tanah Alluvial

Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.

b) Tanah Regosol

Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.

c) Tanah Gromosol

Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua dan meliputi 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

d) Tanah Mediteran Merah Kuning

Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari

pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput

e) Potensi Kandungan Tanah

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat, dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Dengan potensi yang cukup besar maka beberapa pabrik semen telah dan sedang mengajukan permohonan perijinan untuk membuka usaha di Kabupaten Rembang.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa embung, bendung, cekdam, dan sungai. Beberapa embung besar yang mensuplai ketersediaan air baku yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Panohan dan Embung Grawan. Sedangkan sungai besar yang ada adalah sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyon. di Kabupaten Rembang terdapat 121 Cekdam dan 293 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang teraliri air sepanjang tahun.

f. Kondisi Iklim

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar

(52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 633.211 jiwa yang terdiri dari 315.489 orang laki-laki dan 317.722 orang perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN REMBANG

Jenis data	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	612.334	619.091	624.081	628.901	633.211
- Laki-laki	309.724	313.235	311.000	313.375	315.489
- Perempuan	302.610	305.856	313.081	315.526	317.722

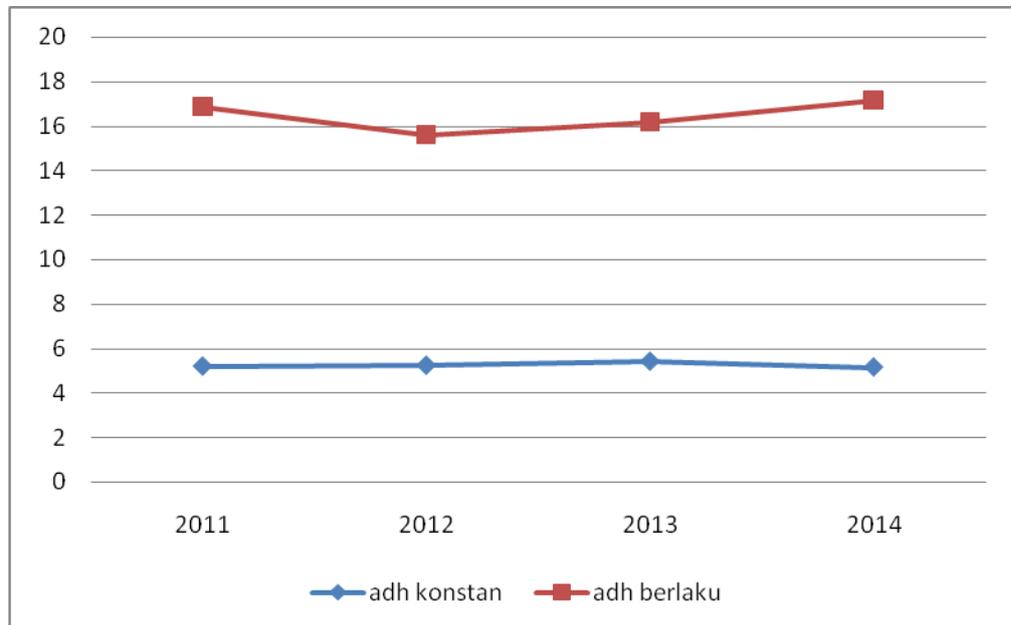
3. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama empat tahun terakhir terlihat cukup baik, karena dengan pertumbuhan yang positif. Untuk laju pertumbuhan PDRB adh konstan dengan menggunakan seri tahun 2010, pertumbuhan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebesar 5, 19 persen, dan terus meningkat pada tahun 2012 – 2013, namun pada tahun 2014 laju pertumbuhannya melambat lagi menjadi 5,15

persen. Sektor yang cukup memberikan andil terhadap perkembangan ini adalah sektor pertanian. Pada umumnya semua sektor lapangan usaha laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan cenderung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, kecuali subsektor pertanian yang pertumbuhannya agak melambat. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi adh konstan maupun adh berlaku selama empat tahun terakhir.

Tabel 1.3
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2011-2014



c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang selama 4 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.4
PDRB KABUPATEN REMBANG SERI 2010
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
(dalam jutaan rupiah)

Kategori	URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016*	TAHUN 2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.992.910,68	3.117.527,80	3.168.229,36	3.290.989,85
	1. Pertanian, peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian	2.260.717,90	2.371.067,75	2.406.292,44	2.520.949,89
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	91.725,58	91.340,34	89.232,54	89.377,40
	3. Perikanan	639.701,30	655.119,72	672.704,38	680.662,56
B	Pertambangan dan Pengalihan	310.767,69	323.291,63	343.653,90	415.258,93

Kategori	URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016*	TAHUN 2017**
C	Industri Pengolahan	2.143.284,16	2.307.391,43	2.488.767,34	2.646.597,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.196,67	9.434,85	10.073,49	10.785,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.546,09	5.640,84	5.809,15	6.024,43
F	Konstruksi	776.630,15	824.642,21	886.134,34	952.802,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.406.724,91	1.464.601,23	1.541.934,41	1.643.010,86
H	Transportasi dan Pergudangan	414.922,27	443.036,47	467.117,18	495.336,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.231,73	356.833,89	376.930,99	399.907,68
J	Informasi dan Komunikasi	145.366,04	155.940,86	168.123,59	182.655,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	407.151,89	425.297,66	454.103,43	473.217,02
L	Real Estate	105.520,70	112.044,16	118.520,31	124.500,64
M,N	Jasa Perusahaan	28.188,71	30.679,79	33.723,93	36.484,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.050,95	410.088,03	421.480,84	437.549,12
P	Jasa Pendidikan	486.880,24	520.048,58	559.128,80	603.075,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.619,36	129.087,85	141.779,71	153.344,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	206.282,10	214.681,91	232.497,97	251.928,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.284.274,34	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

E. Kelembagaan Perangkat Daerah

Bersandar pada prinsip – prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas – tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas – tugas pembantuan lainnya maka sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 dan juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun perangkat daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Dinas Daerah.

Dinas Daerah di Kabupaten Rembang terdiri-dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pertanian dan Pangan
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetrasno
8. Kecamatan
9. Kelurahan

F. Aparatur Pemerintah Daerah

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 6.999 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.5
Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1	SD	104
2	SLTP	189
3	SLTA	1.246
4	Diploma	959
5	S1	2.874
6	S2	270
Jumlah		5.642

Sumber : BKD 2018 (data diolah)

Tabel I.6
Jumlah PNS Per Golongan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	175
2	Golongan II	1.468
3	Golongan III	2.827
4	Golongan IV	2.500
Jumlah		6.970

Sumber : BKD 2018 (data diolah)

Adapun untuk pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7
Pejabat Struktural
Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	21
2	Eselon III	116
3	Eselon IV	394
4	Eselon V	30
Jumlah		561

Sumber : BKD 2018 (data diolah)

G. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

URUSAN PENDIDIKAN

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD, dari jumlah peserta PAUD tahun 2015 sebesar 15.289 anak sementara jumlah penduduk pada usia 0-3 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2015 sebesar 37.355 anak, artinya masih ada 22.066 orang penduduk usia 0-3 tahun yang belum terlayani. APK PAUD 3-6 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,36 %.
- 2) Belum tercukupinya ketersediaan lembaga PAUD.
- 3) Belum optimalnya angka capaian APM jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupaun SMP sederajat.
- 4) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP sederajat
- 5) Angka melanjutkan sekolah belum optimal
- 6) Masih rendahnya kualitas pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD / MI.
- 7) Belum adanya dukungan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (Hampir seluruh SD belum memiliki tenaga administrasi)
- 8) Belum meratanya distribusi tenaga guru (PNS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

URUSAN KESEHATAN

- 1) Tingginya Angka Kematian Ibu.

- 2) Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- 3) Tingginya kasus kematian bayi dan balita.
- 4) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar karena seluruh Puskesmas pada tahun 2016 belum terakreditasi
- 5) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 6) Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

URUSAN PEKERJAAN UMUM

- 1) Belum Optimalnya sistem drainase diperkotaan karena banyak saluran drainase (36%) yang rusak / tersumbat.
- 2) Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum hanya 74,34 %
- 3) Belum terintegrasinya pembangunan jaringan air minum.
- 4) Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 48,98 % pada tahun 2015.
- 5) Belum terpenuhinya target RTH publik, karena dari target 20 % baru mampu mencapai 11,75 %
- 6) Belum optimalnya pengendalian tata ruang.'
- 7) Kurangnya ketersediaan air baku baik air irigasi maupun air industri.

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan .
- 2) Belum optimalnya penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah, selama ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh perorangan maupun swasta.
- 3) Masih adanya rumah tidak layak huni.

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1) Masih terjadinya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Rembang.
- 2) Belum optimalnya peran serta Ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.

URUSAN SOSIAL

- 1) Masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani, PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 40 % pada tahun 2015.
- 2) Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial, yang tertangani baru 50 %.
- 3) Minimnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

URUSAN TENAGA KERJA

- 1) Masih relatif tingginya angka TPT.
- 2) Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, dimana TPAK / persentasenya pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 baru mencapai 66,97 %.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat.
- 2) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraangender yaitu 4 dari 62 lembaga yang ada.
- 3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- 4) Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah.
- 5) Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
- 6) Rendahnya capaian kedudukan perempuan sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan.
- 7) Rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi.
- 8) Rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka IDG dari tahun 2011 s.d 2014 yaitu dari 66,97 menjadi 66,43 capaian IDG tersebut jauh di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,46
- 9) Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada seluruh PD sebagai dasar untuk perencanaan program kegiatan maupun pengambilan kebijakan.
- 10) Masih minimnya jumlah Desa Ramah Anak.

URUSAN PANGAN

- 1) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.

- 2) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan melalui sistem CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan CPM (Cadangan Pangan Masyarakat).
- 3) Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan, sehingga memerlukan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

URUSAN PERTANAHAN

- 1) Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikasi.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi penanganan sampah pada tahun 2015 baru mencapai 72 % artinya masih ada 28% sampah yang belum tertangani.
- 2) Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan.
- 3) Rendahnya aktivitas pemantauan terhadap status baku mutu air.
- 4) Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- 5) Masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tercapai sesuai dengan standar nasional yaitu 68,5 pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2014 baru mencapai 63,45.
- 7) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- 8) Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan mangrove.
- 9) Masih adanya lahan kritis.

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
- 2) Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan PKK dan Posyandu.
- 3) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penerapan undang-undang tentang desa masih belum optimal.

- 5) Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana.
- 2) Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan Drop Out (DO), pada tahun 2015 mencapai angka sebesar 6,93 %
- 3) Tingginya cakupan PUS dengan usia dibawah 20 tahun.
- 4) Masih rendahnya cakupan tribina apada desa / kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

URUSAN PERHUBUNGAN

- 1) Ketersediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang belum memadai, baik yang melayani penumpang dalam kabupaten yang menghubungkan antar kabupaten.
- 2) Masih tingginya jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Rembang.
- 3) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan kabupaten / kota.
- 4) Masih rendahnya jumlah prosentase kapal yang bersertifikasi
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.
- 6) Lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas di Kabupaten Rembang.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan pangkalan truk.
- 8) Rendahnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik Pemerintah Daerah maupaun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
- 2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e – Government dan penerapan blueprint e – Government belum optimal.
- 3) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi.
- 4) Belum adanya unit pengaduan online terpadu.
- 5) Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi, baru terdapat 58 jaringan komunikasi pada tahun 2015.

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 1) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif.
- 2) Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan aset dan omzet.
- 3) Rendahnya partisipasi UMKM mengikuti pameran promosi produk.
- 4) Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

URUSAN PENANAMAN MODAL

- 1) Kurangnya promosi potensi Kabupaten Rembang kepada calon investor.
- 2) Belum optimalnya peningkatan nilai investasi.
- 3) Masih kurangnya kegiatan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan investasi.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- 1) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga berprestasi.
- 2) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda,
- 3) Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada.
- 4) Kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
- 5) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.

URUSAN STATISTIK

- 1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- 2) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- 3) Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang valid dan up to date.

URUSAN PERSANDIAN

- 1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

URUSAN KEBUDAYAAN

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Rembang.
- 2) Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian.
- 3) Belum tersedianya Gedung Kesenian / Sarana dan Prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni.

- 4) Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya.

URUSAN PERPUSTAKAAN

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan Daerah.
- 2) Masih sedikitnya jumlah perpustakaan ditingkat Kecamatan.
- 3) Masih terbatasnya jumlah pustakawan yang tersertifikasi.

URUSAN KEARSIPAN

- 1) Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah.
- 3) Rendahnya duplikasi arsip kedalam bentuk digital.
- 4) Rendahnya pengelolaan arsip secara baku.

C. URUSAN PILIHAN

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya maupun kelompok pengolah ikan.
- 2) Rendahnya produksi perikanan budidaya.
- 3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- 5) Belum optimalnya rata – rata pendapatan nelayan.
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI.

URUSAN PARIWISATA

- 1) Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata.
- 2) Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Kabupaten Rembang.
- 3) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata.
- 4) Kurangnya tenaga profesional dibidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata termasuk jasa perhotelan.
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
- 6) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.

URUSAN PERTANIAN

- 1) Kualitas produksi pertanian belum optimal dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas.
- 2) Belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, yaitu antara 4,61 ton/ha-6,10 ton/ha.
- 3) Minat masyarakat untuk bekerja disektor pertanian dan perkebunan semakin menurun.
- 4) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan.
- 5) Belum terbangunnya kawasan agro industri dan agro politan.
- 6) Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik penyuluhan dan budidaya pertanian / pengembangan agribisnis pertanian.
- 7) Masih tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan.
- 8) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian.

URUSAN PERDAGANGAN

- 1) Belum Optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar
- 2) Belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil peternakan
- 3) Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Rembang
- 4) Belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Rembang
- 5) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.

URUSAN PERINDUSTRIAN

- 1) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- 2) Lemahnya akses modal bagi industri kecil.
- 3) Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas perijinan menurun.
- 4) Belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang memadai
- 2) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan
- 3) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggarannya.

URUSAN SATPOL PP

- 1) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketentraman dan pencegahan tidak kejahatan
- 2) Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat
- 3) Belum optimalnya patrol yang dilakukan oleh petugas Satpol PP
- 4) Masih terbatasnya jumlah anggota Satpol PP
- 5) Memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing kelurahan/desa
- 6) Masih terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.

URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

- 1) Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru
- 2) Belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki pedoman standar pelayanan public (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan public (pengukuran IKM) secara berkala
- 3) Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (Standar Operasional prosedur)
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah
- 5) Belum optimalnya evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah (Perda dan Perkada)
- 6) Belum adanya *roadmap* reformasi birokrasi
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing-masing kecamatan.

URUSAN SEKRETARIAT DPRD

- 1) Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

URUSAN KEPEGAWAIAN

- 1) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).

URUSAN KEUANGAN DAERAH

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan system informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu
- 2) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah
- 3) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah
- 4) Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan daerah

URUSAN INSPEKTORAT DAERAH

- 1) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (OPD)
- 2) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah)
- 3) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing-masing OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 tahunan, yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2021. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahun.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda Pembangunan dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2016. Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud, adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

A. VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan telah dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :**“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan ”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. **Masyarakat Sejahtera**, adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. **Semangat Kebersamaan**, adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama

3. **Pemberdayaan Masyarakat**, adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri
4. **Kewirausahaan**, adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Misi I

Dalam melaksanakan Misi I yaitu “ ***Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah***” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam pembangunan ;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

2. Tujuan Misi II

Dalam Melaksanakan Misi II yaitu “ **Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdayadaerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup**”

“Maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Membangun kemandirian ekonomi daerah ;
- b. Mengurangi angka pengangguran ;
- c. Menurunkan angka kemiskinan ;
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup ;

3. Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III “ **Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif**” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan ;
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

4. Tujuan Misi IV

Dalam melaksanakan Misi IV “ **Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan**” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.
- b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

5. Tujuan Misi V

Dalam melaksanakan Misi V “ **Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan**” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri dan Berwawasan Kebangsaan.
- c. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.

6. Tujuan Misi VI

Dalam melaksanakan Misi VI “ **Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan**” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan masyarakat
- d. Memberikan fasilitas yang memadai kepada pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu ;
- e. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan

7. Tujuan Misi VII

Dalam melaksanakan Misi VII yaitu “ ***Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan***” maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan.
- b. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

C. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada.

Tujuan-1: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Good Governance

Tujuan -2: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi
2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tujuan 3:Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya pelayanan public yang cepat tanggap dan prima

Tujuan-4:Membangun Kemandirian Ekonomi daerah dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sector pertanian

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI
3. Meningkatnya kinerja sector industry dan perdagangan.

Tujuan-5: Menurunkan angka pengangguran dengan sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya angka pengangguran.

Tujuan-6: Menurunkan angka kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan

Tujuan-7: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan-8: Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi local dan berwawasan lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai investasi

Tujuan-9: Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif
2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah

Tujuan-10: Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infastruktur dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi
3. Meningkatnya jumlah rumah layak huni
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh
5. Meningkatnya cakupan akses air minum
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
7. Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)
8. Meningkatnya ketersediaan air baku

Tujuan-11: Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan dengan dukungan infastruktur memadai dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infastruktur memadai

Tujuan-12: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan-13: Membangun Sistem Pendidikan yang mudah diakses seluruh warga dengan menekankan pendidikan karakter, untuk mewujudkan insan terdidik yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan kebangsaan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan

Tujuan-14: Mengembangkan potensi pemuda, prestasi dan olahraga dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olah raga

Tujuan-15: Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Tujuan-16: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan perlindungan social masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS

Tujuan-17: Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak

Tujuan-18: Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya local yang merupakan warisan berharga dari pendahulu dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelestarian seni budaya local

Tujuan-19: Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Tujuan-20: Mewujudkan kedaulatan pangan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Tujuan-21: Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya beli masyarakat
2. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintahan Kabupaten Rembang mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (Strategi focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk melaksanakan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksud untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya.

E. PROGRAM UNGGULAN

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan berbasis Misi Pembangunan Daerah yaitu :

1. PROGRAM UNGGULAN MISI PERTAMA

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu “ Mewujudkan pemerintah yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintah yang amanah “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, aspiratif dan partisipatif.
- b. Membangun sistem Pemerintahan sesuai norma pemerintahan yang baik, cepat tanggap dan transparan.
- c.. Konsolidasi Birokrasi
 - 1) Penajaman Visi Misi kepada jajaran birokrasi
 - 2) Membuat Kontrak Kerja Kinerja yang harus ditandatangani oleh pejabat SKPD
 - 3) Memperpendek waktu pengurusan perijinan di KPPT
- d. Membentuk Tim Penasehat Reformasi Birokrasi. Hukum dan Ekonomi dari Perguruan Tinggi

2. PROGRAM UNGGULAN MISI KEDUA

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “ Membangun Kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup “ maka program unggulan yang mendukung misi adalah :

- a. Membangun pasar tradisional semi modern, tanpa membebani pedagang di Kecamatan Rembang, Pamotoan, Lasem, Pandangan, Kragan, Sarang, Gunem dan Sale
- b. Membangun industri padat karya baik melalui kemitraan maupun investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Membuat 1.000 sumur dangkal
- d. Memberikan bantuan modernisasi alat pertanian kepada petani :
 - 1) 882 traktor tangan
 - 2) 294 mesin tangan
 - 3) 294 mesin panen

3. PROGRAM UNGGULAN MISI KETIGA

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “ Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Membangun industri berbasis rumah tangga dengan orientasi sektor pariwisata (UMKM)
- b. Membangun Kawasan Industri Pariwisata Bahari dan Religi
- c. Pengembangan daya tarik Inventasi dan Penyederhanaan pelayanan perijinan.

4. PROGRAM UNGGULAN MISI KEEMPAT

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “ Melanjutkan pembangunan insfratraktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Meningkatkan pembangunan insfratraktur dan pengawasan Kualitas Pembangunan Insfrastruktur.
- b. Pemerataan Pembangunan Insfratraktur ke Seluruh Desa .

5. PROGRAM UNGGULAN MISI KELIMA

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Meningkatkan status Puskesmas Rawat Inap menjadi BLUD.
- b. Peningkatan pelayanan oleh Dokter Spesialis di Puskesmas.
- c. Membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- d. Pendidikan Gratis bagi keluarga tidak mampu sampai dengan jenjang SLTA
- e. Memberikan beasiswa di Perguruan Tinggi bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.

6. PROGRAM UNGGULAN MISI KEENAM

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu “ Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang menjamin masyarakat dalam berusaha.
- b. Menjaga stabilitas Politik dan Demokrasi.
- c. Memberikan ruang yang luas kepada pengembangan seni dan budaya.
- d. Membangun Pusat Kegiatan Kreatifitas Seni dan Buadaya.

7. PROGRAM UNGGULAN MISI KETUJUH

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu “ Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan “ maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah :

- a. Peningkatan produksi Pertanian dalam arti luas dan perikanan tangkap serta budidaya.
- b. Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan bagi masyarakat.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia perikanan (nelayan), pembudidaya perikanan dan pelaku usaha perikanan yang mandiri, berdaya saing kuat.

- d. Menyediakan infrastruktur perikanan, kelautan yang berteknologi serta penyediaan dukungan finansial bagi penguatan ekonomi koperasi – koperasi nelayan.
- e. Membangun sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi perikanan pantai.
- f. Meningkatkan kualitas pelabuhan pendaratan dan pelelangan ikan.
- g. Meningkatkan status Akademis Komunitas Negeri (AKN) Rembang menjadi Perguruan tinggi perikanan dan kelautan berjenjang S1.
- h. Membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) baru di Desa Pandangan Kecamatan Kragan.
- i. Revitalisasi PPI yang sudah ada agar kapasitasnya meningkat minimal 2 kali lipat.

F.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Rembang pada awal Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target PK
1.Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan			
a.Terwujudnya <i>Good Governance</i>	1)Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2
	2)Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WTP
	3)Nilai SAKIP	Nilai	62
	4)Skor PeGi (Pemerintahan E Government)	%	3,01
2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan			
b.Meningkatnya patisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	5)Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	80
	6)Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85
c.Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	7)Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	85
d.Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	8)Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100

3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel , transparan dan partisipatif				
a.Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	9)Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor		77
	10)Persentase PD telah memiliki website aktif	%		100
	11)Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%		100
1.Membangun Kemandirian Ekonomi daerah				
a.Meningkatnya kinerja sektor pertanian	12)Indeks Produksi Padi	Skor		1,09
	13)Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian `	Skor		1,45
b.Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI	14)Produksi ikan	ton		12,120
	15)Usaha produktif keluarga nelayan	Unit		2789
c.Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	16)Persentase pertumbuhan ekspor	%/ Tahun		4
	17)Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%		14,50
	18)Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%		21,20
2.Menurunkan angka pengangguran				
a.Menurunnya angka pengangguran	19)Tingkat Pengangguran Terbuka	%		4,1
3.Menurunkan angka kemiskinan				
a.Menurunnya angka kemiskinan	20)Persentase penduduk miskin	%		14,97
4.Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup				
a.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	21)Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks		66,50
1.Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan				
a.Meningkatnya Nilai Investasi	22)Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta/Tahun		85,00
2.Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif				
a.Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	23)Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%		8,25
b.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	24)Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	%		5
1.Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.				

a.Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.	25)Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	66,01
b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	26)Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	82,54
c.Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	27)Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	86,34
d.Berkurangnya luas kawasan kumuh	28)persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	8,49
e.Meningkatnya cakupan akses air minum	29)Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	2,80
f.Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	30)Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	96
g.Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	31) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	83,50
h.Meningkatnya ketersediaan air baku	32) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Ha	2
i.Meningkatnya ketersediaan air baku	33) Persentase cakupan Air baku	%	76
2.Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai			
a.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	34) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai (jumlah infrastruktur memadai dalam mendukung pusat pertumbuhan baru)	Kawasan	3
1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat			
a.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	35) AKI (Angka Kematian Ibu)	Kasus	12
	36) AKB (Angka Kematian Bayi)	Kasus	155
	37) Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	150
2.Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas,Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan.			
a.Meningkatnya angka rata rata lama sekolah	38) Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,5
	39) Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12
b.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif	40) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 – 12 tahun	%	99,78

	41) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun	%	100
	42) APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	84
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	43) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik		61,87
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga			
a. Meningkatkan potensi pemuda dan prestasi olahraga	44) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	35
	45) Jumlah Prestasi Kepemudaan yang diperoleh pada kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	4
1. Meningkatkan Kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat			
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	46). Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	97,93
	47). Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kasus	129
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	48). Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu, Pilpres dan Pileg Pilgub	%	75
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat			
a. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	49) Persentase PMKS yang ditangani	%	55
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak			
a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	50) Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	60
	51) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	31

3. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu			
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	52) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14
4. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan			
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	53) Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,71
b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	54) Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	%	100
	55) Persentase bayi berakte kelahiran	%	100
1. Mewujudkan kedaulatan pangan			
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	56) Skor PPH	Skor	87,70
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan			
a. Meningkatnya daya beli masyarakat	57) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (000)	10.000
b. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	58) Indeks Produksi pertanian	(kw/ha)	6,28
	59) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/tahun	6.381.291

Total Anggaran Rp. 733.589.205.887 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2018, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Maka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

2018. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari masing – masing SKPD di Kabupaten Rembang dan data eksternal yang berasal dari luar instansi / lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut ;

- 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator} \times 100\%}{\text{Rencana Kinerja Indikator}}$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 95 – 100 = Sangat Baik
- 80 – 95 = Baik
- 50 _ 80 = Cukup
- < 50 = Kurang

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target PK	Realisasi	%
1.Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan				
a.Terwujudnya Good Governance	1)Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	100
	2)Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WDP	50
	3)Nilai SAKIP	62	58,64	94,58
	4)Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment)	3,01	2,22	74,41
2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan				
a.Meningkatnya patisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	5)Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	60	65,93	109,88
	6)Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85	87,19	102,58
b.Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	7)Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	85	99,47	117,2
c.Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	8)Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	100	100	100
3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel , transparan dan partisipatif				

a.Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	9)Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	77	77,81	101
	10)Persentase PD telah memiliki website aktif	100	100	100
	11)Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	100	100	100
1.Membangun Kemandirian Ekonomi daerah				
a.Meningkatnya kinerja sektor pertanian	12)Indeks Produksi Padi	1,09	0,92	84,14
	13)Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian`	1,45	1,03	70,71
b.Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI	14)Produksi ikan	12.120	42.452	350,26
	15)Usaha produktif keluarga nelayan	2.789	3.000	107,57
c.Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	16)Persentase pertumbuhan ekspor	4,00	77,18	1,929,48
	17)Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	14,50	13,50	93,10
	18)Kontribusi sektor industri pengolahan	21,20	21,80	102,97
2.Menurunkan angka pengangguran				
a.Menurunnya angka pengangguran	19)Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	2,87	142,86

3. Menurunkan angka kemiskinan				
a. Menurunnya angka kemiskinan	20) Persentase penduduk miskin	14,97	15,41	97,06
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup				
a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	21) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHpo)	66,50	59,88	90,05
1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan				
a. Meningkatnya Nilai Investasi	22) Realisasi investasi PMA dan PMDN	85,00	7,17	158,62
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif				
a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	23) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	8,25	6,29	76,22
b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	24) Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	5	114,02	2,280
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.				
a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas	25) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	66,01	67,91	102,88
b. pembangunan jalan dan jembatan.	26) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	82,54	89,68	108,65

c.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	27)Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	86,34	87,00	100,76
d.Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	28)persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	8,49	7,05	83,04
e.Berkurangnya luas kawasan kumuh	29)Persentase Luas Kawasan Kumuh	2,80	2,12	132,08
f.Meningkatnya cakupan akses air minum	30)Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	96,00	92,80	97,68
g.Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	31) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	83,50	80,50	96,41
h.Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	32) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	2	13,33	81,58
i.Meningkatnya ketersediaan air baku	33) Persentase cakupan Air baku	76	64,32	84,63
2.Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai				
a.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	34) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai (jumlah infrastruktur memadai dalam mendukung pusat pertumbuhan baru)	3	3	100
1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat				

a.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	35) AKI (Angka Kematian Ibu)	12	9	125
	36) AKB (Angka Kematian Bayi)	155	149	103,87
	37) Akaba (Angka Kematian Balita)	150	170	86,67
2.Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan.				
a.Meningkatnya angka rata rata lama sekolah	38) Rata-rata lama sekolah	7,5	6,94	92,53
	39) Angka Harapan Lama Sekolah	12	12,04	100,33
b.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif	40) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 – 12 tahun	99,78	95,38	97,25
	41) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun	100	92,08	92,08
	42) APK PAUD (umur 3-6 tahun)	84	87,76	104,48
c.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	43) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan	61,87	100	161,63

	wawasan kebangsaan secara baik			
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olahraga				
a. Meningkatkan potensi pemuda dan prestasi olahraga	44) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	35	46	131,43
	45) Jumlah prestasi kepemudaan yang diperoleh pada kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional	4	3	75
1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat				
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	46). Rasio Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	97, 93	88,33	90,20
	47). Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	129	129	100
b. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	48). Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu Pilpres, dan Pileg Pilgub	75	65,99	87,99

1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat				
a.Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	49) Persentase PMKS yang ditangani	55	67,18	134,82
2.Meningkatkan keberdayaan masyarat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak				
a. Meningkatkan keberdayaan masyarat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	50)Cakupan Pemenuhan Hak Anak	60	60,2	109,45
	51) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	31	27,68	98,86
3.Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu				
a.Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	52)Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	17	121,43
4.Meningkatkanpengendalian pertumbuhanpenduduk danmeningkatkan tertibadministrasi kependudukan				
a.Terkendalnya pertumbuhan penduduk	53) Persentase pertumbuhan penduduk	0,71	0,77	91,55
b.Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan	54) Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	100	93,68	93,68

	55) Persentase bayi berakte kelahiran	100	97,32	97,32
1.Mewujudkan kedaulatan pangan				
a.Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	56) Skor PPH	87,7	86,8	98,97
2.Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan				
a.Meningkatnya daya beli masyarakat	57)Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	10.000	10.721,7	107,22
b.Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	58) Produktivitas pertanian	6,28	5,51	87,74
	59) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya 2% per tahun (ton)	6.381.291	6.454.843	101,15

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1. Terwujudnya Good Governance.

Pengukuran capaian sasaran **Terwujudnya Good Governance** tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang tersajikan pada table berikut:

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Good Governance

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	100	100	100	4	50
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WDP	50	100	100	WTP	50
Nilai SAKIP	62	58,64	94,58	91,67	100	68	94,11
Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government)	3.01	2.22	74.41	79.00	100	3.35	64.00
Rata-rata			79,74	92,66	100		

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Good Governance* dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja 79 % dengan predikat sangat berhasil, dengan analisa sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target level 2, terealisasi2, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

$$\frac{\text{Kapabilitas Realisasi}}{\text{kapabilitas Target}} \times 100 \%$$
$$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$$

Searah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019, disebutkan pada tahun 2019 Kapabilitas APIP harus berada pada level 3 (Terintegrasi)

Upaya yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP di Kabupaten Rembang adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan yang saling keterkaitan antara kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM aparat pengawas dalam hal ini Inspektorat agar dapat terwujud peran APIP yang efektif dan efisien dalam pengawasan .

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun, dengan target WTP dan realisasinya WDP, sehingga capaian kinerja sebesar 50% dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel III.4
Skala Ordinal Opini BPK

NO	OPINI BPK	POINT	PERSENTASE
1	Wajar Tanpa Pengacualian (WTP)	4	100%
2	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	3	75%
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	50%
4	Tidak Wajar	1	25%
5	<i>Disclaimer</i>	0	0%

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Opini BPK Realisasi}}{\text{Opini BPK Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Poin WDP}}{\text{Poin WTP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{4} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 50\%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 22 Mei 2018, BPK telah menerbitkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rembang tahun 2017. Opini tersebut didasarkan atas Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2017 masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindak lanjuti.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang belum mendapatkan Opini WTP oleh BPK adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern.

- a. Pemerintah Kabupaten Rembang belum dapat menyajikan nilai Piutang Denda Pajak dan Retribusi Daerah dalam LKPD sehingga Nilai Piutang belum dapat diyakini.
- b. Investasi Non Permanen belum disajikan berdasarkan prinsip *Net Realizable Value* (NRV) sehingga nilai yang disajikan dalam LKPD belum dapat diyakini kewajarannya.
- c. Pengendalian Pengelolaan Aset belum memadai terkait dengan penilaian, pencatatan dan kapitalisasi sehingga saldo Aset Tetap senilai Rp. 492,88 milyar dan akumulasi penyusutan senilai Rp. 1,06 trilyun serta beban penyusutan senilai Rp. 81,46 milyar belum dapat diyakini kewajarannya.

2. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan.

- a. Terdapat Aset yang telah selesai dikerjasamakan yang belum diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang berakibat Pemerintah Kabupaten Rembang tidak bisa melakukan pencatatan mutasi tambah atas Aset Tetap tersebut senilai Rp. 13,6 milyar dan kekurangan penerimaan kontribusi yang harusnya diterima Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp. 257,77 juta.
- b. Kekurangan Volume Pekerjaan dalam Pelaksanaan Belanja Modal pada Enam OPD senilai Rp. 1,92 milyar yang berakibat kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan tersebut.
- c. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang di Empat SKPD tidak sesuai dengan kondisi riil sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp. 463 juta.
- d. Pengadaan Pakaian Batik Tradisional di Kabupaten Rembang Tidak Sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal senilai Rp. 615, 39 juta.

Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun strategi dan langkah-langkah dengan menindaklanjuti atas rekomendasi BPK dalam rangka perbaikan atas permasalahan tersebut agar kedepan target Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat tercapai.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern

- a. Kepala BPPKAD melalui Kabid Bidang Pendapatan untuk dapat menyajikan Nilai Piutang Pajak dan Retribusi Daerah untuk dapat disajikan dalam LKPD kabupaten Rembang Tahun 2018.
- b. Kepala DININDAGKOPUKM Kab. Rembang melalui Pengelola LP UKM melakukan pengidentifikasian kondisi, sisa pinjaman dan identitas keseluruhan penerima dana bergulir untuk dapat mengetahui tingkat ketertagihannya dan kemudian merekonsiliasi hasilnya dengan Bidang Akuntansi BPPKAD supaya dapat disajikan secara *Net Realizable Value* (NRV).
- c. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Tindak Lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai pedoman Pengelola Barang dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah dalam melakukan inventarisasi fisik, verifikasi pencatatan dan fisik, rekonsiliasi pencatatan dan penilaian aset tetap sehingga Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap pada tingkat Pengelola Barang maupun Pengguna Barang pada Perangkat Daerah dapat teruji.
- d. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengelola Barang, Kepala BPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Kabid Aset selaku Pengurus Barang Pengelola dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang telah menindaklanjuti 70% dari rekomendasi LHP BPK Nomor 43B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dan Nomor 109/LHP/BPK/XVIII.SMG/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan sisanya masih terus ditindaklanjuti sampai dengan sekarang

2. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan

- a. Proses penyerahan tanah dan bangunan Pasar Sedan senilai Rp. 13,6 milyar sedang dalam proses diserahterimakan kepada Kepala DININDAGKOPUKM Kab. Rembang untuk dikelola dan kekurangan penerimaan kontribusi yang harusnya diterima Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp. 257,77 juta akan terus dilakukan penagihan.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen pada Enam Perangkat Daerah telah melakukan perhitungan ulang sesuai kondisi senyatanya berkaitan kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan Belanja Modal senilai Rp. 1,92 milyar dan menarik kelebihan atas pembayaran dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut pada Kas Daerah.
- c. Pengguna Anggaran melalui Bendahara pengeluaran telah mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran senilai Rp. 463 juta dengan rincian Belanja Makan Minum senilai Rp. 349,55 juta, Belanja ATK senilai Rp. 43,47 juta, belanja pengadaan senilai Rp. 67,28 dan belanja sewa penginapan senilai Rp. 3,56 juta dengan menarik atas kelebihan pembayaran dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Batik Tradisional telah mendistribusikan sisa batik kepada penerimanya dan menarik atas kelebihan pembayaran dan menyetorkan kelebihan pembayaran Rp. 615, 39 juta tersebut ke Kas Daerah.

3. Nilai Pelaksanaan SAKIP

Nilai Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), target 62, realisasi 58,64, sehingga capaian kinerja sebesar 94,58%.

$$\frac{\text{Nilai SAKIP Realisasi}}{\text{Nilai SAKIP Target}} \times 100 \%$$

$$\frac{58,64}{62} \times 100 \% = 94,58 \%$$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government)
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government)
$\frac{2,22}{3,01} \times 100 \% = 74,41 \%$

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemeringkatan e-Government terhadap Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah berdasarkan berita acara pemeringkatan e-Government Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Nomor : 486.6/1953.VIII/2017, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapat skor 2,22 Kabupaten Rembang berada di peringkat 14 se Jawa Tengah.

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target indikator Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government) sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kriteria penilaian skor Pe Gi.
2. Sumber daya manusia bidang informatika masih kurang.

**Tabel Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Indikator
Sasaran Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government)**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	300.343.000,00	294.965.500,00	98,21
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.341.952.700,00	3.118.047.373,00	93,30
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.076.213.450,00	2.002.541.105,00	96,45
4	Program Pendidikan Kedinasan	290.069.000,00	289.938.628,00	99,96
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	5.403.208.000,00	5.269.757.280,00	97,53
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.469.953.000,00	2.883.482.528,00	83,10
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.864.000.000,00	5.502.992.377,00	93,84
8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	125.900.000,00	118.395.300,00	94,04
9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	45.900.000,00	34.835.500,00	75,89
10	Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa	266.000.000,00	262.638.500,00	98,74
11	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	240.000.000,00	234.773.000,00	97,82
12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.401.000.000,00	3.326.897.504,00	97,82
13	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67
14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	311.000.000,00	306.579.980,00	98,58
15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	210.000.000,00	208.790.400,00	99,42
16	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	138.360.000,00	129.700.497,00	93,74
17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	291.202.000,00	279.689.807,00	96,05
18	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	28.000.000,00	27.999.975,00	100,00
19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.150.000.000,00	1.144.339.151,00	99,51
20	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	126.000.000,00	124.421.800,00	98,75
21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	123.790.000,00	123.094.925,00	99,44
22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	368.000.000,00	359.095.084,00	97,58
23	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	75.000.000,00	71.228.500,00	94,97
24	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	237.550.000,00	226.948.156,00	95,54
25	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21.173.305.000,00	17.429.397.716,00	82,32
26	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	JUMLAH	49.088.746.150,00	43.802.450.586,00	89,23

Solusi Terhadap Permasalahan Yang Menghambat Pencapaian Target Indikator Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government) sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi target Skor PeGi.
2. Menambah SDM Bidang Teknologi dan Informatika.

Sasaran 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down (atas-bawah)* dan *bottom-up (bawah-atas)*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam dilihat dari indikator Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan. Usulan masyarakat tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh undang-undang no 25 tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya.

Capaian kinerja indikator sasaran partisipasi masyarakat dan penjabaran program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.5
Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat yang Mendukung Pencapaian Visi**

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	RPJMD	
		2018	2018				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%)	60	65,93	109,88	118,18	120	75	87,91
2.	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	85	87,19	102,58	103,75	106,67	100	87,19
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				106,23	110,96	113,33		

Realisasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2018 adalah sebesar 65,95 %. Dari total usulan masyarakat sebanyak 863 usulan, yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebanyak 569 usulan. Pencapaian ini melebihi target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 60%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 109,88% dari target yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami naik turun, secara berurutan capaian indikator persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dari tahun 2016-2018 adalah 120%, 118,18% dan 109,88%. Capaian selama kurun waktu tersebut telah mencapai target. Peran serta usulan masyarakat ini sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengawal proses perencanaan dan memantau pelaksanaan pembangunan serta memberi masukan terhadap pembangunan yang sudah berjalan sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan program RPJMD yang dijabarkan dalam penyusunan RPKD tahunan, sesuai dengan tabel tersebut diatas bahwa realisasi Penjabaran Program RPJMD kedalam RPKD pada tahun 2018 sebesar 87,19%. Dari total program RPJMD sebanyak 242 program, yang dijabarkan dalam dokumen RPKD sebanyak 211 program. Pencapaian ini melebihi target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 85%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 102,57% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Penjabaran Program RPJMD kedalam RPKD juga mengalami peningkatan. Secara berurutan capaian indikator persentase penjabaran program RPJMD kedalam RPKD dari tahun 2016-2018 adalah 106,67%, 103,75% dan 102,58%. Capaian selama kurun waktu tersebut telah mencapai target. Hal ini disebabkan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun RPKD tetap berpedoman pada RPJMD yang ada meskipun masih terdapat program-program yang tidak tercantum dalam RPJMD. Adanya program RPJMD yang tidak tercantum dalam RPKD dikarenakan pelimpahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan adanya program yang tidak masuk tahapan tahun ke-3 (tahun 2018). Selain itu, terdapat program di RPKD yang tidak ada di RPJMD dikarenakan perubahan kebijakan atau ada peraturan perundang-undangan yang baru sehingga dimungkinkan muncul di RPKD pada tahun berjalan.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi pada tahun 2018 adalah sebesar 106,23%. Capaian ini mencapai target sehingga sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi telah terwujud. Faktor pendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, mulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Keberhasilan dalam realisasi target dan capaian kinerja usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait proses partisipasi masyarakat dan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahunan. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan dan serapan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	239.850.000,00	239.524.300,00	99,86
2	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat	281.706.000,00	275.576.000,00	97,82
3	Program Kerjasama Pembangunan	129.000.000,00	127.325.184,00	98,70
4	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	1.757.300.000,00	1.709.400.450,00	97,27
5	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	177.625.000,00	177.429.792,00	99,89
6	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	939.600.000,00	938.167.225,00	99,85
	JUMLAH	3.525.081.000,00	3.467.422.951,00	98,36

Dari anggaran Rp 3.525.081.000,-, terealisasi sebesar Rp 3.467.422.951,-. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi pada tahun 2018. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 57.658.049,- (1,64%) karena capaian kinerjanya sudah diatas 100%.

Sasaran 3. Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan.

- 1 Sebagaimana diketahui bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten melaksanakan program/kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan.

Capaian kinerja indikator sasaran kesesuaian program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Capaian	RPJMD	
		2018	2018	2018	2017	2016	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD (%)	85	99,47	117,02	118,94	126,67	100	99,47

Realisasi kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD pada tahun 2018 adalah sebesar 99,47%. Dari total kegiatan sebanyak 1316 kegiatan, yang diakomodir dalam perda APBD adalah sebanyak 1309 usulan. Pencapaian ini melebihi target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 85%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 117,02% dari target yang ditetapkan. Disamping itu penyusunan antar dokumen perencanaan tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga mengalami penurunan. Secara berurutan capaian indikator persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD dari tahun 2016-2018 adalah 126,67%, 118,94% dan 117,02%. Meskipun capaian kinerjanya mengalami penurunan selama 3 tahun tersebut, namun secara kinerja diatas 100%.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pada tahun 2018 telah mencapai target sehingga terdapat konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Faktor pendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengawal proses perencanaan sampai dengan penganggaran melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dilevel kabupaten maupun kecamatan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan dan penganggaran sudah sesuai aturan yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan dalam realisasi target dan capaian kinerja kesesuaian program dan

kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD merupakan hasil dari beberapa program yang dilakukan terkait Konsistensi antara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.499.375.000,00	1.496.918.349,00	99,84
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	177.625.000,00	177.429.792,00	99,89
	JUMLAH	1.677.000.000,00	1.674.348.141,00	99,84

Dari anggaran Rp 1.677.000.000,-, terealisasi sebesar Rp 1.674.348.141,-. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pada tahun 2018. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.651.859 (0,16%). karena capaian kinerjanya sudah diatas 100%.

Sasaran 4. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

Didalam Permendagri no 98 tahun 2018, setiap daerah dalam proses perencanaannya sudah menggunakan aplikasi e-Planning. Namun dalam aplikasi tersebut belum distandardisasikan dan belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan mekanisme bisnis prosesnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penerapan e-Planning di daerah saat ini belum terintegrasi antar tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berupaya membangun sistem aplikasi perencanaan agar bisa terintegrasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Dengan penggunaan e-Planning tersebut, proses perencanaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD. SIPD dapat digunakan sebagai Data Center yang nantinya akan digunakan sebagai sarana publikasi terhadap hasil pengelolaan SIPD di daerah dalam bentuk profil daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya membangun sistem perencanaan melalui e-Planning yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang untuk proses RKPD Tahun 2019.

Capaian kinerja indikator sasaran ketersediaan data dan informasi

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	RPJMD	
		2018	2018				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100	100	88,89	100	100

Realisasi ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018 adalah sebesar 100%. Dari total elemen data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebanyak 23 elemen data, yang diakomodir dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah juga sebanyak 23 elemen data. Pencapaian ini setara dengan target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu tahun 2016-2018 dengan capaian secara beruntun 88,89%, 100% dan 100% bahwa penggunaan data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan tercukupi 100%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada tahun 2018 yang sudah 100%, bahwa Kabupaten Rembang telah meningkatkan dan memanfaatkan fungsi dan ketersediaan data meliputi data kewilayahan, dan data berbagai sektor pembangunan daerah seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, kelautan, perikanan, pekerjaan umum dan lain-lain dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Perangkat Daerah telah melakukan *update* data agar proses perencanaan dan pengendalian pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih baik.

Keberhasilan dalam realisasi target dan capaian kinerja ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan merupakan hasil dari beberapa program yang dilakukan terkait pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Data/Informasi	220.000.000,00	219.289.725,00	99,68
2	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	60.000.000,00	59.827.549,00	99,71
3	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	398.550.000,00	398.449.762,00	99,97
JUMLAH		678.550.000,00	677.567.036,00	99,86

Dari anggaran Rp 678.550.000,-, terealisasi sebesar Rp 677.567.036,-. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada tahun 2018. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 982.964 (0,14%) karena capaian kerjanya sudah tepat 100%.

Sasaran 5. Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima.

Pengukuran capaian kinerja sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat, Tanggap dan Prima dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, dengan hasil pengukuran indikatornya seperti berikut:

Tabel III.8
Capaian Kinerja Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Rata-rata nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik	77	77,81	101	101	98	80	101
Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website Aktif	100	100	100	100	100	100	100

Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata			100,33	100,33	99,33		

1. Rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pelayanan Publik skor atas rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pelayanan Publik dengan target 77 dengan realisasi 77,81 sehingga capaian kinerja sebesar 100, 81 % mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa Skor 77,81 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada Masyarakat mendapatkan Nilai B berarti pula Unit Kerja Pelayanan pada Kabupaten Rembang memiliki Kinerja baik, interval Penilaiannya sebagai berikut :

Tabel III.9

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website Aktif
$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Memiliki Website Aktif}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \% = 100 \%$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website Aktif
$\frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website Aktif
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = 100 \%$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website Aktif
$\frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$

**Tabel Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung
Indikator Persentase Perangkat Daerah telah memiliki Website
Aktif**

N O	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.909.523.325,00	45.923.819.991,00	93,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.661.505.691,00	16.993.865.390,00	96,22
3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	138.500.700,00	136.971.000,00	98,90
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	658.846.000,00	651.611.000,00	98,90
5	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
6	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	47.700.000,00	46.500.000,00	97,48
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	90.000.000,00	87.568.000,00	97,30
8	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	615.900.000,00	598.146.200,00	97,12
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231.000.000,00	229.301.065,00	99,26
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
11	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.580.000,00	32.949.800,00	85,41
12	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	93.209.000,00	91.412.575,00	98,07
13	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	625.000.000,00	623.269.168,00	99,72
14	Program Pengembangan Data/Informasi	128.711.000,00	124.716.682,00	96,90
15	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	16.512.000,00	16.512.000,00	100,00
16	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	480.220.000,00	472.736.588,00	98,44
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	16.500.000,00	14.715.398,00	89,18
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	5.150.000.000,00	4.091.281.208,00	79,44
19	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	306.350.000,00	300.320.400,00	98,03
20	Program Pengelolaan Lampu Penerangan	7.384.012.000,00	7.374.929.580,00	99,88
21	Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik	60.000.000,00	59.370.700,00	98,95
22	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	37.900.000,00	37.850.000,00	99,87

23	Program peningkatan sarana pemerintahan	80.919.000,00	78.419.500,00	96,91
24	Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan	18.000.000,00	15.235.000,00	84,64
25	Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	498.600.000,00	486.900.391,00	97,65
26	Program Peningkatan Fungsi Kantor Kelurahan	2.459.000.000,00	2.308.434.709,00	93,88
27	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	983.000.000,00	963.521.808,00	98,02
	JUMLAH	86.740.488.716,00	81.771.358.153,00	94,27

Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima.

Capaian Kinerja Sasaran – Realisasi Anggaran
 100 - 94,27 = 5,73 %

Sasaran 6. Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian.

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian terhadap PDRB. Kinerja sektor pertanian berpengaruh terhadap sumbangan sektor ini ke PDRB Kabupaten Rembang. Walaupun masih menjadi sektor utama yang menyumbang PDRB namun selama lima tahun terakhir, sumbangan sektor pertanian semakin menurun seperti tersaji dalam grafik berikut :



Beberapa permasalahan diantaranya masih kurangnya penerapan teknologi pertanian, belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian, belum terbangunnya kawasan agroindustri dan agropolitan,

terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik penyuluhan pengembangan agribisnis pertanian, masih tingginya biaya produksi dalam usaha pertanian serta banyaknya petani yang masih berorientasi pada model subsistem dan belum berorientasi pada bisnis berdampak pada belum optimalnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui capaian sasaran ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu Indeks Peningkatan Produksi Padi dan Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian. Rumus perhitungan indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Peningkatan Produksi Padi} = \frac{\text{Produksi Padi ditahun yang dihitung}}{\text{Produksi Padi ditahun sebelumnya}}$$

$$\text{Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian} = \frac{\text{Pelaku Usaha Sektor Pertanian ditahun yang dihitung}}{\text{Pelaku Usaha Sektor Pertanian ditahun sebelumnya}}$$

Capaian dua indikator tersebut di tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN 2018	% CAPAIAN 2017	% CAPAIAN 2016	RPJMD	
	2018	2018				TARGET AKHIR 2021	% CAPAIAN s/d 2018
Indeks Peningkatan Produksi Padi (indeks)	1,09	0,92	84,14	107,41	56,60	1,14	80,70
Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian (indeks)	1,45	1,03	70,71	80,71	85,92	1,60	64,37
Rata-rata			77,42	94,06	71,26		

Capaian pada kedua indikator pada tahun 2108 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Penurunan pada indeks peningkatan produksi padi sebesar 27,66% sedangkan indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian menurun sebesar 12,39%. Jika dibandingkan rata-rata capaian selama tiga tahun terakhir maka persentase capaian tertinggi ada di tahun 2017 yaitu sebesar 94,06% dan terendah di tahun

2016 sebesar 71,26%. Sedangkan di tahun 2018 capaian pada indeks peningkatan produksi padi sebesar 84,14 dan indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian dengan capaian 70,71 diperoleh rata-rata sebesar 77,42% atau bisa dikatakan dalam kategori *cukup berhasil*. Pada indeks peningkatan produksi padi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 1,14 baru tercapai 80,70% sedangkan pada indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian baru tercapai 64,37%. Penurunan capaian pada kedua indeks ini menunjukkan bahwa ada sektor lain yang terjadi peningkatan dalam memberikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Rembang. Untuk mengetahui penyebab penurunan indikator tersebut, akan lebih rinci dibahas dalam sub bab berikut.

1. Indeks Peningkatan Produksi Padi

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 terlihat bahwa capaian di tahun 2018 menurun cukup banyak. Capaian pada tahun 2017 sebesar 107,41% turun menjadi 84,14% di tahun 2018. Dari target indeks sebanyak 1,09 hanya mampu terealisasi sebanyak 0,92 dengan nilai capaian sebesar 84,14% atau dikatakan *berhasil*. Hal yang menyebabkan penurunan indeks ini disebabkan turunnya produksi padi seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.11
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
di Kabupaten Rembang Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2017	2018	
1.	Padi Sawah			
	a. Luas Panen	44.727	36.109	-19,27
	b. Produksi	218.413	201.307	-7,83
	c. Produktivitas	4,88	5,57	14,14
2.	Padi Gogo			
	a. Luas Panen	5.420	3.879	-28,43
	b. Produksi	21.962	19.317	-12,04
	c. Produktivitas	4,05	4,98	22,96
3.	Padi Total			
	a. Luas Panen	50.147	39.988	-20,26
	b. Produksi	240.375	220.444	-8,29
	c. Produktivitas	4,79	5,51	15,03

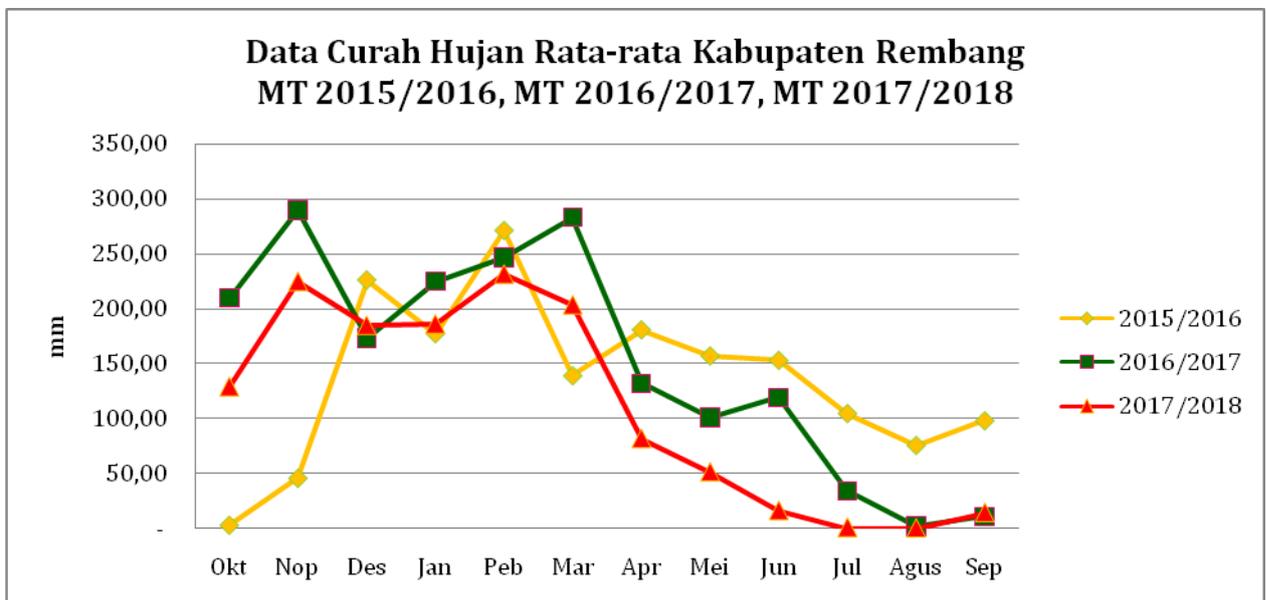
Sumber : Dintanpan, 2018

Dari tabel terlihat bahwa luas panen dan produksi padi sawah dan padi gogo tahun 2018 turun dibandingkan dengan tahun 2017 namun hal ini menyebabkan peningkatan

produktivitas untuk kedua jenis komoditas padi. Penurunan angka produksi ini disebabkan karena curah hujan pada MT (Musim Tanam) tahun sebelumnya lebih rendah.

Tabel III.12
Data Curah Hujan Rata-rata Kabupaten Rembang
MT 2015/2016, MT 2016/2017, MT 2017/2018

MT	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
2015/2016	3,50	46,07	226,21	177,36	271,00	139,14	180,86	157,14	153,14	104,93	75,93	98,29
2016/2017	210,07	290,07	173,21	225,00	246,43	283,29	131,93	100,93	119,21	33,86	1,71	10,50
2017/2018	128,93	224,43	184,57	185,86	231,21	203,14	81,71	51,36	16,36	1,00	0,43	14,57



Dari tabel dan grafik dapat diketahui bahwa curah hujan pada MT 2017/2018 lebih rendah jika dibandingkan MT dua tahun sebelumnya. Curah hujan pada MT II tahun 2017 dan MT I tahun 2018 mempengaruhi jumlah produksi padi. Tanaman padi membutuhkan banyak air terutama pada masa vegetatif yang berlangsung pada awal persemaian benih. Jika pada masa ini kebutuhan air sedikit maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Beberapa solusi atau strategi yang perlu dipertimbangkan untuk menghadapi kendala yang sama pada tahun-tahun mendatang :

- a. Mendorong tumbuhnya pelaku usaha jasa gudang penyimpanan gabah dan pengeringan padi yang terintegrasi dengan RMU (*Rice Milling Unit*).
- b. Pemerintah hendaknya mendorong peran BULOG untuk bekerja sama dengan kelompok tani/ gapoktan untuk menampung gabah/ beras dari petani pada saat panen raya.

- c. Mendorong terbentuknya unit-unit Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA) pada tingkat kelompok tani/ gapoktan berupa melalui fasilitasi bantuan alat mesin pertanian maupun swadaya kelompok.
- d. Pembangunan cadangan air dan saluran pengairan pada lahan sawah tadah hujan untuk menampung air hujan sehingga pada musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi.

2. Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian

Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian memiliki capaian kinerja sebesar 70,71% termasuk dalam kriteria *cukup berhasil* dengan melihat capaian sebesar 1,03 dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,45. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10% dari capaian sebesar 80,61%. Sebab pada tahun 2018 dari target indeks 1,45 terrealisasi indeks 1,03 sementara pada tahun 2016 dari target indeks 1,40 terealisasi indeks 1,13. Angka indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian ini didapat dari perbandingan jumlah pelaku usaha sektor pertanian tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha sektor pertanian pada tahun sebelumnya.

Penurunan capaian ini disebabkan karena turunnya minat masyarakat untuk terjun dalam usaha sektor pertanian. Turunnya minat ini disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki, belum adanya jaringan pemasaran yang kuat dan pasar yang kurang menjanjikan karena harga komoditas pertanian yang fluktuatif. Dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPSTNAKER), peningkatan pelaku usaha baik tingkat kelompok, perorangan maupun badan usaha dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.13
Jumlah Pelaku Usaha Sektor Pertanian
di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	KOMODITAS	Tahun		Peningkatan +/- (buah)
		2017	2018	
1	Tanaman Pangan Hortikultura (buah)	382	388	6
2	Perkebunan (buah)	113	114	1
3	Peternakan (buah)	137	146	9
Jumlah		632	648	16

Sumber : DPMPST NAKER (data diolah)

Namun sebenarnya kenyataan dilapangan sebenarnya banyak sekali pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian namun belum terdata karena tidak melakukan perijinan. Beberapa permasalahan yang biasanya sering terjadi pada para pelaku usaha sektor

pertanian adalah kebiasaan dalam menjalankan usahanya seringkali hanya didasarkan pada keinginan sesaat, mudah berubah dari satu kegiatan usaha pada kegiatan usaha lain.

Upaya yang semestinya dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang kedepan adalah dengan memfasilitasi pendampingan dan pelatihan kepada para para kelompok tani dan membangun jaringan kemitraan dengan pengusaha besar terkait pemasaran dan modal usaha, juga pendekatan kepada pihak perbankan dan mengikutsertakan pelaku usaha dalam hal kegiatan pameran atau promosi.

Program-program untuk mendukung meningkatnya kinerja sektor pertanian telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.14
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.340.000.000	1.308.214.000	97,63
2.	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	921.016.000	894.034.834	97,07
3.	Pengembangan Agribisnis	1.897.000.000	1.873.192.000	98,74
Jumlah		4.158.016.000	4.075.440.834	97,81

Ada tiga program yang mendukung sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian dengan rata-rata serapan sebesar 97,81%. Dari total anggaran sebesar Rp 4.158.016.000,- terserap sebesar Rp 4.075.440.834,-. Adapun tingkat efektivitas anggaran dan efektivitas anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.15
Efektivitas Anggaran dan Efisiensi Anggaran
Pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

No.	Uraian	Formula	Capaian
1	Tingkat efektivitas anggaran	(Realisasi anggaran belanja / target anggaran) x 100 %	97,81 %
2	Tingkat efisiensi anggaran	% Rata-rata capaian indikator kinerja - % Realisasi anggaran	77,42 % - 97,81 % = -20,39 %

Masalah produksi pertanian menjadi masalah yang tidak bisa dikontrol karena berhubungan dengan cuaca. Tinggi rendahnya hasil produksi pertanian berbanding dengan ketersediaan air, dalam hal ini curah hujan karena sebagian lahan sawah di Kabupaten Rembang masih sawah tadah hujan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan terjadinya inefisiensi anggaran pada sasaran ini disebabkan karena :

- a. Harga jual yang rendah pada saat panen raya tiba karena penentuan harga jual oleh satu pihak yaitu tengkulak.
- b. Musim tanam dan panen raya yang serentak terutama pada saat MT I menyebabkan jumlah tenaga kerja sangat kurang. Kurangnya jumlah tenaga kerja ini disebabkan karena penurunan jumlah tenaga kerja produktif yang bekerja di sektor pertanian.
- c. Modal yang kecil menyebabkan pelaku usaha di sektor pertanian kurang bisa mengembangkan usahanya.
- d. Kecenderungan usaha pertanian bersifat musiman sehingga pelaku usaha beralih ke usaha yang lainnya dan ditekuni dalam kurun waktu sebentar.

Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Perikanan, Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Penyelenggaraan TPI

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kontribusi terbesar dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Rembang, utamanya dari komoditas perikanan. Pada tahun 2017, Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sebesar 27,15% disusul terbesar kedua adalah dari sektor industri pengolahan sebesar 21,83% dan yang ketiga adalah sektor perdagangan sebesar 13,55%.

Tabel III.16
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi Perikanan, Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Penyelenggaraan TPI

Indikator Sasaran	Tahun 2018		Capaian (%)			RPJMD	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target Akhir 2021	Capaian (%) s/d 2018
Produksi Ikan (Ton)	12.120	42.452	350,26	448,55	1.081,24	3,90	132,00
Usaha Produktif Keluarga Nelayan (unit)	2.789	3.000	107,57	107,88	108,27	2.939	102,07
Capaian Kinerja Rata-Rata			228,91	278,21	594,75		117,03

Capaian kinerja sasaran produksi ikan tahun 2018 adalah sebesar 350,26%, pencapaian ini telah memenuhi bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 12.120 Ton dengan capaian realisasi sebesar 42.452 Ton. Meskipun telah memenuhi bahkan melampaui target, akan tetapi capaian kinerjanya menurun dibandingkan capaian kinerja dalam 2 tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja tahun 2017 sebesar 448,55% dan tahun 2016 sebesar 1.081,24%. Capaian kinerja tahun 2018 menurun dibandingkan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya disebabkan adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan dengan menggunakan cantrang yang biasa digunakan nelayan Rembang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan. Upaya – upaya telah dilakukan dalam meningkatkan produksi ikan dengan atas pelarangan penggunaan alat tangkap ikan dengan menggunakan cantrang melalui upaya pengalihan alat tangkap ikan dengan menggunakan cantrang yang biasa digunakan nelayan Rembang diganti dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan melalui sosialisasi dan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Sedangkan capaian kinerja sasaran usaha produktif keluarga nelayan sebesar 107,57%, pencapaian ini telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 ini dibandingkan pencapaian 2 tahun sebelumnya relatif stabil meskipun sedikit menurun.

Dengan melihat pencapaian masing-masing indikator sasaran meningkatnya produksi perikanan, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI, rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 228,91%. Bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, pencapaian pada tahun 2018 ini relatif menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar 594,75 dan tahun 2017 sebesar 278,21% yang lebih disebabkan karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap ikan dengan menggunakan cantrang oleh pemerintah pusat. Meskipun begitu apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, pencapaian ini telah memenuhi pencapaian sebesar 117,03%

Keberhasilan dalam realisasi pencapaian target capaian kinerja meningkatnya produksi perikanan, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait meningkatnya produksi perikanan, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, berikut ini adalah tabel program pendukung saran besaran program, realisasi dan capaian anggaran:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Pengembangan Perikanan Budidaya	1.174.370.000	984.644.000	83,84
2.	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	92.000.000	77.964.571	84,74
3.	Pengelolaan TPI Terpadu	21.735.561.000	16.201.948.215	74,54

4.	Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Nelayan	198.860.000	196.886.000	99,01
JUMLAH		23.200.791.000	17.461.442.786	75,26

Program-program tersebut diatas digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 228,91%, selain melampaui pencapaian target kinerja, pelaksanaan program-program yang mendukung sasaran tersebut mampu dilakukan secara efisiensi, yaitu dengan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sebesar 75,26% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 24,74% atau sebesar Rp. 5.739.348.214,-.

Sasaran 8. Meningkatkan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan.

Sasaran meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan menggunakan tiga indikator, yaitu: persentase pertumbuhan ekspor, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB dan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Tabel berikut ini merangkum capaian kinerja ketiga indikator tersebut.

Tabel III.17
Capaian kinerja indikator sasaran
meningkatnya sektor industri dan perdagangan

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target	% Capaian th. 2018
Persentase pertumbuhan ekspor (%)	4,00	77,18	1.929,48	779,54	2.397,71	4,00	1.929,48
Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB (%)	14,50	13,50	93,10	95,10	91,86	14,80	91,22
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	21,20	21,80	102,97	102,83	103,33	22,00	99,09
Rata-Rata			708,52	325,82	864,30		706,60

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang dan BPS Kab. Rembang

Capaian kinerja sasaran ini tidak linier. Pada tahun 2018, capaian kinerjanya sebesar 708,52%, artinya capaian realisasi pada tahun 2018 lebih dari tujuh kali

targetnya. Capaian ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari capaian tahun 2017, meskipun lebih rendah dari capaian tahun 2016. Capaian tahun 2018 ini juga sudah melampaui rata-rata target capaian yang ditetapkan pada tahun terakhir RPJMD, yaitu sebesar 706,60%. Keberhasilan capaian kinerja sasaran ini didorong oleh kinerja ekspor yang sangat baik. Pada tahun 2018, capaian kinerja pertumbuhan ekspor mencapai hampir 20 kali dari target yang ditetapkan, yakni mencapai kinerja sebesar 1.929,48%

a) Persentase pertumbuhan ekspor

Ekspor sangat penting bagi perekonomian daerah maupun bagi perekonomian satu negara. Peningkatan ekspor menandakan barang kita bisa diterima di pasar internasional. Peningkatan ekspor juga mendorong peningkatan devisa negara dan peningkatan lapangan pekerjaan. Ekspor di Kabupaten Rembang didominasi oleh komoditi berbahan baku hasil perikanan laut dan berbahan baku kayu.

Pertumbuhan ekspor sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan, seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel III.18
Nilai dan pertumbuhan ekspor tahun 2011-2018

Tahun	Nilai ekspor (\$)	Pertumbuhan ekspor (%)
2011	15.937.534,10	-
2012	25.751.858,80	61,58
2013	12.205.493,30	(52,60)
2014	18.983.364,60	55,53
2015	18.983.364,60	-
2016	37.190.000,00	95,91
2017	48.786.451,19	31,18
2018	77.795.566,20	59,46

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang

Angka pertumbuhan ekspor tahun ke t dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai ekspor tahun ke (t)} - \text{Nilai ekspor tahun ke (t-1)}}{\text{Nilai ekspor tahun ke (t-1)}}$$

$$\text{Nilai ekspor tahun ke (t-1)}$$

Pertumbuhan ekspor yang jauh di atas target yang ditetapkan mendorong capaian kinerja pertumbuhan ekspor menjadi sangat baik. Capaian kinerja pertumbuhan ekspor tahun 2016 sebesar 2.397,71% atau hampir mencapai 24 kali dari target yang ditetapkan di RPJMD. Sempat mengalami penurunan kinerja di tahun 2017 menjadi sekitar delapan kali dari target, kinerja pertumbuhan ekspor kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sekitar dua puluh kali dari target, tepatnya di angka 1.929,48%.

Kinerja ekspor tahun 2018 didorong oleh munculnya tiga eksportir baru di Kabupaten Rembang. Berikut data ekspor tahun 2017 dan 2018:

Tabel III.19
Eksportir dan Nilai Ekspor tahun 2017-2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI EKSPOR (Rp.)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	PT. HOLIMINA JAYA	165.730.457.658,00	347.353.612.718,78
2	CV. SABHA	67.618.970.719,00	47.531.315.008,00
3	PT. DHARMA CIPTA RAYA	10.343.399.500,00	8.565.251.212,00
4	CV. NATURAL ANTIK	16.553.934.456,00	9.031.284.183,00
5	PT. KMP PUTRA	16.044.164.574,00	99.572.234.873,00
6	PT. DHARMINDO SAMUDRA ABADI	40.933.092.442,00	103.200.759.695,00
7	PT. NAGA LAUT TIMUR	11.781.409.443,00	23.587.913.938,00
8	PT. KMP FORZEN	35.013.613.479,00	97.915.264.794,00
9	PT. SASANA ANTIK	17.732.323.347,00	20.867.353.594,00
10	PT. BINTANG KARYA LAUT	20.382.388.765,00	24.119.176.730,00
11	PT. PAN PUTRA	256.483.336.784,00	334.271.278.399,14
12	CV. SINAR MUTIARA ABADI	-	6.575.355.247,00
13	PT. SUMBER MINA BAHARI	-	15.252.249.600,00
14	PT. KELOLA MINA LAUT	-	29.090.442.000,00
	JUMLAH	658.617.091.167,00	1.166.933.492.991,92

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang

Program pemerintah Kabupaten Rembang yang mendorong kinerja pertumbuhan ekspor di tahun 2018 adalah program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan nilai realisasi sebesar Rp. 22.925.000,00 atau setara dengan 84,91% dari anggaran. Program ini berupa rapat koordinasi bersama antara Dinindagkopukm Kab. Rembang, Dinperindag Prov. Jawa Tengah, para eksportir, pihak perbankan, serta pihak bea dan cukai.

b) Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB

Data realisasi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Rembang. Pada tahun 2018 capaian kinerja indikator ini mencapai 93,10%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 91,86%, namun mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 95,10%. Untuk mencapai target di akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2021, kinerja di tahun 2018 ini masih kurang sebesar 8,78%.

Kurang optimalnya kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ini sangat berkaitan dengan kurangnya sarana prasarana perdagangan. Salah satunya, di Kabupaten Rembang belum ada pusat perbelanjaan yang representatif seperti mal atau pusat perbelanjaan. Banyak masyarakat Kabupaten Rembang yang terpaksa berbelanja ke luar daerah untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan barang yang lebih murah. Sementara renovasi Pasar Rembang belum juga

terwujud karena belum tercapainya kesepakatan pihak-pihak terkait, terutama pihak pedagang pasar.

Selain itu, pasar daerah di Kabupaten Rembang juga belum merata. Ada 7 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang yang belum memiliki pasar daerah, yaitu Kecamatan Kaliori, Sumber, Gunem, Bulu, Sluke, Sale, dan Pancur.

Usaha Pemerintah Kabuapten Rembang untuk menaikkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB pada tahun 2018 dilakukan melalui 10 program dengan total realisasi sebesar Rp. 20.338.838.161, setara dengan 95,26% dari anggaran.

Kesepuluh program tersebut adalah:

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, meliputi pembangunan/renovasi bangunan pasar, pengembangan pasar dan distribusi produk serta peningkatan sistem dan jaringan barang/produk dengan realisasi sebesar Rp. 17.355.352.363, setara dengan 95,49% dari anggaran.
Dari realisasi tersebut, sebesar Rp. 9.829.360.000 merupakan pembangunan pasar di Kecamatan Pamotan yang sampai akhir tahun 2018 belum ditempati, Rp. 520.988.050 untuk perencanaan (DED) Pasar Rembang dan Rp. 2.756.779.000 untuk pengadaan tanah pasar Rembang yang tidak jadi dibangun pada tahun 2018.
2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan realisasi sebesar Rp. 13.820.000, setara dengan 100% anggaran berupa rapat koordinasi bersama 40 pedagang kaki lima.
3. Program peningkatan kemitraan usaha perdagangan berupa rapat koordinasi untuk menjembatani pelaku usaha kecil dengan pemilik hotel dan restoran agar produk umkm bisa dipajang di hotel dan restoran. Realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000, setara dengan 100% anggaran.
4. Program pembangunan sarana dan prasarana distribusi, meliputi pembangunan/renovasi pasar dan untuk usaha-usaha menaikkan retribusi pasar. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.030.416.169, setara dengan 87,11% dari anggaran.
5. Program pembinaan pedagang dengan melaksanakan studi banding tentang penataan pedagang kaki lima ke Tuban dan Lamongan Jawa Timur dalam usaha menata pedagang kaki lima di kompleks eks Era dan Gambiran Kecamatan Rembang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 240.532.500, atau setara 98,45% dari anggaran.

6. Program promosi produk unggulan daerah dengan terlaksananya "Rembang Expo" di Rembang dan di area PRPP Semarang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 417.214.262, setara dengan 98,97% dari anggaran.
7. Program pengembangan produk unggulan daerah dengan terlaksananya 6 UMKM batik, aksesoris, kerajinan tas dan kulit mengikuti pameran Inacraft di Jakarta dengan menyewa 2 stand pameran. Realisasi anggaran sebesar Rp. 246.275.159, setara dengan 98,51% dari anggaran.
8. Program peningkatan kemetrolagian dan perlindungan konsumen meliputi pengawasan barang bersubsidi dan barang tak layak edar, serta melakukan pengawasan alat-alat ukur di pasaran. Realisasi anggaran sebesar Rp. 798.266.629, setara dengan 98,39% dari anggaran.
9. Program pengembangan sistem distribusi dengan melakukan usaha pemeliharaan dan penambahan fasilitas di showroom batik lasem. Realisasi anggaran sebesar Rp.169.596.079, setara 94,22% dari anggaran.
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan melakukan pamantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok. Realisasi anggaran sebesar Rp.19.440.000, setara dengan 97,20% dari anggaran.

c) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sudah melampaui target. Seperti kinerja ekspor, capaian kinerja kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami pasang surut. Pada tahun 2016, capaian kinerjanya mencapai 103,33% lalu menurun di tahun 2017 menjadi sebesar 102,83% dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 102,97%, belum mampu manyamai capaian di tahun 2016. Sedangkan untuk mencapai target di akhir tahun RPJMD, indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 masih membutuhkan capaian kinerja sebesar 0,77%.

Capaian kinerja kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sangat erat hubungannya dengan jumlah industri. Pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Rembang sebesar 0,66% di tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 1,53%

Jumlah industri di Kabupaten Rembang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.20
Jumlah Industri tahun 2016-2018

Skala Industri	Tahun		
	2016	2017	2018
Kecil	5.083	5.089	11.999
Mikro	-	-	-
Menengah	403	403	403
Besar	37	36	36
Rumah Tangga	6648	6.723	-
Jumlah	12.171	12.251	12.438
Pertumbuhan	-	0,66%	1,53%

Sumber : Dinindagkopukm Kab. Rembang

Keterangan : Pada tahun 2018, skala industri rumah tangga digabungkan ke skala industri kecil

Usaha Pemerintah Kabuapten Rembang untuk menaikkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 dilakukan melalui program-program di bawah ini dengan total realisasi sebesar Rp. 815.518.900, setara dengan 99,17% dari anggaran.

1. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, dengan realisasi sebesar Rp. 44.400.000, setara dengan 100% dari anggaran.
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp. 815.518.900, setara dengan 99,88% dari anggaran.
3. Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri, dengan realisasi sebesar Rp. 145.928.000, setara dengan 97,87% dari anggaran.
4. Penataan Struktur Industri dan Kawasan Infustri, dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000, setara dengan 100% dari anggaran.
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan realisasi sebesar Rp. 128.400.000, setara dengan 99,53% dari anggaran.
6. Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif, dengan realisasi sebesar Rp. 227.375.000, setara dengan 99,29% dari anggaran.
7. Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan realisasi sebesar Rp. 98.715.900, setara dengan 98,72% dari anggaran.
8. Pembinaan Industri, dengan realisasi sebesar Rp. 38.750.000, setara dengan 100% dari anggaran.

Tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran sasaran meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan tampak dalam tabel berikut:

Tabel III.21
Efisiensi dan Efektivitas Sasaran Meningkatnya Kinerja
Sektor Industri dan Perdagangan
Tahun 2018

Uraian	Capaian Indikator			
	Pertumbuhan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Rata-Rata
Tingkat efisisensi anggaran	84,91%	95,26%	99,17%	93,11 %
Tingkat efektivitas anggaran	1844,57%	(2,16%)	3,80%	615,40%

Sumber: data yang diolah

Sasaran 9 : Menurunnya Angka Pengangguran

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatasnya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah, termasuk yang dialami oleh Kabupaten Rembang. Upaya-upaya dalam rangka mengatasi masalah pengangguran terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Tabel III.22
Capaian Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Sasaran	Tahun 2018		Capaian (%)			RPJMD	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target Akhir 2021	Capaian (%) s/d 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10	2,87	142,86	131,66	107,50	3,90	132

Capaian kinerja sasaran tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 adalah sebesar 2,87%, keadaan ini meningkat dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 131,66% dan tahun 2016 sebesar 107,50%. Realisasi tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 2,87% bila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 3,90% pada tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 132%.

Keberhasilan dalam pencapaian target sasaran tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan adanya upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan – pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memasuki dunia kerja, menyalurkan pencari kerja melalui pengembangan informasi pasar kerja dan penempatan pencari kerja baik didalam negeri maupun luar negeri, selain itu penurunan tingkat pengangguran terbuka akibat meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Rembang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini baru dalam tahap pembangunan pabrik sepatu ‘PT. Seng Dam Jaya Abadi’ dan pabrik gula ‘PT.Wadah Karya Rembang’, yang berpotensi menyerap tenaga kerja ±4.000 apabila nanti perusahaan sudah mulai operasional.

Keberhasilan dalam realisasi pencapaian target capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait menurunnya angka pengangguran. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, berikut ini adalah tabel program pendukung sasaran besaran program, realisasi dan capaian anggaran:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.145.900.000	1.084.511.750	94,64
2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	150.800.000	146.025.000	96,83
3.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	231.800.000	226.402.500	97,67
JUMLAH		1.528.500.000	1.456.939.250	95,32

Program-program tersebut diatas digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran tingkat pengangguran terbuka bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 142,86%, selain melampaui pencapaian target kinerja, pelaksanaan program-program yang mendukung sasaran tersebut mampu dilakukan secara efisiensi, yaitu dengan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sebesar 95,32% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 4,68% atau sebesar Rp. 71.560.750,-.

Sasaran 10 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendasar yang segera ditangani. Penanggulangan kemiskinan yang holistik diperlukan keterlibatan semua pelaku terutama peran Pemerintah Daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat melalui

perluasan peran dan ruang dialog dengan menggalang kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Capaian kinerja indikator sasaran persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

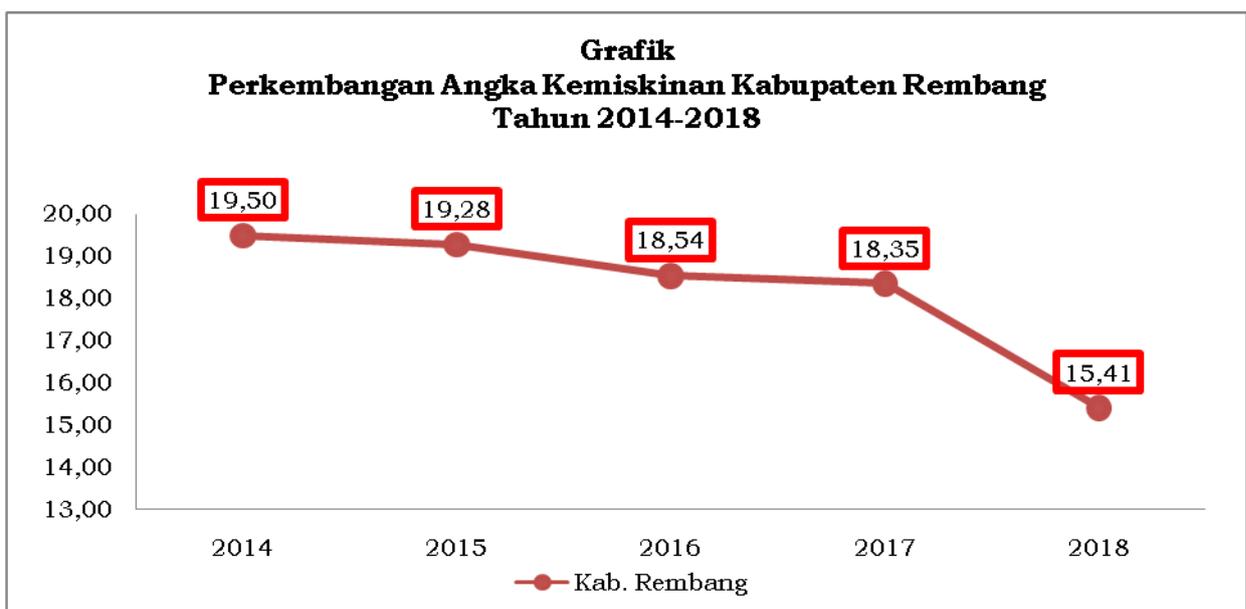
Tabel III.23
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	RPJMD	
		2018	2018				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,97	15,41	97,06	86,10	92,52	11,55	66,58

Sumber : BPS 2018

Realisasi persentase penduduk miskin pada tahun 2018 adalah sebesar 15,41%. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 14,97%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 97,06% dari target yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu tahun 2016-2018, capaian kinerja persentase penduduk miskin masih naik turun.

Dalam perkembangannya, selama kurun waktu tahun 2014-2018 persentase penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun penurunannya hanya 1,02% per tahun. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Rembang tersaji dalam tabel berikut ini.



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan sampai dengan tahun 2018 adalah :

Terbitnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, Kabupaten Rembang tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan desa dan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu menyesuaikan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Pemberian bantuan keuangan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemiskinannya di desa. Ada 4 klasifikasi, diantaranya :

- a. Desa merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) lebih dari 400 Kepala Keluarga (KK) dengan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,-;
- b. Desa kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) lebih dari 295 Kepala Keluarga (KK) sampai dengan 400 Kepala Keluarga (KK) dengan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 125.000.000,-;
- c. Desa hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) 190 Kepala Keluarga sampai dengan 295 Kepala Keluarga dengan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,-;
- d. Desa biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) kurang dari dengan 190 KK dengan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,-.

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penanggulangan kemiskinan adalah untuk merehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Target setiap tahunnya didalam program RTLH targetnya terus bertambah. Secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Rembang menyalurkan bantuan dana bedah rumah. Penerima bantuan bedah rumah, masing-masing mendapatkan uang tunai senilai Rp 10 juta. Untuk program bedah rumah Pemerintah Kabupaten Rembang melibatkan anggaran dari Kementerian, Provinsi, APBD, dana CSR BUMN/BUMD, dan bantuan perorangan. Selain itu perusahaan yang ada di wilayah Rembang juga turut dilibatkan. Berdasarkan data tahun 2015 tercatat ada 23 ribu RTLH diwilayah ini telah dibedah. 2900 rumah berhasil dibedah pada tahun 2016, dan 3000 rumah pada tahun 2017. Sedangkan 4400 rumah lainnya akan dibedah pada tahun 2018 ini.

Dengan berbagai upaya tersebut diatas, capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan belum 100%. Faktor penyebab belum tercapainya capaian kinerja persentase penduduk miskin antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara umum pemerintah daerah belum memiliki rumusan strategi yang memadai, institusi TKPKD yang diharapkan menjadi motor penggerak dalam menggalang stakeholders pembangunan (Dinas, Swasta, NGO, Perguruan Tinggi dan pihak Swasta) dan atau kelompok yang merepresentasikan warga miskin, saat ini kondisinya belum mampu berperan secara strategis;
- 2) Akses masyarakat miskin sangat terbatas terhadap proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin seperti; Sanitasi (Air Bersih, MCK), Permukiman, Gizi, Penanggulangan penyakit menular, Pendidikan dasar dan Kesehatan;
- 3) Strategi dan program-program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat artifisial, parsial dan tidak memiliki tujuan jangka panjang;
- 4) Orientasi program belum menitikberatkan pada pendekatan masyarakat miskin sebagai “pelaku utama” yang juga sekaligus penerima manfaat secara langsung;
- 5) Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan belum mengadopsi metodologi dan proses daur program partisipatif.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Rembang belum optimal dalam menyelesaikan berbagai penyebab diatas.

Solusi kedepan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang adalah Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Strategi tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dilakukan dengan cara:

- 1) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
- 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Meskipun belum berhasil dalam mencapai realisasi target dan capaian kinerja persentase penduduk miskin, pencapaian sampai dengan tahun 2018 merupakan hasil dari

beberapa program yang dilakukan terkait program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	234.000.000,00	233.449.500,00	99,76
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	749.912.000,00	711.880.750,00	94,93
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	156.200.000,00	155.618.829,00	99,63
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	860.000.000,00	795.433.775,00	92,49
5	Program Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	190.000.000,00	145.852.922,00	76,76
6	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	52.000.000,00	39.616.900,00	76,19
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	310.597.000,00	310.589.188,00	100,00
8	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	94.000.000,00	91.089.500,00	96,90
9	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	1.727.283.500,00	1.608.731.400,00	93,14
10	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah	892.000.000,00	811.595.950,00	90,99
11	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	568.000.000,00	502.966.900,00	88,55
	JUMLAH	5.833.992.500,00	5.406.825.614,00	92,68

Dari anggaran Rp 5.833.992.500,-, terealisasi sebesar Rp 5.406.825.614,-. Dengan realisasi anggaran tersebut belum tercapai kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2018. Artinya dengan tidak terserapnya anggaran 100% (masih terdapat SiLPA sebesar Rp 427.166.886,-), menjadi salah satu sebab tidak tercapainya kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan.

Sasaran 11: Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air

Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara

Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO_x dan Nox₃.

3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Luas Wilayah.

Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 %

Klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Unggul			x	>	90
Sangat Baik	82	<	x	≤	90
Baik	74	<	x	≤	82
Cukup	66	≤	x	≤	74
Kurang	58	≤	x	<	66
Sangat Kurang	50	≤	x	<	58
Waspada			x	<	50

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang capaian IKLH Kabupaten Rembang tahun 2018 diperoleh angka sebesar Index sebesar 59,88 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel IKLH Kabupaten Rembang Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel III.24
Tabel IKLH Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Indikator IKLH	Nilai	Bobot	Pengukuran IKLH
1	IKA (Indek Kualitas Air)	35,53	0,3	10,66

2	IKU (Indek Kualitas Udara)	93,51	0,3	28,05
3	IKTL (Indek Takupan Lahan)	52,93	0,4	21,17
	IKLH			59,88

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Adapun Pengukuran kinerja Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.25
Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.50	59.88	90.05	85.29	63.3	68	88.08

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
$\frac{59,88}{66,50} \times 100 \% = 90,05 \%$

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Masalah penanganan dan pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, ditunjukkan dengan kondisi pengangkutan sampah pada tahun 2018 baru mencapai 65% artinya 35% sampah masih belum terangkut;
2. Banyak usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
3. Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya 1 unit.
4. Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan mangrove. Hutan mangrove yang direhabilitasi baru mencapai 160 ha.

**Tabel Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya
kualitas Lingkungan Hidup**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.294.955.058,00	8.216.586.518,00	99,06
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.195.400.242,00	928.288.160,00	77,66
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	258.349.000,00	255.411.500,00	98,86
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	48.000.000,00	46.845.000,00	97,59
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	45.000.000,00	41.745.000,00	92,77
6	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	87.660.000,00	86.760.000,00	98,97
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	525.905.000,00	513.660.000,00	97,67
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	241.000.000,00	239.722.226,00	99,47
9	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	4.063.125.500,00	3.987.681.425,00	98,14
	JUMLAH	14.759.394.800,00	14.316.699.829,00	97,00

Solusi Terhadap Permasalahan Yang Menghambat Pencapaian Target Indikator Skor PeGi (Pemeringkatan e-Government) sebagai berikut :

1. Penanganan dan pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan dan pembuangan harus dihitung agar dapat menangani jumlah sampah yang ada di Kabupaten Rembang,
2. Semua usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
3. Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
4. Adanya upaya untuk rehabilitasi hutan mangrove.

Sasaran 12 : Meningkatnya Nilai Investasi

Investasi mempunyai peran yang sangat penting, karena investasi mempunyai peran dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan realisasi investasi akan berdampak terhadap pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Tabel.III.26
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Sasaran	Tahun 2018		Capaian (%)			RPJMD	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target Akhir 2021	Capaian (%) s/d 2018
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	4,52	7,17	158,62	131,48	124,88	5,25	136,57

Capaian kinerja sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 adalah sebesar 158,62%, keadaan ini meningkat dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 131,48% dan tahun 2016 sebesar 124,88%. Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 7,17 Trilyun bila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar Rp. 5,25 Trilyun pada tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 136,57%.

Keberhasilan pencapaian target meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN disebabkan karena meningkatnya daya tarik investasi Kabupaten Rembang bagi calon investor untuk berusaha di Kabupaten Rembang. Daya tarik investasi Kabupaten Rembang disebabkan salah satunya dengan tersedianya infrastruktur pendukung investasi yaitu PLTU dan Pelabuhan Rembang – Terminal Sluke, ketersediaan lahan, biaya operasional yang relative rendah dibanding daerah lain dan adanya potensi investasi yang ada serta iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi di Kabupaten Rembang.

Upaya – upaya yang dilakukan agar realisasi investasi PMA dan PMDN semakin meningkat adalah diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi investasi untuk memunculkan kepeminatan berinvestasi dan malakukan pelayanan investasi utamanya adalah pelayanan perizinan dengan pelayanan Online Single Submission (OSS) yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, yaitu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang bertujuan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha.

Keberhasilan dalam realisasi pencapaian target capaian kinerja meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, berikut ini adalah tabel program pendukung saran besaran program, realisasi dan capaian anggaran:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	110.000.000	109.275.600	99,34
2.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	169.600.000	169.407.472	99,89
3.	Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	151.600.000	143.092.795	94,39
4.	Pengendalian Perijinan	148.800.000	148.454.315	99,77
5.	Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	25.000.000	24.875.700	99,50
6.	Kerjasama Pembangunan	357.853.000	355.797.775	99,43
7.	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Potensi Daerah	1.300.000.000	1.283.378.476	98,72
JUMLAH		2.262.853.000	2.234.282.133	98,74

Program-program tersebut diatas digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 158,62%, selain melampaui pencapaian target kinerja, pelaksanaan program-program yang mendukung sasaran tersebut mampu dilakukan secara efisiensi, yaitu dengan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sebesar 98,74% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,26% atau sebesar Rp. 28.570.867,-.

Sasaran 13. Meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif

Dalam RPJMD, sasaran meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif memiliki tiga indikator, yaitu rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, persentase koperasi aktif, serta persentase KSP/USP dan koperasi sehat. Namun dalam perjanjian kinerja (PK) Bupati tahun 2018, hanya satu indikator yang tercantum, yaitu rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, dan itu kami sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.27
Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM	39.363	39.173	39.632	39.830
Jumlah Penduduk	621.134	626.136	628.901	633.429
Rasio UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	6,34	6,26	6,30	6,29

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang dan BPS Kab. Rembang

Dari tabel di atas tampak bahwa tren rasio UMKM terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 6,34% lalu mengalami penurunan tajam di tahun 2016 menjadi sebesar 6,26%. Akhriarnya di tahun 2018 menjadi sebesar 6,29%, masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016.

Capain kinerja sasaran ini kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.28
Capaian kinerja indikator sasaran
meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target	% Capaian th. 2018
Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk (%)	8,25	6,29	76,22	81,29	90,72	10,00	62,90

Sumber: data yang diolah

Tren penurunan realisasi rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk sangat memengaruhi capaian kinerjanya. Apalagi target yang ditetapkan mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan rata-rata target selama tahun 2016-2021 sebesar 10,18%. Di sisi lain rata-rata realisasinya selama tahun 2015-2018 hanya sebesar 6,30%. Hal ini berpengaruh kepada menurunnya capaian kinerja indikator rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 sebesar 90,72%, turun di tahun 2017 menjadi 81,29% dan turun lagi di tahun 2018 menjadi sebesar 76,22%.

Realisasi pada tahun 2018 hanya mencapai 6,29% dari target sebesar 8,25% atau capaian kinerja pada tahun 2018 hanya sebesar 76,22% dari target. Rendahnya semangat berwirausaha (*entrepreneurship*) menjadi faktor terpenting lambatnya pertumbuhan UMKM. Minimnya modal usaha sering menjadi alasan. Bayangan sulitnya mengelola bisnis karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman juga sering menjadi kendala. Dan momok paling menakutkan untuk memulai berbisnis adalah takut dengan kegagalan berbisnis. Akhirnya masyarakat cukup puas menjadi karyawan dengan berbondong-bondong ke bursa tenaga kerja, baik negeri maupun swasta. Sebagian rela bertahun-tahun menjadi tenaga honorer dengan gaji kecil di instansi pemerintah dengan harapan untuk diangkat menjadi ASN.

Usaha Pemerintah Kabuapten Rembang untuk menaikkan rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 dilakukan melalui program-program di bawah ini dengan total realisasi sebesar Rp. 327.063.673, setara dengan 99,11% dari anggaran.

1. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, dengan realisasi sebesar Rp. 62.863.673, setara dengan 99,78% dari anggaran.
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan realisasi sebesar Rp. 21.000.000, setara dengan 100,00% dari anggaran.
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dengan realisasi sebesar Rp. 36.000.000, setara dengan 100,00% dari anggaran.
4. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru, dengan realisasi sebesar Rp. 197.200.000, setara dengan 98,60% dari anggaran.
5. Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha, dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000, setara dengan 100,00% dari anggaran.

Tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran sasaran meningkatnya kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif tampak dalam tabel berikut:

Tabel III.29
Efisiensi dan Efektivitas Sasaran Meningkatnya Kinerja
UMKM berbasis Ekonomi Kreatif
Tahun 2018

Uraian	Capaian
Tingkat efisisensi anggaran	99,11%
Tingkat efektifitas anggaran	(22,89%)

Sumber: data yang diolah

Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Capaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dilihat dari dua indikator, yaitu persentase pertumbuhan pendapatan dari obyek tujuan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Tabel berikut ini merangkum capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata:

Tabel III.30
Capaian kinerja indikator sasaran
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target	% Capaian th. 2018
Persentase pertumbuhan pendapatan dari obyek tujuan wisata (%)	5,00	114,02	2.280,40	(265,20)	682,20	5,00	2280,40

Sumber: Dinbudpar Kab. Rembang dan BPPKAD Kab. Rembang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah mengalami turun naik. Setelah turun di tahun 2017, kembali naik di tahun 2018. Penaikan yang tinggi di tahun 2018 dari minus 98,55% menjadi positif 1.188,38% sangat dipengaruhi oleh penaikan jumlah pengunjung ke pantai desa Karang Jahe hampir 100%. Capaian tahun 2018 ini juga sudah melampaui target capaian di tahun 2021, tahun terakhir RPJMD.

a) Persentase pertumbuhan pendapatan dari obyek tujuan wisata

Pendapatan dari obyek wisata dan daya tarik wisata di tahun 2018 bertumbuh sebesar 114,02%, dari sebesar Rp. 1.828.240.923 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 3.912.711.700 di tahun 2018. Selengkapnya jumlah pendapatan obyek wisata terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.31
Jumlah Pendapatan Obyek Wisata Tahun 2014-2018

No	Nama Obyek Wisata	2014	2015	2016	2017	2018
1	Makam RA. Kartini	-	-	37.148.000	31.682.000	68.417.000
2	Museum RA. Kartini	12.922.000	12.000.000	17.674.000	26.011.000	17.690.000
3	Pantai Balongan	-	-	-	9.000.000	29.442.000
4	Pantai Caruban	-	-	137.948.462	46.621.400	17.114.400
5	Pantai Dasun	-	-	-	6.420.000	13.854.000
6	Pantai Karang Jahe	-	-	881.290.000	1.128.179.000	2.182.301.100
7	Pantai Nyamplung Indah	-	-	-	7.478.400	25.428.000
8	Pantai Pasir Putih	-	-	-	167.161.600	177.231.600
9	Pasujudan Sn Bonang	-	-	15.995.000	14.760.323	62.310.200
10	TRP Kartini	1.035.000.000	1.000.000.000	1.017.674.000	300.000.000	949.116.000
11	WW Kartini Mantingan	7.813.560	-	-	39.600.000	58.960.000

12	Wisata Alam Kajar View	-	-	-	-	5.718.000
13	Wisata Alam Watu Congol	-	-	-	-	8.526.000
14	Wisata Mangrove	-	-	-	44.696.000	11.902.800
15	Wisata Panohan	-	-	-	2.940.000	4.746.000
16	Wisata Reliji Masjid Jami Lasem	-	-	-	3.691.200	9.000.600
17	Agrowisata D'Kampoeng	-	-	-	-	237.162.000
18	Sendang Coyo	-	-	-	-	9.282.000
19	Watu Layar	-	-	-	-	6.750.000
20	TWA Sumber Semen	-	-	-	-	17.760.000
	Jumlah	1.055.735.560	1.012.000.000	2.107.729.462	1.828.240.923	3.912.711.700
	Pertumbuhan	-	48,86%	34,11%	(13,26%)	114,02%

Sumber: Dinbudpar Kab. Rembang

Catatan :

- TRP Kartini dipihak-ketigakan, sehingga pendapatan sesuai dengan kontrak kerjasama.
- Tahun 2018 diadakan pendataan terhadap Wisata alam kajar View, Wisata alam watu congol , Agro wisata D'Kampoeng, Sendang coyo, Watu layar dan Taman wisata alam sumber semen.

Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Rembang adalah progam pengembangan pemasaran pariwisata, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 951.178.000, setara dengan 99,39% dari anggaran

b) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Dari data pendapatan obyek wisata diatas, tidak semua pendapatan obyek wisata tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD, dikarenakan beberapa obyek wisata masih dikelola oleh pihak desa. Tabel berikut menunjukkan obyek wisata yang memberikan kontribusi ke PAD.

Tabel III.32
Jumlah Pendapatan Obyek Wisata yang memberikan kontribusi terhadap PAD Tahun 2018

No	Nama Obyek Wisata	Target 2018	Realisasi	
			2017	2018
1	TRP. Kartini	700.000.000	300.000.000	949.116.000
2	Museum RA.Kartini	14.000.000	22.011.000	13.090.000
3	Sanggar Budaya	5.000.000	4.700.000	4.600.000
4	Sewa Tanah/Sewa Kios/Bangunan	13.000.000	41.620.500	58.251.000
	Jumlah	732.000.000,-	368.331.500	1.025.057.000
	Pertumbuhan			178,29%

Sumber: Dinbudpar Kab. Rembang

Realisasi pendapatan obyek wisata yang memberikan kontribusi ke PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 368.331.500, tumbuh 178,29% di tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.025.057.000.

Program yang mendukung kinerja Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah program pengembangan destinasi pariwisata, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.573.478.559,00, setara dengan 75,19 dari anggaran.

Tingkat efektivitas dan efisiensi sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah tahun 2018 terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.33
Efisiensi dan Efektivitas Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2018

Uraian	Capaian Indikator		
	Persentase pertumbuhan pendapatan dari obyek tujuan wisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Rata-Rata
Tingkat efisisensi anggaran	99,39%	75,19%	87,29%
Tingkat efektivitas anggaran	2.181,01%	21,16%	1.101,09%

Sumber: data yang diolah

Sasaran 15 :Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.
- 2) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan melalui indikator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. Dan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. sebagaimana tertuang dalam tabel.berikut :

Table III.34

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			RPJMD	
		2018	2018	2018	2017	2016	Target akhir 2021	Capaian s/d 2018
1.	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik	66,01%	67,91%	102,88%	101,07%	97,65%	85%	79,89 %
2.	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	82,54%	89,68%	108,65%	110,09%	162%	92,06%	97,41%
	Rata - rata	74,28%	78,80%	105,77 %	105,58%	129,83 %	88,53%	88,65%

Sumber : DPUTARU Kabupaten Rembang

Formulasi pengukuran realisasi indicator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik

$$\frac{\text{Ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Seluruh ruas jalan Kabupaten}} \times 100 \%$$

pengukuran realisasi indicator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik

$$\frac{122}{180} \times 100 \% = 67,91\%$$

Formulasi pengukuran capaian kinerja indicator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

pengukuran capaian kinerja indicator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik

$$\frac{67,91\%}{66,01\%} \times 100 \% = 102,88\%$$

Formulasi pengukuran realisasi indicator Prosentase jembatan dalam kondisi baik

$$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik (Unit)}}{\text{Jumlah jembatan Kabupaten (Unit)}} \times 100 \%$$

pengukuran realisasi indicator Prosentase jembatan dalam kondisi baik

$$\frac{113}{126} \times 100 \% = 89,68\%$$

Formulasi pengukuran capaian kinerja indicator Prosentase jembatan dalam kondisi baik

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

pengukuran capaian kinerja Prosentase jembatan dalam kondisi baik

$$\frac{89,68\%}{82,54\%} \times 100 \% = 108,65\%$$

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, didukung dengan program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	98.888.631.400,00	90.623.354.000,00	91,64
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.292.410.104,00	12.092.758.200,00	98,38
3.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	180.000.000,00	166.201.200,00	92,33
4.	Program pemberdayaan jasa konstruksi	117.595.000,00	111.455.150,00	94,78
	Jumlah	111.478.636.504,00	102.993.768.550,00	92,39

Secara akumulatif prosentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana dari target 66,01% di tahun 2018 ini terealisasi 67,91% atau mencapai 427,22 Km. dari total panjang jalan kabupaten 629,10 Km. sehingga capaian sasaran sebesar 102,88%, Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. dimana dari target 82,54% di tahun 2018 ini terealisasi 89,68% dari total jumlah jembatan kewenangan Kabupaten Rembang sejumlah 113 unit dalam kondisi baik, dari total jumlah 126 unit. sehingga capaian sasaran sebesar 108,65%. jika dihitung maka rata – rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan adalah sebesar 105,77 % sehingga bisa dikatakan termasuk dalam kategori sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 13,38 % Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{rclcl} \text{Capaian kinerja} & - & \text{Realisasi anggaran} & = & \text{Efisiensi anggaran} \\ 105,77 \% & - & 92,39 \% & = & 13,38 \% \end{array}$$

Sasaran 16: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi. Dengan indicator sasaran Persentase akses irigasi dalam kondisi baik. untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator Persentase akses irigasi dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam tabel.

Table III.35
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas
pembangunan irigasi.

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			RPJMD	
		2018	2018	2018	2017	2016	Target akhir 2021	Capaian s/d 2018
1.	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	86,34 %	87,00%	100,76%	96,81%	72,71%	98,12 %	89%

Sumber : DPUTARU Kabupaten Rembang

Formulasi pengukuran realisasi indicator Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.
$\frac{\text{Jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{luas Jaringan irigasi Kabupaten}} \times 100 \%$

pengukuran realisasi indicator Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.
$\frac{18.438}{21.193,45} \times 100 \% = 87,00 \%$

Formulasi pengukuran capaian kinerja indicator Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

pengukuran capaian kinerja Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.
$\frac{87,00\%}{86,34 \%} \times 100 \% = 100,76\%$

Untuk mewujudkan Capaian sasaran Persentase akses irigasi dalam kondisi baik, didukung dengan program sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	10.733.647.000,00	9.175.979.208,00	85,49
2	Pembangunan Sistem Informasi Irigasi	422.325.600,00	335.378.250,00	79,41
	Jumlah	11.155.972.600,00	9.511.357.458,00	85,26

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi sebesar 100,76% maka dikatakan termasuk dalam kategori sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 15,50 % Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Capaian kinerja} & - & \text{Realisasi anggaran} & = & \text{Efisiensi anggaran} \\ 100,76 \% & - & 85,26 \% & = & 15,50 \% \end{array}$$

Sasaran 17: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni tersebut ditempuh melalui indikator Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.36
Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani	8.49	7.05	83.04	111,4	100	11,07	63.69

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi / ditangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}} \times 100 \%$$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani

$$\frac{4.191}{59.453} \times 100 \% = 7,05 \%$$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi / ditangani

$$\frac{7,05}{8,49} \times 100 \% = 83,04 \%$$

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sebagai kebutuhan utama,
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk kesetiakawanan sosial membantu warga dilingkungannya yang masih ada rumah tidak layak huni.
3. Kurangnya peran swasta/perusahaan dalam membantu pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Tabel III.37
Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	3.224.929.640,00	3.010.167.954,00	93,34
2	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	103.900.000,00	82.406.000,00	79,31
	JUMLAH	3.328.829.640,00	3.092.573.954,00	92,90

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran akan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sebagai kebutuhan utama, sehingga warga berupaya untuk merehabilitasi rumahnya secara mandiri.
2. Pemerintah hendaknya mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat kesetiakawanan sosial sehingga dapat membantu warga dilingkungannya dalam upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. mendorong peran swasta/perusahaan melalui program CSR masing-masing untuk dapat disalurkan dalam membantu pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Sasaran 18: Berkurangnya luas kawasan kumuh

Capaian sasaran meningkatnya Berkurangnya luas kawasan kumuh tersebut dilihat melalui indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.38

Capaian kinerja sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Persentase Luas Kawasan Kumuh	2.80	2.12	124,29	102.15	79.17	0	97.08

Saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 4 kecamatan dan 14 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh yaitu meliputi:

- Kecamatan Rembang : Kelurahan Tanjungsari, Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal, dan Desa Padaran;
- Kecamatan Lasem : Desa Dorokandang, Desa Ngemplak, Desa Soditan, dan Desa Babagan;
- Kecamatan Kragan : Desa Kragan, Desa Karangharjo, dan Desa Tegalmulyo;
- Kecamatan Pamotan : Desa Pamotan, Desa Bangunrejo, dan Desa Sidorejo.

Berdasarkan existing kondisi sampai dengan tahun 2017, cakupan luas wilayah kumuh di kawasan kumuh tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/787/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel Data Kawasan Kumuh di Kabupaten Rembang Berdasarkan Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Luas Area Kawasan Kumuh tahun 2018.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (ha)
1	Rembang	Tanjungsari	13.7
2		Pasarbanggi	4.65
3		Padaran	25.06
4		Gegunung wetan	3.24
5		Gegunung kulon	3.41
6		Kabongan Lor	2.59
7		Sukoharjo	3.95
8	Lasem	Dorokandang	1.35

9		Ngemplak	1.99
10		Babagan	10.78
11		Soditan	5.68
12		Gedongmulyo	22.81
13		Sumbergirang	4.92
14	Pamotan	Sidorejo	13.8
15		Pamotan	16.01
16		Bangunrejo	13.56
17	Kragan	Tegalmulyo	31.42
18		Kragan	8.17
19		Karangharjo	9.92
		Total	197.01

• Sumber : DPKP 2018 (data diolah)

Dari luasan permukiman kumuh tersebut dengan mengacu pada luas wilayah permukiman berdasarkan **Perda RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 sebesar 3.214,73 ha untuk permukiman perdesaan dan 6.090.80 ha untuk permukiman perkotaan, dengan total sebesar 9.305,53 ha .**

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh
$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan Pemukiman}} \times 100 \%$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh
$\frac{197.01}{9.305,53} \times 100 \% = 2,12 \%$

Berhubung perhitungan target menurun, sehingga perhitungan capaian dilakukan secara terbalik
Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh
$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh
$\frac{2,8}{2,12} \times 100 \% = 124,29 \%$

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni sebagai berikut:

1. Belum ada rencana aksi keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merencanakan dan melaksanakan program penanganan kawasan kumuh.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat perempuan, dan kaum yang dirugikan, dalam perencanaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Tabel III.39
Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	119.500.000,00	89.343.100,00	74,76
2	Program Perencanaan Tata Ruang	619.796.000,00	546.531.190,00	88,18
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	177.250.000,00	131.405.600,00	74,14
	JUMLAH	916.546.000,00	767.279.890,00	83,71

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh sebagai berikut:

1. Perlu disusun strategi dan rencana aksi keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah karena Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.
3. Pelibatan masyarakat, perempuan, dan kaum yang dirugikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan merupakan kunci penting dalam menjamin keberlanjutan dari hasil peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Sasaran 19: Meningkatnya cakupan akses air minum

Capaian sasaran meningkatnya Meningkatnya cakupan akses air minum tersebut dilihat melalui indikator Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.40
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan akses air minum

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	96.00	92.80	97.68	100.33	89.75	100	97.68

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Mampu Mengakses Air Minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum

$$\frac{193.286}{208.282} \times 100 \% = 92,80 \%$$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum
$\frac{92,80}{96} \times 100 \% = 97,68 \%$

Kondisi Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rembang Tahun 2018, adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	KK Lali-Laki	KK Perempuan	Jumlah
1	SUMBER	10.371	1.505	11.876
2	BULU	8.327	1.272	9.599
3	GUNEM	7.040	1.005	8.045
4	SALE	11.323	2.029	13.352
5	SARANG	17.039	2.932	19.971
6	SEDAN	14.776	2.385	17.161
7	PAMOTAN	13.445	2.297	15.742
8	SULANG	11.167	1.844	13.011
9	KALIORI	11.726	1.650	13.376
10	REMBANG	24.128	4.707	28.835
11	PANCUR	8.613	1.254	9.867
12	KRAGAN	18.286	2.900	21.186
13	SLUKE	8.641	1.407	10.048
14	LASEM	13.440	2.773	16.213
	Jumlah	178.322	29.960	208.282

Sumber Data : DPKP Kab. Rembang 2018

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target sasaran Meningkatnya cakupan akses air minum sebagai berikut:

Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun.

1. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui PDAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi
2. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal
3. Masih ada sistem jaringan distribusi yang belum mengacu kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal

Tabel III.41

Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya cakupan akses air minum

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.055.250.000,00	848.205.900,00	80,38
	JUMLAH	1.055.250.000,00	848.205.900,00	80,38

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan akses air minum sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan
2. Pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan air minum Perdesaan.

Sasaran 20: Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak

Capaian sasaran meningkatnya Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak tersebut dilihat melalui indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.42

Capaian kinerja sasaranMeningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	83.50	80.50	96.41	97,91	79,88	100	80,50

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak

$$\frac{167.667}{208.282} \times 100 \% = 80,50 \%$$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak

$$\frac{80,05}{83,50} \times 100 \% = 96,41 \%$$

Kondisi Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rembang Tahun 2018, adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	KK Lali-Laki	KK Perempuan	Jumlah
1	SUMBER	10.371	1.505	11.876
2	BULU	8.327	1.272	9.599
3	GUNEM	7.040	1.005	8.045
4	SALE	11.323	2.029	13.352
5	SARANG	17.039	2.932	19.971
6	SEDAN	14.776	2.385	17.161
7	PAMOTAN	13.445	2.297	15.742
8	SULANG	11.167	1.844	13.011
9	KALIORI	11.726	1.650	13.376
10	REMBANG	24.128	4.707	28.835
11	PANCUR	8.613	1.254	9.867
12	KRAGAN	18.286	2.900	21.186
13	SLUKE	8.641	1.407	10.048
14	LASEM	13.440	2.773	16.213
	Jumlah	178.322	29.960	208.282

Sumber Data : DPKP Kab. Rembang 2018

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target sasaran cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat belum aktif melakukan intervensi peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga baik melalui dana mandiri ataupun memanfaatkan APBDes. Besarnya pemanfaatan jumlah Dana Desa maupun ADD dari tahun ke tahun harus mampu membawa dampak signifikan dalam upaya mewujudkan pembangunan sampai dilingkungan desa.
2. Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka kontinuitas pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat masih rendah.

Tabel III.43

Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran rumah tangga memiliki sanitasi layak

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7.558.938.000,00	5.419.134.550,00	71,69
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	16.645.395.300,00	16.276.650.325,00	97,78
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong	320.000.000,00	315.816.000,00	98,69
	JUMLAH	24.524.333.300,00	22.011.600.875,00	89,75

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja sasaran cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Desa dan masyarakat untuk secara aktif melakukan intervensi peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga baik melalui dana mandiri ataupun memanfaatkan APBDes. Besarnya pemanfaatan jumlah Dana Desa maupun ADD dari tahun ke tahun harus mampu membawa dampak signifikan dalam upaya mewujudkan pembangunan sampai dilingkungan desa.
2. Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka kontinuitas pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

Sasaran 21: Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Capaian sasaran meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) tersebut dilihat melalui indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.44

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	% Capai - an 2016	RPJMD	
	2018	2018				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2018
Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	16,34	13,33	81,58	89,77	100	20	66,65

Formulasi Pengukuran Realisasi Indikator Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)
$\frac{\text{Luas RTH (Privat + Publik)}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \%$

Pengukuran Realisasi Indikator Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)
$\frac{1.133,670}{8.502,717} \times 100 \% = 13,33 \%$

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)
$\frac{13,33}{16,34} \times 100 \% = 81,58 \%$

Adapun luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Rembang adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Luas Kota (ha)	RTH Publik (ha)	RTH Privat (ha)
1	Rembang	3.183,760	510,163	227,141
2	Lasem	1.226,013	6,970	20,187
3	Pamotan	345,750	4,006	29,700
4	Kragan	544,580	2,250	77,000
5	Sulang	326,250	2,360	33,686
6	Sluke	349,002	2,930	20,450
7	Kaliori	417,370	2,220	26,494
8	Pancur	234,600	1,490	38,670
9	Sumber	296,320	4,460	21,106
10	Bulu	661,853	0,120	10,289
11	Gunem	91,999	2,960	6,745
12	Sedan	240,970	2,360	13,395
13	Sale	166,880	1,470	29,877
14	Sarang	417,370	2,220	32,951
		8.502,717	545,979	587,691

Sumber : DPKP dan DLH 2018 (data diolah)

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target sasaran Meningkatnya Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran untuk pengelolaan, penyediaan, dan penataan ruang terbuka hijau belum disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
2. Kebijakan ruang terbuka hijau kurang terkoordinasikan dengan baik di lingkup OPD pengampu di Kabupaten Rembang termasuk untuk menyediakan bibit.
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH, masih kurang sehingga masyarakat kurang menyadari pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tabel Program dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.316.279.000,00	1.001.663.014,00	76,10
	JUMLAH	1.316.279.000,00	1.001.663.014,00	76,10

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai berikut:

1. Melakukan sharingpenetapan anggaran untukpengelolaan, penyediaan, dan penataan ruang terbuka hijauantaraDPRD dan implementor, agar anggaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana utama kebijakan ruang terbuka hijau berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian di Kabupaten Rembang untukmenyediaan bibit sebagai dukungan terhadap LSM dan masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program penghijauan.
3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan menyadari pentingnya Ruang TerbukaHijau (RTH).

Sasaran 22 : Meningkatnya ketersediaan air baku

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan air baku dengan indicator sasaran Persentase cakupan Air baku, melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, yang diarahkan untuk peningkatan ketersediaan air baku untuk keperluan air baku untuk irigasi pertanian dan untuk fungsi lainnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan air baku untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Table III.45

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan air baku

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			RPJMD	
		2018	2018	2018	2017	2016	Target akhir 2021	Capaian s/d 2018
1.	Persentase cakupan Air baku .	76%	64,32 %	84,63%	90,30%	100	88%	85%

Sumber : DPUTARU Kabupaten Rembang

Formulasi pengukuran realisasi indicator Persentase cakupan Air baku .
$\frac{\text{ketersediaan air baku}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100 \%$

pengukuran realisasi indicator Persentase cakupan Air baku .
$\frac{40.689.415 \text{ m}^3}{632.563 \text{ jiwa.}} \times 100 \% = 64,32 \%$

Formulasi pengukuran capaian kinerja indicator Persentase cakupan Air baku .
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

pengukuran capaian kinerja Persentase cakupan Air baku .
$\frac{64,32 \%}{76 \%} \times 100 \% = 84,63\%$

Upaya untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya ketersediaan air baku didukung dengan program sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	386.904.000,00	28.904.000,00	7,47
	JUMLAH	386.904.000,00	28.904.000,00	7,47

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan air baku pada tahun 2018 tidak tercapai hal ini disebabkan karena adanya hambatan – hambatan antara lain :

1. Belum ditetapkannya usulan Perbub nomenklatur Seksi Penyediaan Air Minum menjadi Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
2. Tidak adanya kegiatan pembuatan Embung dan Bendung baru, karena terkendala aturan dan rumitnya masalah pembebasan lahan.

Solusi dari permasalahan diatas antara lain :

1. Segera direalisasikan usulan nomenklatur.
2. Adanya study pembangunan embung dan bendung baru.
3. Mengoptimalkan bangunan embung dan bendung yang sudah ada

Sasaran 23: Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai

Untuk mewujudkan Meningkatnya jumlah pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai, di tahun 2018 target sasaran sebesar 3 (tiga) kawasan. sedangkan Pada tahun 2017 terealisasi sejumlah 2 kawasan yaitu kawasan wisata karangjahe Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang dan kawasan industry di Desa Tegaldowo kecamatan Gunem, Sedangkan untuk tahun 2018 bertambah 1 (satu) kawasan yaitu kawasan Obyek Wisata

Pantai Balongmulyo, Kec. Kragan, sehingga capaian menjadi 3 (tiga) kawasan. Maka capaian sasaran menjadi sebesar 100%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator Meningkatnya jumlah pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai. sebagaimana tertuang dalam

Table III. 46

Pengukuran Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			RPJMD	
	2018	2018	2018	2017	2016	Target akhir 2021	Capaian s/d 2018
Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai.	3 kawasan	3 kawasan	100%	100%	100%	6 kawasan	0,5 %

NO	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	49.921.400,00	49.921.400,00	100,00
2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa	67.000.000,00	66.956.594,00	99,94
	JUMLAH	116.921.400,00	116.877.994,00	99,96

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai, sebesar 100 % maka dikatakan termasuk dalam kategori berhasil dan telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,04 % Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{rclcl} \text{Capaian kinerja} & - & \text{Realisasi anggaran} & = & \text{Efisiensi anggaran} \\ 100 \% & - & 99,96 \% & = & 0,04 \% \end{array}$$

Sasaran 24. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu sasaran dari arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan maka diharapkan masyarakat yang menjadi sasaran dari upaya pembangunan kesehatan akan mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain tingkat kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

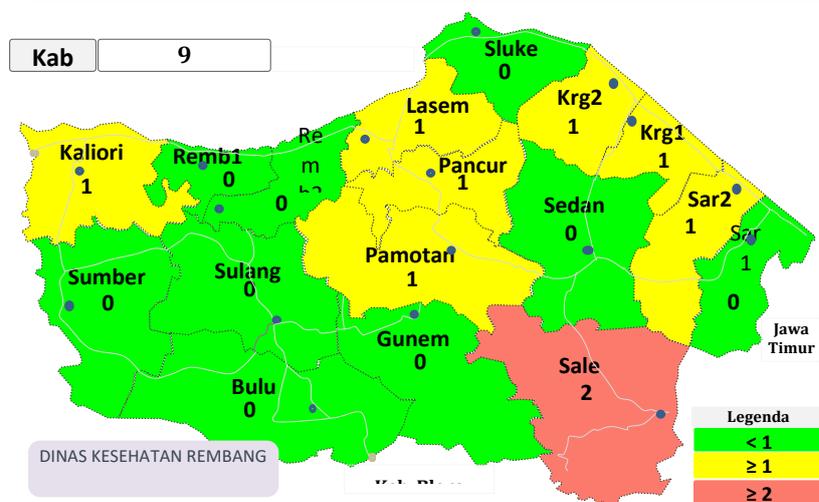
Tabel III.47
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	2018			% Cap 2017	% Cap 2016	RPJMD	
	Target	Realisasi	% Capaian 2018			Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Angka Kematian Ibu (AKI)	12	9	125,0	0,0	50,0	5 ks	20 %
Angka Kematian Bayi (AKB)	155	149	103,87	92,0	107,74	105 ks	58,1 %
Angka Kematian Balita (AKABA)	150	170	86,67	91,03	83,23	105 ks	38,1 %
Rata-rata			105,18	61,01	80,32		38,73

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pencapaian indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Rata-rata pencapaian tahun 2018 meningkat menjadi 105,18 % dari sebelumnya 61,0 % di tahun 2017. Sehingga capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sangat berhasil.

Peta 1

Jumlah Kematian Ibu di Kab. Rembang Tahun 2018



Sebaran kasus kematian ibu ada di beberapa wilayah puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di puskesmas Sale sebanyak 2 kasus. Sedangkan kasus lain sebanyak 1 kasus di puskesmas Kaliori, Lasem, Pacur, Pamotan, Kragan 1 dan Kragan 2, serta Sarang 1. Sedangkan di puskesmas lain sebanyak 7 puskesmas tidak ditemukan kasus.

Dari segi umur banyak kasus kematian ibu terjadi di usia 30 – 34 tahun sebanyak 5 kasus. Sedangkan kematian di bawah 20 tahun dan di atas 44 tahun ditemukan masing-masing 1 kasus.

Tabel 2
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Penyebab Kematian	Jumlah Kasus
1	Ekslamsia	4
2	Perdarahan	2
3	Infeksi	1
4	Lain - lain	2
	Jumlah	9

Penyebab kematian ibu paling banyak adalah eklamsia sebagai serangan kejang yang dialami semasa kehamilan atau setelah melahirkan. Kejang eklamsia tidak disebabkan oleh kondisi otak seperti kejang atau epilepsi pada umumnya, melainkan timbul sebagai kelanjutan yang lebih parah dari preeklamsia (tekanan darah yang terlalu tinggi saat hamil). Kondisi ini bisa berakibat kematian pada ibu. Kasus ini ditemukan sebanyak 4 kasus. Sedangkan kasus lain adalah perdarahan, infeksi dan sebab lainnya.

Tabel 3
Umur Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Rentang Usia	Jml Kasus
1	20 – 24 th	1
2	25 – 29 th	2
3	30 – 34 th	5
4	35 – 39 th	0
5	40 – 44 th	1
	Jumlah	9

Perkembangan kematian ibu dan kematian bayi termasuk salah satu indikator dengan pencapaian yang dinamis sebab suatu bisa jadi saat ini berkurang namun bertambah di saat yang lain.

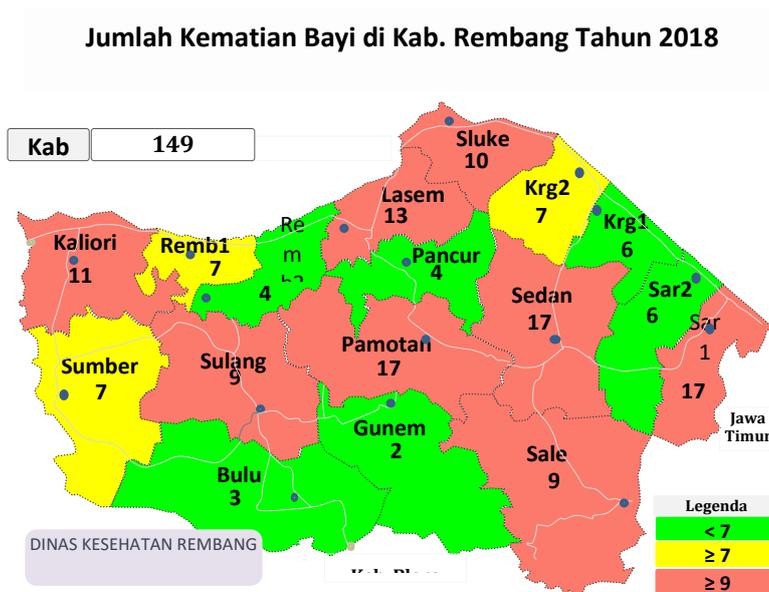
Grafik 1



Hasil capaian indikator kematian ibu telah mengalami kemajuan dalam tiga tahun terakhir. Kasus terbanyak terjadi di tahun 2015 sebesar 15 kasus dan jauh berkurang menjadi hanya 9 kasus di tahun 2018. Hal ini kiranya juga berhubungan dengan upaya – upaya pencegahan dan pengendalian kematian ibu di kabupaten Rembang.

Pada kematian bayi kasus yang dicatat di tahun 2018 adalah semua kasus kematian dari bayi usia 0 – 12 bln sejumlah 149 kasus. Sedangkan kematian balita adalah kematian anak usia 0 – 59 bln sejumlah 170 kasus. Jumlah kematian bayi tahun 2018 agak meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 143 kasus di tahun 2017. Adapun jumlah kematian bayi per puskesmas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Peta 2



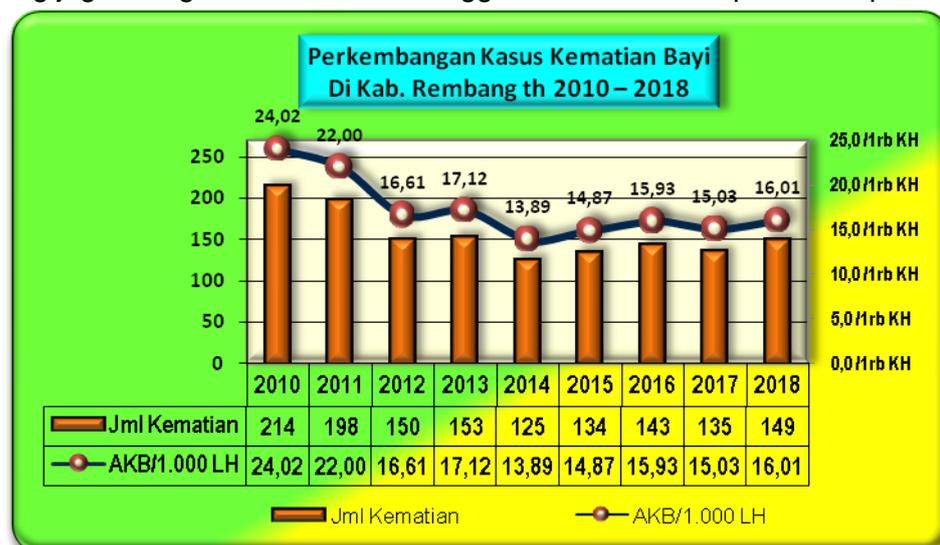
Jumlah kematian bayi terbesar ada di puskesmas Sarang 1, Sedan dan Pamotan masing-masing sebanyak 17 kasus dan terendah di puskesmas Bulu 3 kasus serta Gunem sebanyak 2 kasus.

Penyebab kematian bayi dan balita adalah sebagai berikut

Tabel 2
Penyebab Kematian Bayi

No.	Penyebab Kematian	Jumlah Kasus	
		Kematian bayi	Kematian Balita
1	BBLR	48	48
2	Asfiksia	27	27
3	Kelainan Kongenital	25	25
4	Sepsis	14	14
5	Men/ Enc	9	9
6	Aspirasi	5	5
7	Diare	5	10
8	Pneumonia	5	5
9	Ikterus	2	2
10	Lain-lain	9	27
	Jumlah	149	172

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi dan balita paling banyak adalah BBLR disusul asfiksia dan kelainan kongenital. Perkembangan kematian bayi di kabupaten Rembang juga mengalami fluktuasi sehingga berubah – ubah pada setiap tahun.



Apabila dibandingkan dengan RPJMD dimana target AKI diharapkan sebesar 5 kasus dan AKB sebesar 105 kasus maka jumlah kematian ibu, bayi dan balita pada tahun 2018 jauh diluar target yang diharapkan sehingga capaiannya baru sebesar rata-rata 38,73 %.

Kematian ibu merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan. Adanya kejadian satu saja kematian ibu baik pada masa kehamilan, masa persalinan maupun nifas merupakan satu

hal yang disayangkan dimana ibu adalah pengasuh dan pencetak calon-calon generasi penerus bangsa. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas dengan layanan persalinan 24 jam di semua kecamatan dan puskesmas.
2. Peningkatan deteksi dini ibu hamil beresiko tinggi melalui pemeriksaan secara berkala kepada ibu hamil terutama dilakukan oleh bidan desa.
3. Penguatan posyandu di semua wilayah desa
4. Penerapan persalinan hanya dilakukan di fasilitas pelayanan persalinan yang memiliki kompetensi untuk menjamin kualitas pelayanan persalinan.
5. Promosi peningkatan kesehatan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta koordinasi dengan dokter rumah sakit.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ada beberapa program yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel III.48
Anggaran dan Realisasi Program Bidang Kesehatan Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% serapan
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.978.855.000	4.852.679.198,00	97,47
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.743.841.000	14.900.200.001,00	94,64
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	153.055.000	128.757.605,00	84,13
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	555.000.000	526.286.000,00	94,83
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	158.825.000	151.445.600,00	95,35
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	75.750.000	65.170.000,00	86,03
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.255.563.000	1.191.491.788,00	94,90
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	852.505.000	751.916.783,00	88,20
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	15.760.000.000	14.613.561.109,00	92,73
10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	83.825.000	78.310.000,00	93,42
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	49.700.000	49.660.000,00	99,92
12	Program Peningkatan Pelayanan	35.000.000	19.300.000,00	55,14

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% serapan
	Kesehatan Lansia			
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.299.668.000	625.847.179,00	27,21
14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	157.260.000	156.915.000,00	99,78
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan PPK-BLUD Puskesmas	46.116.290.133	42.248.085.528,00	91,61
		88.275.137.133	80.359.625.791	91,03

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat lima belas program yang mendukung sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap sasaran dengan indikator penurunan angka kematian ibu, kematian anak ataupun kematian balita. Jumlah anggaran sebesar Rp 88.275.137.133,-. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 80.359.625.791,- dengan persentase serapan anggaran mencapai 91,03 %.

Beberapa kegiatan khususnya yang berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita serta Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak berupa :

- a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
- c. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu
- d. Pendampingan Rujukan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Termasuk di dalamnya sub kegiatan yang dilakukan dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan balita antara lain: pemantauan kesehatan berkala ibu hamil dan bayi, pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui, kelas anak balita dan juga kegiatan posyandu di beberapa tempat di desa.

Tingkat efektifitas program pada sasaran ini nampak dari optimalnya capaian kinerja yang telah mencapai 105,18 % dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi anggaran terlihat dari telah tercapainya sasaran dengan penggunaan anggaran yang hanya sebesar 91,03 %.

No	Uraian	Formula	Capaian
1	Tingkat efektifitas anggaran	% rata-rata capaian indikator kinerja / % penyerapan anggaran	105 % / 91,03 % = 1,15 %
2	Tingkat efisiensi anggaran	% rata-rata capaian indikator kinerja -- % realisasi anggaran	105 % - 91,03% = 13,97 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mencapai 13,97 % dimana capaian kinerja sebesar 105 % dapat terlaksana dengan anggaran sebesar 91,03 % .

Namun demikian terkait belum tercapainya indikator angka kematian ibu, kematian bayi dan balita yang tentu saja selain faktor kehendak Allah yang Maha Kuasa, maka ada beberapa permasalahan dan kendala dalam upaya mencapai sasaran sebagai berikut:

- Status kesehatan perempuan cukup kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya status gizi, keberadaan penyakit menular maupun tidak menular, budaya yang dapat mempengaruhi pola hidup sehat masyarakat.
- Status kesehatan reproduksi ibu dapat dipengaruhi oleh status kesehatan suami yang menderita penyakit menular seperti merokok, HIV/ AIDS, infeksi menular seksual, TBC dan semisal.
- Pernikahan di usia dini dan remaja cukup banyak.
- Masih banyak PUS (pasangan usia subur) yang belum memahami pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat.
- Belum semua ibu hamil memiliki JKN/ jaminan kesehatan lain termasuk janinnya.
- Pola asuh dan asih anak di rumah masih sangat kurang dilakukan oleh ibu dan keluarga.
- Cakupan ASI eksklusif 6 bulan dan pola makanan sehat dan seimbang bagi bayi dan balita masih rendah.

Adapun strategi peningkatan kinerja antara lain :

- Peningkatan status kesehatan perempuan ketika hamil melalui deteksi dini kesehatan pada masa sebelum hamil bagi remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.
- Peningkatan gerakan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
- Optimalisasi Tim Gerakan Sayang Ibu
- Pembentukan dan penguatan posyandu di semua desa

Mendorong peremajaan dan peningkatan sarana serta prasarana pelayanan kesehatan ibu khususnya di pelayanan kesehatan rujukan RSUD pada ruang peristi

Sasaran 25 : Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

Capaian sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut ini.

Tabel III.49

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah

No.	INDIKATOR	TAHUN 2018		CAPAIAN TARGET 2018 (%)	CAPAIAN TARGET 2016 (%)	CAPAIAN TARGET 2017 (%)	RPJMD	
		TARGET	REALISASI				TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN 2018 TERHADAP TARGET 2021 (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.5	6.94 ^{*)}	92.53	94.79	93.65	7.8	88.97
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12	12.04 ^{*)}	100.33	103.62	101.95	12.6	95.56
	RATA – RATA			96.43	99.21	97.80		92.26

Keterangan: *) Data rilis BPS terakhir tahun 2017

Pada tahun 2018, rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah adalah 96.43%. Pencapaian indikator sasaran ini belum mencapai angka 100% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dilihat pada masing-masing indikator pada sasaran ini, yaitu indikator rata-rata lama sekolah dan indikator angka harapan lama sekolah, indikator pertama belum mencapai target yang ditetapkan (92.53%) sedangkan indikator kedua telah mencapai target yang ditetapkan (100.33%).

Jika dilihat kecenderungan pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, pencapaian kinerja sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah selalu menurun, berturut-turut pencapaiannya adalah 99.21%, 97,80%, dan 96.43%. Walaupun realisasi kinerja indikator sasaran ini selalu meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu indikator rata-rata lama sekolah berturut-turut mencapai 6.92, 6.93, dan 6.94, serta indikator angka harapan lama sekolah berturut-turut mencapai 12.02, 12.03, dan 12.04. Tetapi peningkatan realisasi kinerja tersebut belum sebanding dengan kenaikan target yang telah ditetapkan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya jika dibandingkan antara pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 (tahun kedua) dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 92.26%. Dan jika target jangka menengah dibandingkan menurut masing-masing indikator pada sasaran ini, berturut-turut

pencapaiannya adalah 88.97% dan 95.56% atau dengan kata lain masih terdapat kesenjangan untuk dikejar selama 3 (tiga) tahun ke depan sebesar 11.03% dan 4.44% untuk mencapai target jangka menengah.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebesar 6.94. Angka ini masih dibawah rata-rata lama sekolah provinsi dan nasional yang berturut-turut mencapai angka 7.27 dan 8.10. Dan jika dibandingkan dengan kondisi di kabupaten tetangga sekitar Kabupaten Rembang, rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang lebih baik dari Kabupaten Grobogan dan Blora yang mempunyai rata-rata lama sekolah berturut-turut sebesar 6.66 dan 6.45. Akan tetapi rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pati, Jepara, Demak, dan Kudus yang berurut-turut mencapai angka sebesar 7.08, 7.33, 7.47, dan 8.31.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebesar 12.04. Pencapaian ini juga masih di bawah angka harapan lama sekolah provinsi maupun nasional yang berturut-turut mencapai 12.57 tahun dan 12.85 tahun. Dan apabila dibandingkan dengan pencapaian angka harapan lama sekolah dengan kabupaten sekitar, posisi Kabupaten Rembang berada di posisi terendah, dimana angka harapan lama sekolah Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, Demak, Jepara, dan Kudus yang berturut-turut mencapai angka sebesar 12.13, 12.27, 12.29, 12.54, 12.70, dan 13.20.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk mencapai target pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah antara lain adalah berkaitan dengan pembagian urusan kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal ini berpengaruh terhadap intervensi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, baik dari ragam program dan kegiatan maupun besaran anggaran yang dialokasikan.

Untuk mencapai target kinerja pada sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut ini.

Tabel III.50

**Anggaran dan Realisasi Program Bidang Pendidikan Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pembinaan Sekolah Dasar	503,000,000.00	500,850,000.00	95.33
2.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,786,000,000.00	1,451,673,700.00	81.28
	JUMLAH	2,289,000,000.00	1,952,523,700.00	85.30

Untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Kabupaten Rembang yang telah mencapai angka 6.94 dan 12.04 pada Tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah berkomitmen untuk tetap berkontribusi pada pembangunan bidang pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah adalah dengan pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa prestasi pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Rembang menjalankan kegiatan beasiswa prestasi pendidikan tinggi dan dukungan operasional terhadap penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Rembang.

Sasaran 26 :Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif

Capaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif dapat dilihat dari indikator sebagai berikut ini.

Tabel III.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayan Pendidikan Dasar dan Pendidikan PAUD dan Nonformal Termasuk Pendidikan Inklusif

No.	INDIKATOR	TAHUN 2018		CAPAIAN TARGET 2018 (%)	CAPAIAN TARGET 2016 (%)	CAPAIAN TARGET 2017 (%)	RPJMD	
		TARGET	REALISASI				TARGET AKHIR RPJMD 2021	REALISASI 2018 TERHADAP TARGET 2021 (%)
1.	APK PAUD umur 3 – 6 tahun	84	87.76	104.48	119.67	108.48	96	91.42
2.	Angka Partisipasi Sekolah umur 7 – 12 tahun	99.78	95.38	97.25	97.80	97.53	99.87	95.50
3.	Angka Partisipasi Sekolah umur 13 – 15 tahun	100	92.08	92.08	96.09	81.46	100	92.08
	RATA – RATA			97.38	104.52	95.82		93

Pada tahun 2018, rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif adalah 97.38%. Pencapaian indikator sasaran ini belum mencapai angka 100% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dilihat pada masing-masing indikator pada sasaran ini, yaitu indikator APK PAUD umur 3 – 6 tahun, APS umur 7 – 12 tahun, dan APS umur 13 – 15 tahun, indikator pertama sudah mencapai target yang ditetapkan (104.48%), indikator kedua dan ketiga belum mencapai target yang ditetapkan (97.25% dan 92.08%).

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif berfluktuasi, yaitu berturut-turut mencapai angka 104.52%, 95.82%, dan 97.38%. Akan tetapi jika diperhatikan menurut indikator penyusunnya hanya 1 (satu) indikator yang pencapaian kerjanya berfluktuasi yaitu indikator angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun dengan tingkat pencapaian berturut-turut 96.09%, 81.46%, dan 92.08%. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya mempunyai kecenderungan tingkat pencapaian kinerja menurun.

Selanjutnya jika dibandingkan antara pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 (tahun kedua) dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif baru mencapai 93.00%. Dan jika target jangka menengah dibandingkan menurut masing-masing indikator pada sasaran ini, berturut-

turut pencapaiannya adalah 91.42%, 95.50%, dan 92.08% atau dengan kata lain masih terdapat kesenjangan untuk dikejar selama 3 (tiga) tahun ke depan sebesar 8.58%, 4.50%, dan 7.92% untuk mencapai target jangka menengah.

APK PAUD umur 3 – 6 tahun di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 adalah sebesar 87.76. Angka ini berada di atas APK PAUD umur 3 – 6 tahun tingkat provinsi maupun nasional yang berturut-turut mencapai angka 78.55 dan 74.28. Sedangkan APS umur 7 – 12 tahun, dan APS umur 13 – 15 tahun di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 berturut-turut adalah sebesar 97.25 dan 92.08. Angka ini masih di bawah capaian pada tingkat provinsi maupun nasional yang berturut-turut mencapai angka 99.62 dan 95.48 untuk tingkat provinsi dan 99.14 dan 95.08 untuk tingkat nasional.

Beberapa program yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif adalah sebagai berikut ini.

Tabel III. 52

**Anggaran dan Realisasi Program Bidang Pendidikan Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan
Pendidikan Dasar dan Pendidikan PAUD dan Nonformal Termasuk Pendidikan Inklusif**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,330,162,000.00	1,561,328,744.00	46.88
2.	Program Pembinaan Sekolah Dasar	55,233,609,274.00	50,975,883,764.00	92.29
3.	Program Pendidikan Nonformal	1,024,000,000.00	1,015,404,800.00	99.16
	JUMLAH	59,587,771,274.00	53,552,617,308.00	89.87

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, khususnya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan nonformal termasuk pendidikan inklusif, terdapat beberapa permasalahan utama yang harus dihadapi.

Pertama, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur pemenuhan akses layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Capaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Rembang tahun 2018 untuk jenjang pendidikan dasar adalah sebesar 84.01 atau dengan predikat B (menuju SNP). Dan capaian nilai standar yang paling rendah adalah nilai standar sarana dan prasarana yaitu baru mencapai angka 78.54.

Dalam menuntaskan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, selain dengan menggunakan sumber dana DAU, Pemerintah Kabupaten Rembang juga mengandalkan kegiatan yang dibiayai dengan dana DAK dan Bantuan Pemerintah Bidang Pendidikan. Mengingat keterbatasan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang, proses perencanaan yang baik dengan memperhatikan skala prioritas dan strategi pentahapan yang jelas sangat diperlukan. Skala prioritas dapat digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah calon penerima bantuan sarana prasarana memang benar-benar sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan yang tinggi. Sedangkan strategi pentahapan digunakan untuk menentukan target jangka waktu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Selain itu sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari beberapa sumber dana juga perlu dilaksanakan dengan baik. Pemetaan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan rencana pemenuhannya selain memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan, biaya yang diperlukan, juga mempertimbangkan sumber dana pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Kedua, angka putus sekolah yang cenderung naik, baik yang disebabkan oleh adanya permasalahan keluarga maupun budaya pernikahan usia sekolah. Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan angka putus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP. Pada Tahun 2018 angka putus sekolah SD dan SMP berturut-turut adalah sebesar 0.02 dan 0.52. Angka tersebut cenderung naik dibandingkan dengan angka putus sekolah SD dan SMP pada tahun sebelumnya yaitu berturut-turut sebesar 0.02 dan 0.21. Beberapa penyebab terjadinya putus sekolah di Kabupaten Rembang, lebih banyak didominasi oleh permasalahan keluarga siswa. Permasalahan ini bisa disebabkan antara lain motif ekonomi, dimana siswa lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Selain itu juga disebabkan oleh kenakalan remaja, dimana siswa mengalami salah pergaulan sehingga memilih tidak bersekolah dan bergabung dengan kelompoknya yang tidak bersekolah. Penyebab lainnya adalah perpecahan keluarga inti, dimana siswa yang orang tuanya berpisah pada beberapa kasus pendidikannya menjadi terbelengkalai. Dan masih ada juga beberapa kasus putus sekolah yang disebabkan oleh pernikahan usia sekolah. Pada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Rembang, masih lazim terjadi di masyarakat untuk menikahkan anak pada usia sekolah.

Untuk menuntaskan angka putus sekolah di Kabupaten Rembang, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Dari beberapa kasus putus sekolah yang ditangani oleh satuan pendidikan melalui Guru Bimbingan dan Konseling, apabila siswa dan/atau keluarga sudah memutuskan untuk tidak bersekolah kembali maka langkah dari satuan pendidikan dalam mengajak kembali siswa yang bersangkutan untuk kembali bersekolah menjadi buntu dan akhirnya terjadi putus sekolah. Selain itu juga terdapat beberapa satuan pendidikan tidak

mempunyai basis data yang valid berkaitan dengan nama, alamat, dan penyebab putus sekolah dari siswa-siswa yang berasal dari satuan pendidikan tersebut.

Selain dengan meningkatkan kembali pelaksanaan pendampingan dari Guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan layanan kepada siswa dalam menyelesaikan pendidikannya, diperlukan peran serta aktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang jika terdapat anak usia sekolah yang belum mengakses layanan pendidikan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, akan lebih mudah jika tersedia aplikasi yang bisa diakses melalui *smartphone* untuk melaporkan permasalahan putus sekolah yang terjadi di sekitar masyarakat. Laporan yang valid *by name, by address, by age, dan by problem* dari masyarakat tentu dapat digunakan sebagai basis data bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk memberikan solusi terhadap anak putus sekolah tersebut. Solusi tersebut bisa dengan mengembalikan anak tersebut untuk mengakses kembali pendidikan formal atau dengan mengarahkan mereka untuk mengakses jalur pendidikan nonformal yang lebih fleksibel proses pembelajarannya menyesuaikan kegiatan peserta didik.

Sasaran 27 :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan

Capaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut ini.

Tabel III.53

Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan

No.	INDIKATOR	TAHUN 2018		CAPAIAN TARGET 2018 (%)	CAPAIAN TARGET 2016 (%)	CAPAIAN TARGET 2017 (%)	RPJMD	
		TARGET	REALISASI				TARGET AKHIR RPJMD 2021	REALISASI 2018 TERHADAP TARGET 2021 (%)
1.	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan dengan baik	61.87	100	161.63	34.14	99.36	90	111.11
	RATA – RATA			161.63	34.14	99.36		111.11

Pada Tahun 2018, rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan

adalah 161.63%. Pencapaian indikator sasaran ini telah mencapai angka 100% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat kecenderungan pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, pencapaian kinerja sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah selalu meningkat, berturut-turut pencapaiannya adalah 34.14%, 99.36%, dan 161.63%. Realisasi kinerja indikator sasaran ini selalu meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu berturut-turut mencapai 13.35, 46.37, dan 100.

Selanjutnya jika dibandingkan antara pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 (tahun kedua) dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan sudah mencapai 111.11%. Atau dengan kata lain sudah tidak terdapat lagi kesenjangan untuk dikejar selama 3 (tiga) tahun ke depan untuk mencapai target jangka menengah karena target jangka menengah sudah tercapai pada tahun kedua (tahun 2018).

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan pada tahun 2018, diukur dengan persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan dengan baik. Ukuran penerapan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan menggunakan implementasi kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan ke dalam pembelajaran baik secara materi (isi) pembelajaran maupun proses pembelajarannya. Dan rencana implementasi kurikulum 2013 di Kabupaten Rembang sejalan dengan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui peta jalan implementasi Kurikulum 2013 untuk periode tahun 2015-2020. Sesuai dengan peta jalan tersebut pada tahun 2018 seluruh satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum 2013 pada tahap pertama. Dan pada Juli 2020 seluruh satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh.

Selanjutnya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan antara lain berkaitan dengan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur penjaminan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama pada standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan telah dilaksanakan program untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan kurikulum 2013. Program-program tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini.

Tabel III.54

**Anggaran dan Realisasi Program Bidang Pendidikan Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Karakter dan Berwawasan Kebangsaan**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pembinaan Sekolah Dasar	1,093,302,000.00	936,611,418.00	85.67
2.	Program Pembinaan Ketenagaan	370,000,000.00	367,377,500.00	99.29
	JUMLAH	1,463,302,000.00	1,303,988,918.00	89.11

Dari program-program yang telah direncanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 161.63%, tingkat efektivitas anggarannya mencapai angka sebesar 89.11% dan tingkat efisiensi anggaran mencapai angka 72.52% atau setara dengan Rp1,061,146,105.00. Perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.55

**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Program Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Karakter dan Berwawasan Kebangsaan**

No.	Uraian	Formula	Capaian
1.	Tingkat efektivitas anggaran	Realisasi anggaran belanja/target anggaran x 100 %	89.11%
2.	Tingkat efisiensi anggaran	% rata-rata capaian indikator kinerja -- % realisasi anggaran	72.52%

Implementasi kurikulum 2013 memang masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Keberhasilan proses pelaksanaan kurikulum 2013 sangat dipengaruhi kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru pengampu. Sedangkan kondisi saat ini kompetensi guru di Kabupaten Rembang khususnya untuk melaksanakan kurikulum 2013 masih perlu perhatian khusus. Guru menjadi komponen paling penting dalam ekosistem pendidikan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, kompetensi guru untuk menjalankan kurikulum diperlukan sebagai kemampuan dasar untuk menyelenggarakan

pembelajaran secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan klasik yang selalu dihadapi berkaitan dengan adanya perubahan penerapan kurikulum adalah berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Strategi pentahapan implementasi kurikulum yang jelas, baik dari segi waktu pelaksanaan, satuan pendidikan sasaran, tingkatan kelas sasaran, guru dan kepala sekolah sasaran, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dari perhitungan perencanaan kegiatan tersebut selanjutnya bisa dengan tepat diperhitungkan kebutuhan pembiayaannya.

Sasaran 28 :Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga

Capaian sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga dapat dilihat dari indikator sebagai berikut ini.

Tabel III.56
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga

No.	INDIKATOR	TAHUN 2018		CAPAIAN TARGET 2018 (%)	CAPAIAN TARGET 2016 (%)	CAPAIAN TARGET 2017 (%)	RPJMD	
		TARGET	REALISASI				TARGET AKHIR RPJMD 2021	REALISASI 2018 TERHADAP TARGET 2021 (%)
1.	Jumlah medali yang diperoleh dalam berbagai even olahraga tingkat provinsi dan nasional (buah)	35	46	131.43	66.67	103.33	50	92
2.	Jumlah prestasi kepemudaan yang diperoleh pada kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional (buah)	4	3	75	133.33	125	6	50
	RATA – RATA			103.21	100	114.17		71

Pada tahun 2018, rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga adalah 103.21%. Pencapaian indikator sasaran ini telah mencapai angka 100% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dan jika dilihat pada masing-masing indikator pada sasaran ini, yaitu indikator jumlah medali yang diperoleh dalam berbagai even olahraga tingkat provinsi dan nasional serta indikator jumlah prestasi kepemudaan yang diperoleh pada kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan

nasional, indikator pertama telah mencapai target yang ditetapkan (131.43%) sedangkan indikator kedua belum mencapai target yang ditetapkan (75%).

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun pencapaian kinerja sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga berfluktuasi, dengan tingkat capaian berturut-turut sebesar 100%, 114.17%, dan 103.21%, tetapi pencapaian selama 3 (tiga) tahun tersebut semuanya telah mencapai target yang ditetapkan. Dan meskipun secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran ini telah mencapai target, tetapi jika dilihat pada masing-masing indikator penyusunnya, terdapat kecenderungan selama 3 (tiga) tahun terakhir, indikator kinerja yang berkaitan dengan prestasi olahraga selalu meningkat yaitu mencapai 66.67%, 103.33%, dan 131.43%, sedangkan indikator yang berkaitan dengan prestasi pemuda selalu menurun yaitu berturut-turut mencapai 133.33%, 125%, dan 75%.

Selanjutnya jika dibandingkan antara pencapaian kinerja sasaran tahun 2018 (tahun kedua) dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga baru mencapai 71%. Dan jika target jangka menengah dibandingkan menurut masing-masing indikator pada sasaran ini, berturut-turut pencapaiannya adalah 92% dan 50% atau dengan kata lain masih terdapat kesenjangan untuk dikejar selama 3 (tiga) tahun ke depan sebesar 8% dan 50% untuk mencapai target jangka menengah.

Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga antara lain adalah sebagai berikut ini.

Tabel III.57
Anggaran dan Realisasi Program Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	749,700,000.00	741,349,650.00	98.89
2.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	10,000,000.00	8,550,000.00	85.50
3.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	897,000,000.00	880,093,250.00	98.12
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	180,000,000.00	173,066,000.00	96.15
	JUMLAH	1,836,700,000.00	1,803,058,900.00	98.17

Dari program-program yang telah direncanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga, dengan capaian kinerja sasaran

tersebut mencapai 103.21%, tingkat efektivitas anggarannya mencapai angka sebesar 98.17% dan tingkat efisiensi anggaran mencapai angka 5.04% atau setara dengan Rp92,599,170.00. Perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.58
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Program Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga

No.	Uraian	Formula	Capaian
1.	Tingkat efektivitas anggaran	Realisasi anggaran belanja/target anggaran x 100 %	98.17%
2.	Tingkat efisiensi anggaran	% rata-rata capaian indikator kinerja -- % realisasi anggaran	5.04%

Cabang-cabang olahraga prestasi yang berhasil mendapatkan juara pada kompetisi di tingkat provinsi antara lain adalah senam artistik, taekwondo, pencak silat, dan atletik. Prestasi yang diperoleh dari para atlet tersebut tentu bukan berasal dari kebetulan dan keberuntungan. Prestasi tersebut diperoleh dari hasil kerja keras latihan yang didukung dengan program pelatihan yang tepat dan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Dari hasil perolehan kejuaraan tersebut dapat mulai dipetakan potensi atlet olahraga di Kabupaten Rembang. Pembinaan prestasi olahraga akan lebih terarah jika lebih memperhatikan cabang-cabang olahraga yang berpotensi untuk berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu target pemenuhan sarana dan prasarana olahraga juga difokuskan pada cabang-cabang olahraga yang mempunyai potensi besar untuk berprestasi.

Selanjutnya pada bidang kepemudaan, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah prestasi kepemudaan yang diperoleh pada kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional. Pada Tahun 2018, terdapat 3 prestasi kepemudaan yang dapat diraih oleh para pemuda dari Kabupaten Rembang di tingkat provinsi. Prestasi tingkat provinsi yang diraih tersebut adalah TUB BB, Paskibraka, dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan pada bidang kepemudaan.

Sasaran 29. Menurunnya Kasus Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.59
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kasus Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Sasaran	2018			% Cap 2017	% Cap 2016	RPJMD	
	Target	Realisasi	% Capaian 2018			Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Rasio Linmas per 10.000 penduduk	97,93	88,33	90,20	89,71	89,17	98,10	91,11
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	129	129	100	100	100	100	100
Rata-rata			95,1	94,86	94,59		95,56

Mengacu pada hasil pengukuran di atas bahwa saat ini anggota Linmas di Kabupaten Rembang sejumlah 5.595 dari jumlah penduduk 633.429. Adapaun formula penghitungan untuk capaian rasio linmas per 10.000 penduduk yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Linmas per 10.000 penduduk} &= \frac{\text{Jumlah Linmas} \times 10.000}{\text{Jumlah penduduk}} \\ &= \frac{5.595 \times 10.000}{633.429} = 88,33 \end{aligned}$$

Indikator kinerja cakupan Penegakan Perda dan Perkada dapat diperoleh data tentang pelanggaran terhadap Perda dan Perkada sejumlah 129 kasus, sedangkan jumlah kasus yang ditangani sejumlah 129 kasus, jadi capaian indikator tersebut 100%.

Program – program yang mendukung sasaran Menurunnya Kasus Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	215.600.000,00	205.472.000,00	95,30
2	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	267.000.000,00	246.676.300,00	92,39
3	Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	525.000.000,00	507.202.500,00	96,61
4	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	516.000.000,00	507.400.000,00	98,33
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	466.200.000,00	459.916.900,00	98,65
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	967.000.000,00	931.420.850,00	96,32
7	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	13.820.000,00	13.820.000,00	100,00
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	960.852.000,00	946.297.500,00	98,49
9	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas	401.042.800,00	397.679.912,00	99,16
10	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan	52.000.000,00	47.472.900,00	91,29

	Korban Bencana Alam			
11	Program Penegakan Peraturan Daerah	598.500.000,00	570.138.500,00	95,26
12	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	774.500.000,00	771.531.000,00	99,62
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	171.000.000,00	169.080.000,00	98,88
JUMLAH		5.928.514.800	5.744.108.362	97,40

Rata-rata capaian kinerja sasaran Menurunnya Kasus Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar 95,1% menunjukkan adanya hambatan dalam mencapai target tersebut. Adapun hambatan tersebut yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Solusi yang bisa ditempuh dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi kesiapsiagaan mendeteksi adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran 30. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui indikator sasaran yaitu Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu Pilpres, Pileg dan Pilgub. Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.60
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Indikator Sasaran	2018			% Cap 2017	% Cap 2016	RPJMD	
	Target	Realisasi	% Capaian 2018			Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu Pilpres, Pileg dan Pilgub	75	65,99	87,99	-	-	85	77,64

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak diselenggarakan pemilu atau pilkada sehingga tidak ada data dukung. Untuk tahun 2018 diselenggarakan pemilihan Gubernur Jawa Tengah dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Rembang yaitu 475.730, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 313.934. formula penghitungan capaian

$$\frac{\text{Pesentese pemilih dalam menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}} = \frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100\%$$

$$= \frac{313.934}{475730} \times 100\% = 65,99\%$$

Program – program yang mendukung sasaran Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yaitu:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.327.000.000,00	1.311.686.000,00	98,85
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	66.000.000,00	65.290.000,00	98,92
JUMLAH		1.393.000.000	1.376.976.000	98,85

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat sebesar 65,99% menunjukkan target sebesar 75% tidak tercapai. Adapun hambatan dalam mencapai target tersebut yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Solusi yang bisa ditempuh dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula serta memberikan sosialisasi tentang arti pentingnya memilih Presiden, Anggota Legislatif dan Pemimpin Daerah untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Sasaran 31: Meningkatkan Kualitas Penanganan pada masyarakat PMKS

Kabupaten Rembang merupakan pada tahun 2010 merupakan salah satu dari 50 Kabupaten di Indonesia yang menjadi sasaran lokasi prioritas percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06.B/HUK/2010. Permasalahan sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang, dari 22 kategori PMKS yang relatif menonjol adalah kemiskinan, pengangguran, keterlantaran dan tuna sosial.

Capaian kinerja indikator sasaran persentase PMKS yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.61

Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	RPJMD	
		2018	2018				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Persentase PMKS yang ditangani (%)	55	67,18	134,82	99,66	119,47	70	95,97

Realisasi persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2018 adalah sebesar 67,18%. Dari total 111.330 orang yang tergolong PMKS, yang tertangani sebanyak 74.794 orang. Pencapaian ini diatas target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 55% atau capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 134,82. Dalam kurun waktu tahun 2106-2018, capaian kinerja persentase PMKS yang tertangani adalah 119,47%, 99,66% dan 134,82%. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017, persentase PMKS yang ditangani di Kabupaten Rembang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan bagi upaya pencegahan dan penanganan PMKS telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2018 telah berhasil untuk menekan sekaligus mengentaskan permasalahan sosial yang ada. Hal tersebut sejalan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng yang menginginkan PMKS tertangani secara tuntas. Salah satu kegiatan yang berpengaruh dalam penanganan PMKS diantaranya, pelatihan kewirausahaan karena secara efektif mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial sekaligus langkah tepat untuk mencetak wirausahawan-wirausahawan baru. Suatu daerah dikatakan maju jika memiliki 2% wirausahawan dari jumlah penduduk, sedangkan di Rembang baru memiliki 7000 wirausahawan dari 600 ribu lebih jumlah penduduknya. Sehingga menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat menjadi suatu yang mutlak untuk memperbaiki taraf hidup.

Keberhasilan dalam realisasi target dan capaian kinerja PMKS yang ditangani merupakan hasil dari beberapa program yang dilakukan terkait penanganan PMKS. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	73.250.000,00	63.503.105,00	86,69
2	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	44.320.000,00	42.223.000,00	95,27
3	Program Penanganan Anak Terlantar	19.015.000,00	18.465.000,00	97,11
4	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	101.969.600,00	101.419.600,00	99,46
5	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	18.230.000,00	18.230.000,00	100,00
JUMLAH		256.784.600,00	243.840.705,00	94,96

Dari anggaran Rp 256.784.600,-, terealisasi sebesar Rp 243.840.705,-. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS pada tahun 2018. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 12.943.895,- (5,04%) karena capaian kinerja sudah melebihi 100%.

Sasaran 32. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Capaian kinerja indikator sasaran keadilan gender dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.62

Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	RPJMD				
		2018	2018	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
1.	Cakupan Pemenuhan Hak Anak (%)	60	60,2	109,45	100	100	75	93,33
2.	Persentase Perempuan yang menduduki jabatan di Lembaga Pemerintah (%)	31	27,68	98,86	96,55	98,57	34	81,41
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				104,15	98,27	98,28		

Realisasi cakupan pemenuhan hak anak pada tahun 2018 adalah sebesar 60,2%. Dari total 294 desa yang ada, terdapat 177 desa yang memenuhi kebutuhan hak anak. Pencapaian ini diatas target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 60%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 109,45% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, capaian kinerja cakupan pemenuhan hak anak diatas 100%. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Terbukti pada kurun waktu 2 terakhir ini, pada tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Rembang meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu juga Kabuapten Rembang juga berhasil meraih penghargaan dalam upaya pencegahan perkawinan anak usia dini pada tahun 2017-2018.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan, diantaranya menjalin kerjasama (MoU) dengan Pengadilan Agama. MoU dengan Pengadilan Agama sejak tahun 2017 yang isinya bahwa anak yang mengajukan dispensasi nikah karena di bawah umur, akan mendapatkan bimbingan konseling dari Puspaga. Tujuannya agar mereka mau menunda sampai umurnya cukup. Selain itu ada advokasi kepada Pencatat nikah di desa agar tidak mencatat jika yang bersangkutan masih di bawah umur. Dan selanjutnya akan melakukan advokasi terhadap orang tua si anak tersebut.

Sedangkan untuk realisasi persentase perempuan yang menduduki jabatan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2018 adalah sebesar 27,68%. Dari total 578 jabatan di pemerintahan, sebanyak 160 jabatan diisi oleh perempuan. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 31%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 98,86% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, capaian kinerja persentase perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan belum mencapai 100% (pada kisaran 96,55% sampai dengan 98,86%). Hal ini disebabkan karena peran perempuan tidak bisa dilepaskan dari setiap lini kehidupan. Dalam keluarga misalnya, perempuan memiliki tugas dan kodrat menyelesaikan segala keperluan rumah tangga, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai 3M, *macak* (berhias), *masak* (memasak), *manak* (mempunyai anak). Namun dalam ranah sosial, eksistensi perempuan sempat mengalami kemunduran, terutama saat berlakunya patriarki, yang mana menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan. Istilah domestikasi, marginalisasi dan pengibu rumah tanggaan menjadi *platform* tanpa memandang kelas sosial perempuan berasal.

Pengusungan kesetaraan gender saat ini, nampaknya telah sedikit membuahkan hasil, hal ini terlihat pada partisipasi perempuan dalam pentas panggung politik yaitu dengan memberikan persyaratan minimal 30% calon anggota politik berasal dari perempuan. Partisipasi aktif perempuan tersebut dalam kancah politik maupun bidang lainnya tentu

bukanlah berasal dari perempuan biasa, melainkan perempuan yang memiliki kesadaran, cara pandang, dan memiliki keberpihakan untuk memajukan diri dan kaumnya yang tertinggal. Sekaligus, dapat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan negara.

Adanya hal tersebut semestinya menjadikan kita dapat menghindari pandangan negatif bahwa perempuan tidak lebih rendah dari pada laki-laki. Melalui derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi, perempuan dapat meningkatkan kualitas diri melalui pencarian pengetahuan, baik melalui jalur instansi pendidikan tinggi maupun peningkatan kemampuan diri (*skill*). Hingga pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak diragukan lagi. Hal ini yang didorong Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan peluang dan peran lebih kepada perempuan agar secara proporsional mampu bekerjasama dengan laki-laki.

Untuk indikator sasaran persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan pada tahun 2018, realisasinya adalah 1,2%. Sasaran ini untuk melihat sejauh mana masyarakat melakukan swadaya terhadap program pembangunan di desa melalui dana desa. Dari dana desa sebesar Rp 35.053.374.910,-, sebanyak Rp 420.640.000 merupakan swadaya dari masyarakat Kabupaten Rembang. Pencapaian ini sudah mencapai target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 1,1%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 109,09% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, capaian kinerja persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mengalami kenaikan, dengan data secara berurutan 50%, 50 % dan 109,09%.

Dengan adanya dana desa yang semakin tahun semakin meningkat anggarannya, masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan di desa. Progres meningkatnya persentase swadaya masyarakat ini menunjukkan masyarakat sudah mulai mandiri baik tingkat individu, kelompok hingga komunitas. Kemandiriannya ini memperlihatkan kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak pada tahun 2018 adalah sebesar 105,8%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak telah terwujud. Faktor pendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Rembang sangat serius dalam meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak. Terbukti dengan prestasi Kabupaten Rembang di tingkat nasional. Kabupaten Rembang juga berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) katagori madya.

Keberhasilan dalam realisasi target dan capaian kinerja sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak didukung

memalui berbagai program. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.503.400.000,00	1.503.261.000,00	99,99
2	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	222.000.000,00	221.451.250,00	99,75
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	386.000.000,00	384.708.659,00	99,67
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	465.000.000,00	450.740.525,00	96,93
5	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	333.000.000,00	310.046.665,00	93,11
6	Program Peningkatan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak	482.000.000,00	480.363.220,00	99,66
7	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	528.000.000,00	515.959.500,00	97,72
8	Program Sistem Data Gender dan Anak	28.000.000,00	27.997.000,00	99,99
	JUMLAH	3.947.400.000,00	3.894.527.819,00	98,66

Dari anggaran Rp 3.947.400.000,-, terealisasi sebesar Rp 3.894.527.819,-. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak pada tahun 2018. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 52.872.181,- (1,34%) karena capaian kerjanya sudah diatas 100%.

Sasaran 33: Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal

Kinerja sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya lokal diindikasikan dengan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.63
Capaian kinerja indikator sasaran
Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian Tahun			Tahun 2021 (akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	2018	2017	2016	Target	% Capaian th. 2018
Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14,00	17,00	121,43	100,00	100,00	20,00	85,00

Sumber: Dinbudpar Kab. Rembang

Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran ini meningkat menjadi 121,43% setelah selama tahun dua tahun sebelumnya mencapai 100%. Namun capaian tahun 2018 ini masih 85% dari target capaian kinerja tahun 2021, tahun terakhir RPJMD.

Salah satu usaha untuk mencapai sasaran tersebut adalah menerbitkan regulasi berupa peraturan bupati yang meliputi usaha perlindungan benda-benda cagar budaya, peran serta masyarakat, serta peningkatan pengelolaan museum.

Sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya lokal pada tahun 2018 didukung oleh dua program dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 96,86%. Dua program tersebut adalah:

1. Program pengelolaan keragaman budaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.511.500, setara dengan 96,30% dari anggaran.
2. Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.706.947, setara dengan 97,41% dari anggaran.

Tingkat efektivitas dan efisiensi sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah tahun 2018 terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.64
Efisiensi dan Efektivitas Sasaran
Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Lokal Tahun 2018

Uraian	Capaian
Tingkat efisisensi anggaran	96,86%
Tingkat efektifitas anggaran	(22,89%)

Sumber: data yang diolah

Sasaran 34: Terkendalinya pertumbuhan Penduduk

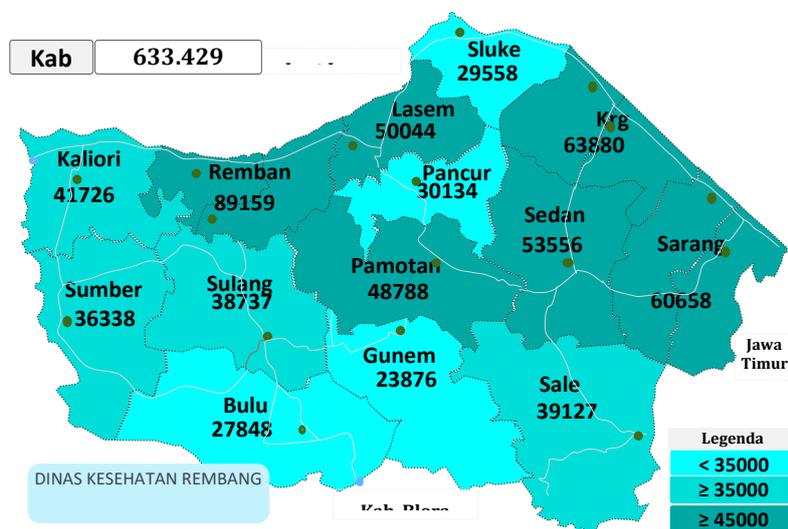
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 110,39 % dengan predikat *sangat berhasil*.

Tabel III.65

Indikator Sasaran	2018			% Cap 2017	% Cap 2016	RPJMD	
	Target	Realisasi	% Capaian 2018			Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Persentase Pertumbuhan Penduduk	0,71	0,77	91,55	107,79	102,38	0,53	69,81

Pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah sebesar 0,77 % dari semula 628.579 jiwa di tahun 2017 menjadi 633.429 jiwa pada tahun 2018 sehingga capaian indikator persentase pertumbuhan penduduk sebesar 91,55 %. Capaian ini cenderung menurun bila dibandingkan capaian tahun 2016 dan 2017 yang mencapai lebih dari 100 %.

Jumlah Penduduk Kab. Rembang Tahun 2018



Jumlah penduduk di kabupaten Rembang tahun 2018 menurut catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 633.429 jiwa dengan kecamatan dengan penduduk paling padat adalah Rembang disusul Kragan dan Sarang.

Beberapa program yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% serapan
1	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	6.527.423.000,-	5.083.032.329,-	77,87 %
2	Program pelayanan kontrasepsi	215.122.000,-	189.449.947,-	88,07 %
	JUMLAH	6.742.545.000,-	5.272.482.276,-	82,97 %

Meskipun capaiannya sudah lebih dari 90 % namun realisasi pertumbuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab menurunnya capaian kinerja adalah penetapan kinerja yang terlampau tinggi sehingga realisasi tahun 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepesertaan Keluarga Berencana yang meningkat menjadi 75 % dari sebelumnya 73 %. Sementara kegiatan pendukung juga telah banyak dilakukan seperti

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
- Pelayanan KB Medis Operasi
- Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/ KR
- Fasilitasi Penggerakan Pelayanan KB bagi Kader
- Orientasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Terintegrasi dengan IVA
- Dukungan Kemitraan Penggarapan KIE MKJP di Wilayah Galciltas
- Bhakti Sosial Pelayanan KB-Kes IBI dan masih banyak lagi.
- Fasilitasi Pelayanan KB Hari Kartini
- Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja/KRR
- Fasilitasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
- Pertemuan Kemitraan Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Tingkat Kecamatan
- Pencanaan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kes, TMKK, BBKKB
- Pemilihan Mitra Kerja (PKB/ PLKB/PPKBD/SubPPKBD) Teladan Kab. Rembang
- Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana
- Penyusunan Profil Kedudukan Tingkat Kabupaten
- Fasilitasi Tim Penanganan Koalisi Kependudukan
- Sosialisasi KIE Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Komunitas
- Penguatan SDM IPeKB
- Pengembangan Kampung KB
- Fasilitasi Harganas (Hari Keluarga Nasional)
- Penyelenggaraan Rakerda dan Review Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

- Penyelenggaraan Rakercam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
- Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- Operasional Pembinaan Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
- Operasional Integrasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung Keluarga (KB)
- Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana
- Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Generasi Berencana Kit (GenRe Kit)
- Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana
- Penggarapan Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Wilayah Legok
- Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
- Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan
- Fasilitasi Penguatan SDM Forum Komunikasi Institusi Masyarakat Perdesaan (FKIMP)
- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
- Pengelolaan Alat Kontrasepsi
- Pengumpulan dan Pengolahan Data Hasil Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan Berbasis IT
- Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
- Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan
- Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi
- Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
- Jambore Institusi Masyarakat Perdesaan

Namun masih ada beberapa kendala diantaranya

1. Ketersediaan alokan implan dan IUD yang sangat terbatas.
2. Jumlah tenaga penyuluh KB banyak yang memasuki masa pensiun sampai saat ini tinggal 48 PKB yang menangani 294 desa/kel di Kabupaten Rembang.
3. Masih rendahnya kesertaan KB MKJP khususnya MOP di Kabupaten Rembang.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :

1. Membuat permohonan pengajuan alokasi implan dan IUD ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
2. Memaksimalkan peran kader PPKBD dan sub PPKBD dalam penggerakan KB Pelaksanaan pelayanan KB MKJP serentak dengan memanfaatkan momentum dan memaksimalkan anggaran APBD Kabupaten Rembang untuk motivator dan akseptor MOP.
3. Melakukan Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB.

Sasaran 35. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tertib administrasi kependudukan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 95,5 % dengan predikat *berhasil*.

Tabel III.66

Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	2018			% Capaian		RPJMD	
	Target	Realisasi	% Capaian 2018	2017	2016	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2018
Persentase penduduk ber-KTP	100	93,68	93,68	90,00	100	100	93,68
Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	100	97,32	97,32	92,46	100	100	97,32
Rata-rata			95,5	91,23	100		95,5

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk ber KTP, target 100%, realisasi 93,68 %, sehingga capaian kinerja sebesar 93,68 %
2. Persentase Bayi ber Akta Kelahiran, target 100%, realisasi 97,32 %, sehingga capaian kinerja sebesar 97,32 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mencatat bahwa jumlah penduduk tahun 2018 yang wajib KTP sebanyak 493.837 jiwa. Adapun penduduk yang telah memiliki KTP sejumlah 462.642 sehingga persentase penduduk ber-KTP adalah 93,68 %. Adapun jumlah bayi ber akta kelahiran dihitung dari jumlah kepemilikan akta kelahiran terhadap jumlah anak. Tahun 2018 jumlah anak di kabupaten Rembang sebanyak 157.155

jiwa dan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 152.948 jiwa. Persentase bayi atau anak yang memiliki akta kelahiran sebesar 97,32 % dengan capaian 97,32 %. Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan adalah 95,5 %.

Ada beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah masih ada masyarakat dengan tingkat kesadaran kurang tentang arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan yang lain.

Program kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini adalah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% serapan
1	Program penataan administrasi kependudukan	3.151.658.500,-	3.077.225.872,-	97,64%

Hasil capaian tersebut di atas meskipun belum mencapai 100 % akan tetapi telah mencapai nilai bagus dengan pencapaian di atas 90 %. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian dua sasaran di atas sebagai berikut.

- a. Pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil tidak di pungut biaya retribusi (gratis) sehingga tidak terdapat pemungutan biaya. Bebas biaya di sini termasuk tidak adanya bea retribusi atau penggantian biaya cetak blangko dokumen kependudukan. Hal ini sangat meringankan beban masyarakat yang ingin memiliki dokumen kependudukan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan aplikasi SIAK *online*. Dengan pembangunan jaringan teknologi informasi seiring dengan kemajuan zaman merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien atas administrasi kependudukan

Sasaran 36. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah.

Sasaran meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kemandirian dalam ketersediaan pangan, akses pangan, kelancaran distribusi pangan dan keamanan pangan. Pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas dalam lingkup individu dan rumah tangga akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan indikator skor Pola Pangan Harapan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel III.67
Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kemandirian dalam Ketahanan Pangan

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN 2018	% CAPAIAN 2017	% CAPAIAN 2016	RPJMD	
	2018	2018				TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN S/D 2018
Skor Pola Pangan Harapan/PPH (Skor)	87,7	86,8	98,97	98,51	97,93	88,3	98,07

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan sebagai indikator tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk yang diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang serta mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan. Pada indikator ini, capaian skor PPH pada tahun 2018 menunjukkan angka 86,80. Capaian PPH selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 0,58% di tahun 2017 dan meningkat 1,04% di tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman konsumsi masyarakat Rembang sudah semakin lebih baik dan bisa dikatakan bahwa secara kualitas, konsumsi masyarakat Rembang semakin baik. Skor PPH ini belum bisa mencapai target karena pola pangan masyarakat Rembang masih belum beragam baik dalam komposisi maupun mutu gizinya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, capaian skor PPH tahun 2018 sudah diperoleh nilai sebesar 98,30%.

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa persentase capaian pada tahun 2018 sebesar 98,97% yang di kategorikan dalam kategori *sangat berhasil*. Sedangkan berdasarkan kriterianya, skor PPH Kabupaten Rembang berada pada kondisi segitiga perak yang berada pada range skor 78 - 88 dan dicirikan dengan jumlah energi yang diperoleh dari konsumsi padi-padiandan umbi-umbian yang menurun namun masih diatas norma PPH, energi dari konsumsi pangan hewani, sayur dan buah yang masih rendah dari norma PPH dan energi dari konsumsi minyak, kacang-kacangan dan gula yang sudah memenuhi norma PPH. Kondisi segitiga perak ini menyebabkan kondisi Pola Pangan Harapan di Kabupaten Rembang masih berada pada posisi aman karena konsumsi dari jenis pangan masih berada di norma PPH hanya saja untuk perlu ditingkatkan lagi untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah. Perhitungan skor PPH tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.68
Perhitungan Skor PPH Tahun 2018 Berdasarkan Kelompok Pangan

No	Kelompok Pangan	Kalori	% Kalori	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.201,9	56,3	55,9	0,5	28,2	28,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	26,6	1,2	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3.	Pangan Hewani	196,7	9,2	9,2	2,0	18,4	18,3	24,0	18,3
4.	Minyak dan Lemak	293,1	13,7	13,6	0,5	6,9	6,8	5,0	5,0
5.	Buah/ Biji Berminyak	83,2	3,9	3,9	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	162,9	7,6	7,6	2,0	15,3	15,2	10,0	10,0
7.	Gula	43,3	2,0	2,0	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
8.	Sayur dan buah	111,0	5,2	5,2	5,0	26,0	25,8	30,0	25,8
9.	Lain-lain	15,5	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.134,3	100,0	99,3	11,5	98,3	97,6	100,0	86,8

Sumber : Dintanpan 2018 (data diolah)

Berdasarkan uraian diatas, skor PPH menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Rembang sudah baik yang dicerminkan dari besaran skor PPH sudah ada di angka 86,8 dari nilai maksimal PPH sebesar 100. Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keberagaman pangan adalah melalui program diversifikasi pangan. Contoh sederhana diversifikasi pangan yang dapat dilakukan adalah pada kelompok pangan sumber karbohidrat. Masyarakat Kabupaten Rembang kebanyakan masih mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, padahal produksi komoditas pangan yang lain seperti umbi-umbian juga melimpah namun tingkat konsumsinya masih sangat rendah. Konsumsi umbi-umbian di Kabupaten Rembang masih kecil skornya dan melalui konsumsi umbi-umbian sebagai pengganti pangan utama dapat dijadikan sebagai solusi.

Guna mendukung sasaran meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan telah dilaksanakan beberapa program kegiatan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang meliputi :

Tabel III.69
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan	93.000.000	91.886.000	98,80
2.	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	590.000.000	585.352.000	99,21
3.	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	260.000.000	254.862.000	98,02
Jumlah		943.000.000	932.100.000	98,68

Ada tiga program yang mendukung sasaran meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan dengan rata-rata serapan sebesar 98,68%. Dari total anggaran sebesar Rp 943.000.000,- terserap sebesar Rp 932.100.000,-. Adapun tingkat efektivitas anggaran dan efektivitas anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.70
Efektivitas Anggaran dan Efisiensi Anggaran
Pada Sasaran Meningkatnya Kemandirian Dalam Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Formula	Capaian
1	Tingkat efektifitas anggaran	(Realisasi anggaran belanja / target anggaran) x 100 %	98,68 %
2	Tingkat efisiensi anggaran	% Rata-rata capaian indikator kinerja - % Realisasi anggaran	98,97 % - 98,68 % = 0,29 %

Dari tabel diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran diperoleh angka sebesar 98,68% dan efisiensi anggaran mencapai 0,29 % yang berarti bahwa program-program sudah efisien dalam mencapai kinerja pada sasaran ini.

Sasaran 37: Meningkatnya daya beli masyarakat

Sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan suatu rumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu

kebutuhan pangan. Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.71
Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN 2018	% CAPAIAN 2017	% CAPAIAN 2016	RPJMD	
	2018	2018				TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN S/D 2018
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. X 1.000)	10.000	10.721,7	107,22	83,07	102,63	10.750	99,74

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sangat besar pada tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 32,25% dari tahun 2017. Capaian tahun 2017 sempat turun dibandingkan tahun 2016 dengan penurunan sebesar 19,56%. Capaian untuk indikator ini di tahun 2018 meningkat melebihi target dengan nilai sebesar Rp. 10.721.700,- dari target sebesar Rp. 10.000.000,- (107,22%). Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2021 maka capaian tahun 2018 sudah mencapai 99,74%.

Tingkat konsumsi berhubungan dengan tingkat pendapatan dimana fungsi konsumsi menghubungkan laju pengeluaran konsumsi dengan tingkat produksi nasional atau pendapatan nasional dan diduga bahwa dengan bertambahnya pendapatan nasional akan bertambah pula jumlah konsumsi. Secara garis besar kebutuhan rumah tangga dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Besaran pendapatan yang digunakan untuk pangan dari suatu rumah tangga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Makin tinggi pengeluaran untuk pangan makin berkurang sejahtera rumah tangga dan makin kecil pengeluaran untuk pangan maka makin sejahtera suatu rumah tangga. Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.72
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas Dan Kelompok Pengeluaran (Rp) Tahun 2018

No.	Kelompok Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Setahun	Persentase (%)
1.	Pengeluaran Pangan	452.601	5.431.212	50,65
2.	Pengeluaran Non Pangan	440.874	5.290.488	49,35
Jumlah Pengeluaran Kab. Rembang		893.475	10.721.700	100,00

Menurut tabel diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per tahun untuk bahan pangan sedikit lebih banyak yaitu 50,65% atau sebesar Rp 5.431.212,- dibandingkan dengan pengeluaran untuk non pangan sebesar Rp 5.290.488,- atau dengan persentase sebesar 49,35%. Untuk pengeluaran pangan, kelompok komoditas paling banyak untuk makanan dan minuman jadi yaitu sebesar Rp 1.878.408,- disusul dengan rokok dan tembakau dengan pengeluaran sebesar Rp 803.184,- dan kelompok padi-padian sebesar Rp 653.364,-. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran non pangan banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp 2.462.304,- dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar Rp 1.273.788,-.

Guna mendukung sasaran meningkatnya daya beli masyarakat telah dilaksanakan beberapa program kegiatan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang meliputi :

Tabel III.73
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	22.000.000	21.925.000	99,66
2.	Desa Mandiri Pangan	271.000.000	269.385.000	99,40
Jumlah		293.000.000	291.310.000	99,53

Ada tiga program yang mendukung sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan rata-rata serapan sebesar 99,53%. Dari total anggaran sebesar Rp 293.000.000,- terserap sebesar Rp 291.310.000,-. Adapun tingkat efektivitas anggaran dan efektivitas anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.74
Efektivitas Anggaran dan Efisiensi Anggaran
Pada Sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

No.	Uraian	Formula	Capaian
1	Tingkat efektivitas anggaran	(Realisasi anggaran belanja / target anggaran) x 100 %	99,53 %
2	Tingkat efisiensi anggaran	% Rata-rata capaian indikator kinerja - % Realisasi anggaran	107,22 % - 99,53 % = 7,69 %

Dari tabel diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran diperoleh angka sebesar 99,53% dan efisiensi anggaran mencapai 7,69 % yang berarti bahwa program-program sudah efisien dalam mencapai kinerja pada sasaran ini.

Sasaran38: Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Pada Ekonomi Rumah Tangga.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memacu peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan. Permasalahan belum optimalnya kualitas dan produktivitas pertanian serta belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

Sebagai daerah yang berbasis pertanian dan berada di wilayah pantura, hasil produksi pertanian dan perikanan memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang. Sebagai leading sektor perekonomian, pergerakan sektor pertanian dan perikanan memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Rembang karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan yang sangat berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rembang.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat dengan indikator sasaran produktivitas pertanian. Angka produktivitas ini diperoleh melalui perhitungan produksi padi dibagi dengan luas panen padi. Selengkapnyanya pencapaian indikator kinerja sasaran ini tersajikan pada tabel berikut :

Tabel III.75
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Pada Ekonomi Rumah Tangga

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN 2018	% CAPAIAN 2017	% CAPAIAN 2016	RPJMD	
	2018	2018				TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN S/D 2018
Produktivitas pertanian (ton/ha)	6,28	5,51	87,74	77,00%	72,24	6,43	85,69
Pertumbuhan produksi perikanan budidaya 2 % per tahun (ton)	6.381.291	6.454.843	101,15	87,01	100,01	8.420.575	76,65
Rata-rata			94,44	82,00	86,13		

Menurut tabel diatas, dari dua indikator, pada tahun 2018 diperoleh rata-rata capaian sebesar 94,44% atau masuk dalam kategori *berhasil*. Pada indikator produktivitas pertanian diperoleh capaian sebesar 87,74% dan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya didapatkan capaian sebesar 101,15%. Dari tahun 2016 hingga 2018 kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2018. Capaian dari 2016 ke 2017 menurun 4,13 % dan naik di tahun 2018 sebesar 12,44%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021, maka indikator produktivitas

pertanian baru diperoleh hasil 85,69% sedangkan pertumbuhan produksi perikanan budidaya diperoleh hasil 76,65%. Pembahasan tentang kedua indikator dibahas dalam subbag berikut :

1. Produktivitas pertanian (ton/ha)

Pada indikator produktivitas pertanian, terlihat bahwa capaian pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017 dari 77% menjadi 87,74% atau dikategorikan *berhasil*. Dari target produktivitas sebesar 6,28 ton/ha dapat dicapai sebanyak 5,51 ton/ha. Produktivitas tahun 2018 tertinggi selama tiga tahun terakhir dengan peningkatan produktivitas sebesar 15,03% dibandingkan tahun 2017. Belum tercapainya target produktivitas ini selain disebabkan karena faktor curah hujan dan ketersediaan air irigasi, disebabkan juga oleh (1) para petani masih menitikberatkan tradisi masa lalu dalam melakukan praktek pertanian, sehingga petani belum mau melaksanakan rekomendasi teknis secara maksimal, (2) terkait akses pembiayaan, sebagian besar petani tidak mampu mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan untuk berinvestasi, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan produktivitas melalui penggunaan sarana produksi yang lebih baik terutama saat kegiatan pemeliharaan berlangsung, hanya mengandalkan hasil panen saat ini untuk membiayai operasional masa tanam berikutnya.

Untuk itu pemerintah perlu segera (1) merubah pola pikir petani tradisional menjadi petani modern dengan mensosialisasikan secara luas penerapan teknologi pertanian melalui pembuatan demplot percontohan, sekolah lapang, temu usaha tani dan meningkatkan pendampingan usaha tani oleh penyuluh pertanian lapangan. (2) penyediaan infrastruktur pertanian terutama dalam penyediaan irigasi pertanian mengingat sebagian besar sawah di Kabupaten Rembang merupakan sawah tadah hujan. (3) meningkatkan pola kemitraan antara petani dengan pelaku usaha sektor pertanian dan meningkatkan akses petani ke perbankan untuk mendapatkan kredit bunga rendah.

2. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya per tahun (ton)

Meningkatkan produksi perikanan budidaya mendukung misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang ketujuh, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan. Kegiatan perikanan budidaya ini meliputi budidaya air payau (tambak) dan air tawar (kolam). Perkembangan produksi perikanan budidaya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.76
Produksi Budidaya Kolam di Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2018

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)		
		2016	2017	2018
1.	Lele	1.256.633	1.020.526	1.076.552
2.	Nila	256.604	234.978	291.004
3.	Lain-lain	167.077	167.077	204.677
	J u m l a h	1.680.315	1.422.581	1.572.233

Sumber : Dinlutkan, 2018 (data diolah)

Tabel III.77
Produksi Budidaya Tambak di Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2018

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)		
		2016	2017	2018
1.	Udang Windu	474.942	467.294	463.984
2.	Udang Vanamei	3.542.505	2.956.308	2.985.335
3.	Bandeng	1.334.262	1.339.912	1.347.910
4.	Lain-lain	158.207	132.014	58.381
	J u m l a h	5.509.917	4.895.529	4.855.610

Sumber : Dinlutkan, 2018 (data diolah)

Perikanan budidaya terbagi menjadi budidaya kolam dan tambak dimana budidaya kolam adalah perikanan air tawar sedangkan budidaya adalah perikanan air payau. Budidaya kolam digunakan untuk budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, karper, gurami dan jenis ikan air tawar lain. Sedangkan budidaya tambak digunakan untuk budidaya ikan air payau seperti udang windu, udang venemei, bandeng dan jenis ikan payau lainnya.

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan produksi tahun 2017 dan 2018, produksi budidaya kolam meningkat jika dibandingkan dengan budidaya tambak. Peningkatan produksi budidaya kolam sebesar 10,52% dan budidaya tambak menurun 0,82%. Penurunan budidaya tambak turun disebabkan karena adanya penyakit yang menyerang udang windu selain itu, faktor cuaca yang kurang mendukung menyebabkan produksi perikanan menjadi turun. Faktor musim yang cenderung ekstrim dapat mengganggu kegiatan budidaya perikanan.

Guna mendukung sasaran meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga telah dilaksanakan beberapa program kegiatan oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang meliputi :

Tabel III.78
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2018
yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian Dan
Perikanan Pada Ekonomi Rumah Tangga

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	4.764.240.000	4.729.612.000	99,27
2.	Pengembangan Infrastruktur Pertanian	22.856.621.000	20.739.301.000	90,74
3.	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.174.370.000	984.644.000	83,84
Jumlah		28.795.231.000	26.453.557.000	91,28

Ada tiga program yang mendukung sasaran meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga dengan rata-rata serapan sebesar 91,28%. Dari total anggaran sebesar Rp 28.795.231.000,- terserap sebesar Rp 26.453.557.000,-. Adapun tingkat efektivitas anggaran dan efektivitas anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III.79
Efektivitas Anggaran dan Efisiensi Anggaran
Pada Sasaran Meningkatnya Kontribusi Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Pada
Ekonomi Rumah Tangga

No.	Uraian	Formula	Capaian
1	Tingkat efektifitas anggaran	(Realisasi anggaran belanja / target anggaran) x 100 %	91,28 %
2	Tingkat efisiensi anggaran	% Rata-rata capaian indikator kinerja - % Realisasi anggaran	94,44 % - 91,28 % = 3,16 %

Dari tabel diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran diperoleh angka sebesar 91,28% dan efisiensi anggaran mencapai 3,16 % yang berarti bahwa program-program sudah efisien dalam mencapai kinerja pada sasaran ini.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Informasi Kinerja Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2018 dapat terlihat dari laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 unaudited. Secara garis besar kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rembang akan dikaji melalui sisi pendapatan dan sisi belanja. dengan uraian sebagai berikut

1. PENDAPATAN

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel III.80
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 unaudited

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
PENDAPATAN	1,816,656,942,094.00	1,794,911,075,230.15	(21,745,866,863.85)	98.80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	304,351,906,094.00	305,676,436,263.15	1,324,530,169.15	100.44
Pendapatan Pajak Daerah	96,286,250,000.00	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31
Hasil Retribusi Daerah	22,858,499,000.00	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,679,000,000.00	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167,528,157,094.00	165,021,190,220.15	(2,506,966,873.85)	98.50
DANA PERIMBANGAN	1,100,652,496,000.00	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33
Dana Transfer Umum	818,442,437,000.00	812,596,054,494.00	(5,846,382,506.00)	99.29
Dana Transfer Khusus	282,210,059,000.00	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	411,652,540,000.00	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55
Pendapatan Hibah	57,455,920,000.00	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95,000,000,000.00	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229,010,130,000.00	229,010,130,000.00	0.00	100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30,186,490,000.00	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86

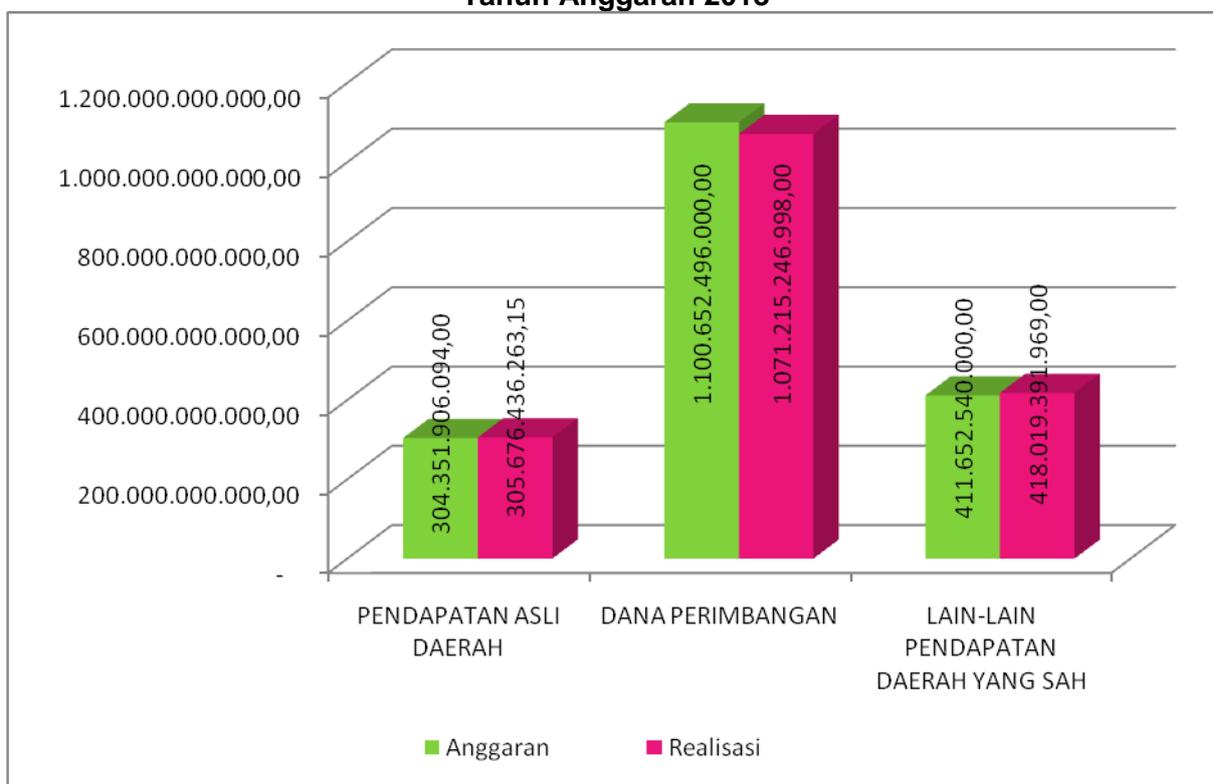
Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Pada tahun anggaran 2018 jumlah anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp. 1,816,656,942,094.00 terealisasi sebesar Rp. 1,794,911,075,230.15 atau 98.80% dari target yang dianggarkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 305,676,436,263.15 atau 100.44% .Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1,071,215,246,998.00 atau sebesar 97.33%. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah capaian realisasi sebesar Rp. 418,019,391,969.00 atau 101.55%.

Hal tersebut ditunjukkan dalam capaian kinerja komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 berikut :

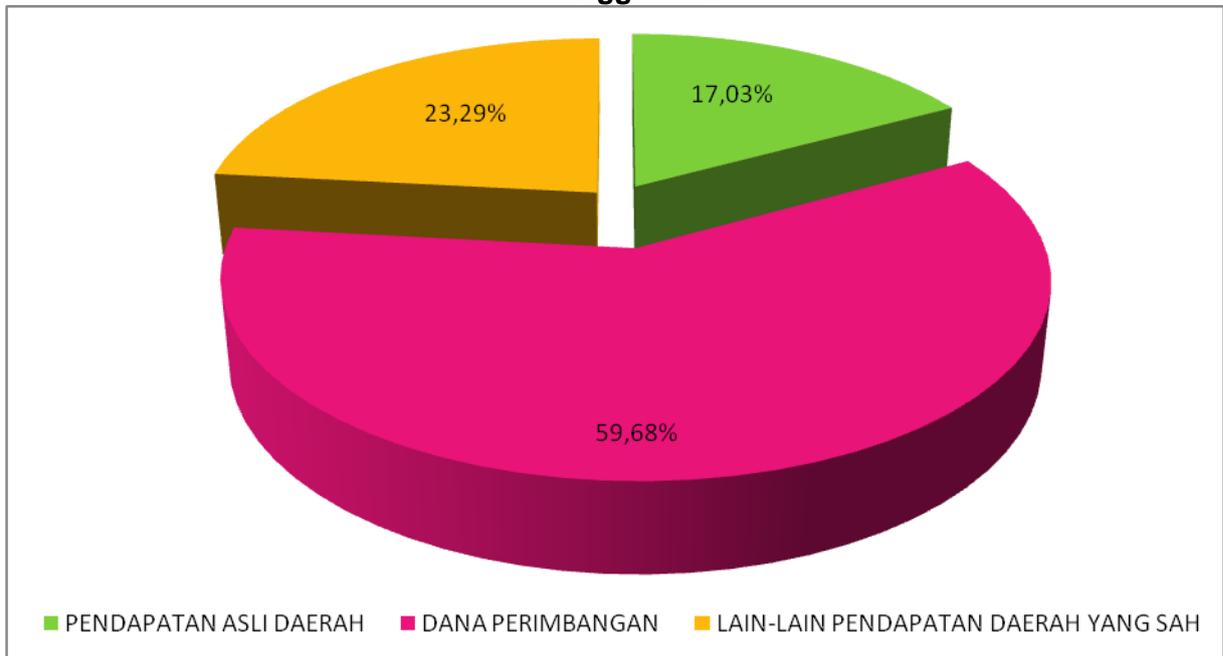
Gambar III.1
Grafik Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Sementara dilihat dari proporsi Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang masih berada pada urutan ketiga dengan prosentase proporsi sebesar 17.03%, Pendapatan Transfer pada urutan pertama dengan prosentase proporsi sebesar 59.68% dan Lain - lain Pendapatan yang Sah pada urutan kedua dengan prosentase proporsi sebesar 23.29%. Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar III.2
Grafik Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Pada tahun anggaran 2018 anggaran Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 304,351,906,094.00 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 305,676,436,263.15 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 100.44 % dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang Rp. 100,438,352,553.00 dengan prosentase proporsi sebesar 32.86%, Retribusi Daerah menyumbangkan Rp. 21,441,590,432.00 dengan prosentase proporsi sebesar 7.01%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan Rp. 18,775,303,058.00 dengan prosentase proporsi sebesar 6.14%, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp. 165,021,190,220.15 dengan prosentase proporsi sebesar 53.99%.

Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

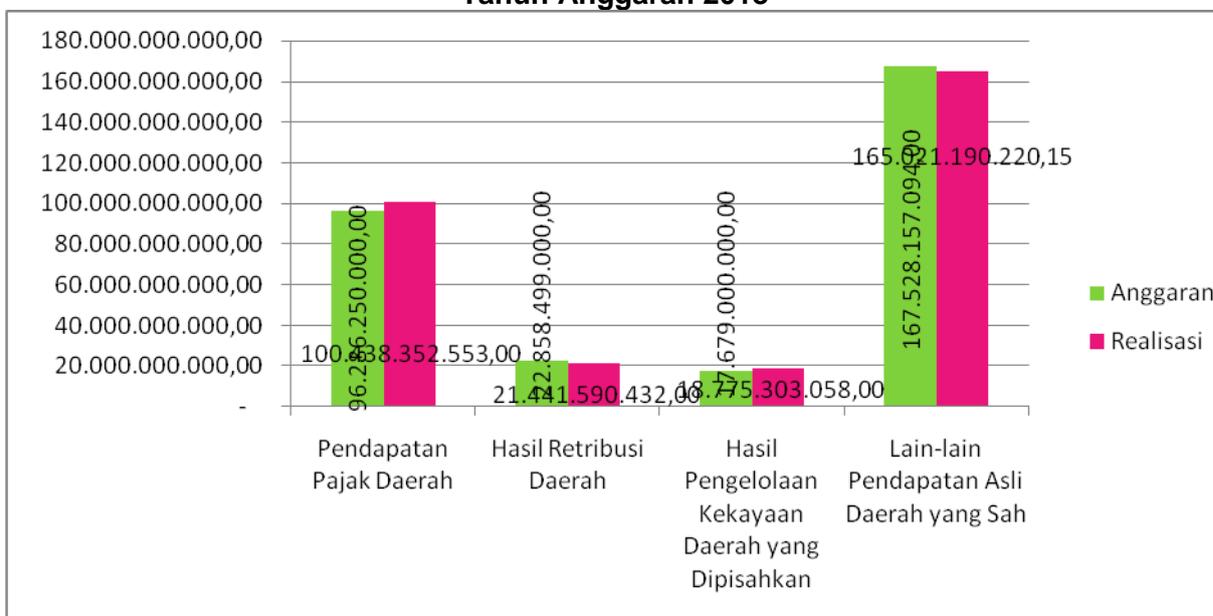
Gambar III.3
Grafik Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2018 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar III.4
Grafik Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

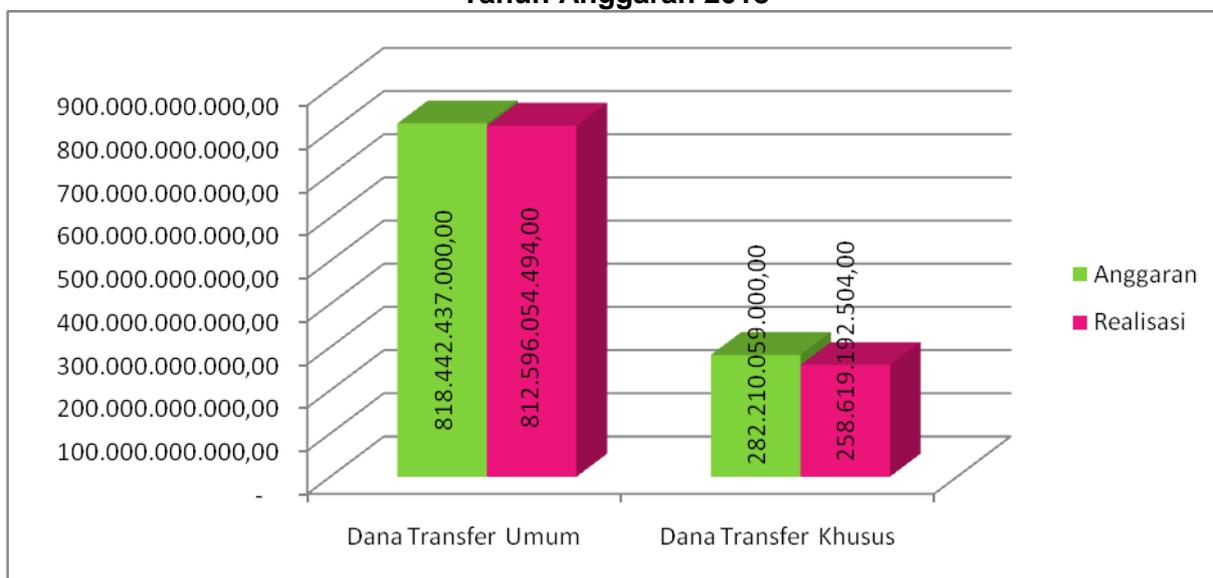
Dari grafik di atas tampak bahwa anggaran pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 96,286,250,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 100,438,352,553.00 dengan capaian kinerja 104.31%. Anggaran pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 22,858,499,000.00 tercapai realisasi Rp. 21,441,590,432.00 dengan capaian kinerja

93.80 %. Anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp. 17,679,000,000.00 dengan realisasi Rp. 18,775,303,058.00 dengan capaian kinerja 106.20%. Sedangkan anggaran Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp. 167,528,157,094.00 dengan realisasi Rp. 165,021,190,220.15 dengan capaian kinerja 98.50%.

Sedangkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 1,100,652,496,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1,071,215,246,998.00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 97.33%. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dengan anggaran sebesar Rp. 818,442,437,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 812,596,054,494.00 atau capaian kinerja sebesar 99.29% dan Dana Transfer Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 282,210,059,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 258,619,192,504.00 atau capaian kinerja sebesar 91.64%.

Adapun Capaian Kinerja Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar III.5
Grafik Capaian Kinerja Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2018



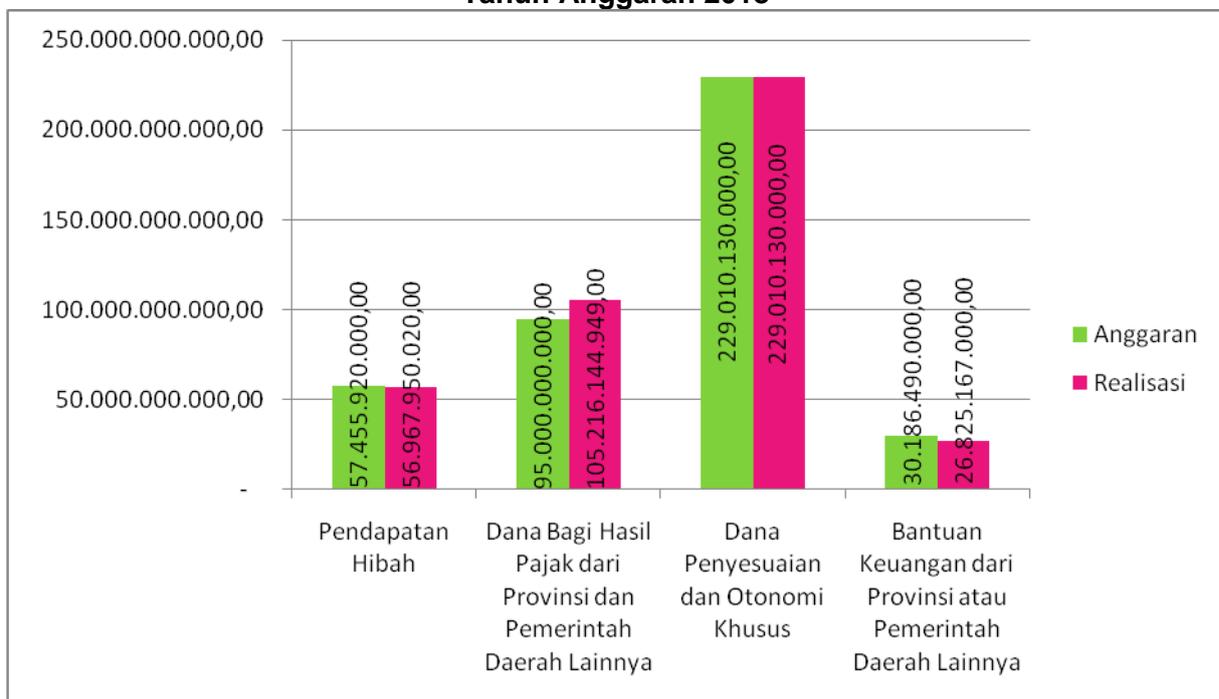
Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Sementara untuk penerimaan dari kelompok Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 411,652,540,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 418,019,391,969.00 dengan capaian kinerja sebesar 101.55%. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 57,455,920,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 56,967,950,020.00 dengan capaian kinerja sebesar 99.15%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 95,000,000,000.00 tercapai realisasi sebesar

Rp. 105,216,144,949.00 dengan capaian kinerja sebesar 110.75%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 229,010,130,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 229,010,130,000.00 dengan capaian kinerja sebesar 100.00% dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 30,186,490,000.00 tercapai realisasi sebesar Rp. 26,825,167,000.00 dengan capaian kinerja sebesar 88.86%.

Adapun Capaian Kinerja Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar III.6
Grafik Capaian Kinerja Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun anggaran 2018 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp. 1,912,100,759,618.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,814,662,872,214.36 dan prosentase capaian sebesar 94.90 %. Seperti ditunjukkan dalam table realisasi belanja per 31 Desember 2018 sesuai Permendagri no 13 tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel III.81
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 unaudited

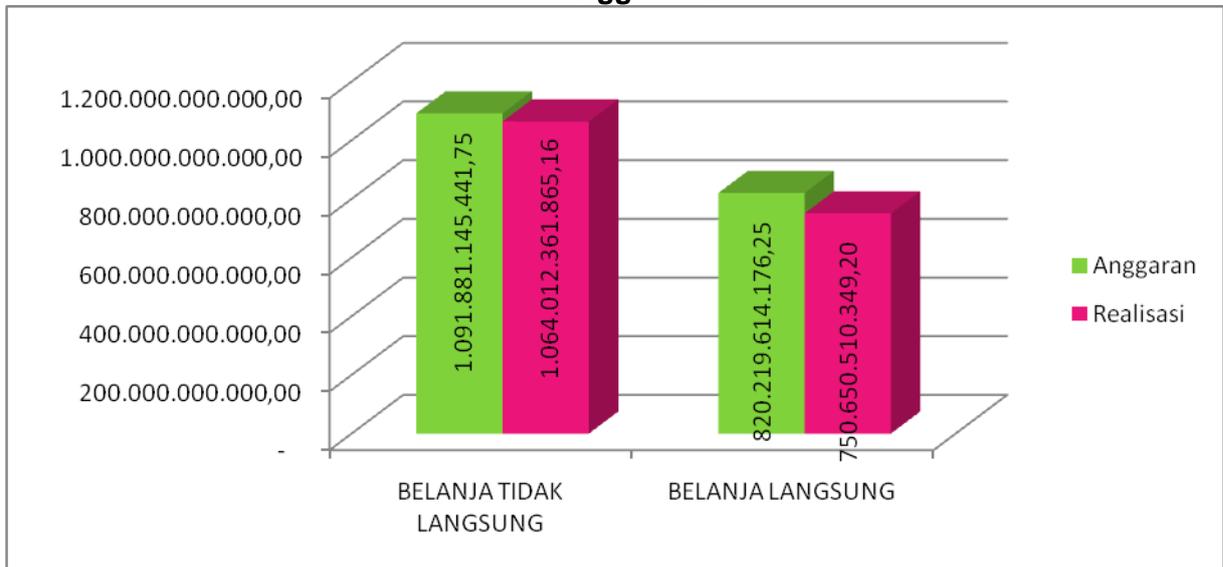
URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
BELANJA	1,912,100,759,618.00	1,814,662,872,214.36	(97,437,887,403.64)	94.90
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,091,881,145,441.75	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45
Belanja Pegawai	668,354,042,426.75	648,104,050,822.16	(20,249,991,604.59)	96.97
Belanja Bunga	1,451,355,415.00	1,468,870,443.00	17,515,028.00	101.21
Belanja Hibah	61,787,200,000.00	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25
Belanja Bantuan Sosial	8,980,000,000.00	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,765,819,900.00	10,765,819,900.00	0.00	100.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	340,042,727,700.00	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86
Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	820,219,614,176.25	750,650,510,349.20	(69,569,103,827.05)	91.52
Belanja Pegawai	179,604,985,065.00	177,564,307,707.00	(2,040,677,358.00)	98.86
Belanja Barang dan Jasa	289,894,369,366.25	263,637,696,747.20	(26,256,672,619.05)	90.94
Belanja Modal	350,720,259,745.00	309,448,505,895.00	(41,271,753,850.00)	88.23

Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 1,091,881,145,441.75 terealisasi sebesar Rp. 1,064,012,361,865.16 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 97.45%. Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 820,219,614,176.25 terealisasi sebesar Rp. 750,650,510,349.20 atau sebesar 91.52%.

Hal tersebut ditunjukkan dalam Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berikut :

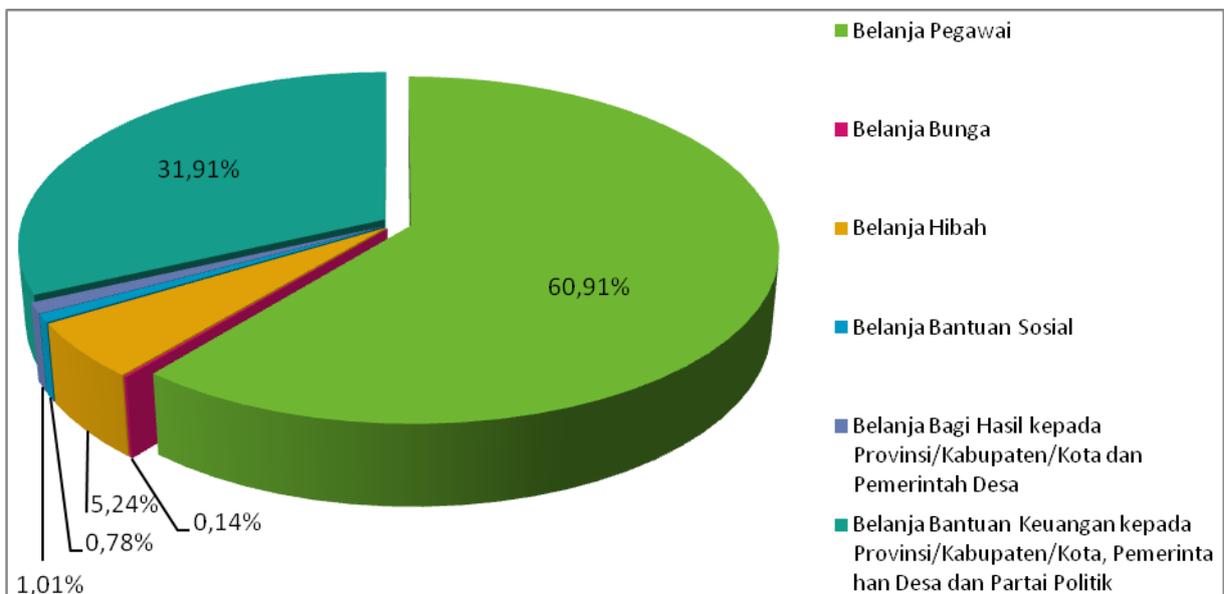
Gambar III.7
Grafik Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Dari tingkat realisasi belanja di atas dapat kita proporsikan realisasi belanja tidak langsung sebagai berikut :

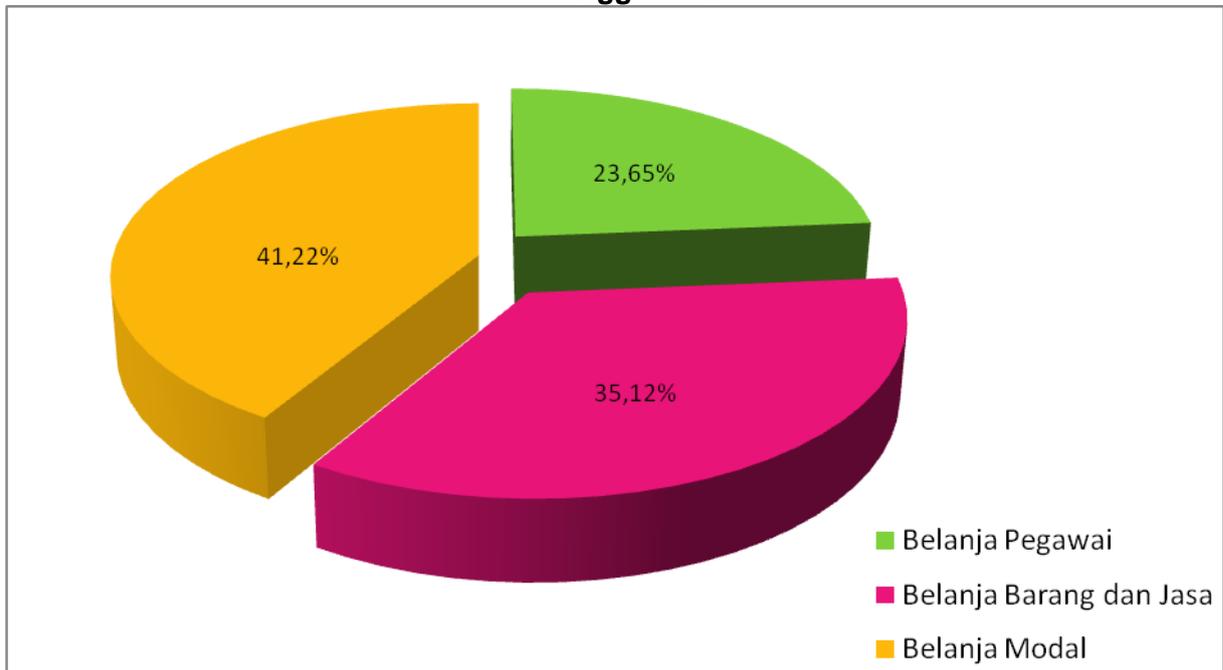
Gambar III.8
Grafik Proporsi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Sementara untuk realisasi Proporsi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat kita lihat pada grafik berikut :

Gambar III.9
Grafik Proporsi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018



Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

3. PEMBIAYAAN

Pada tahun anggaran 2018 jumlah anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah sebesar Rp. 108,161,445,444.40 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 108,161,445,444.00 atau menunjukkan kinerja sebesar 100.00% dari yang dianggarkan.

Pengeluaran Pembiayaan daerah pada pos Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 10,422,000,000.00 dengan realisasi Rp. 10,422,000,000.00 atau menunjukkan kinerja sebesar 100.00%, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 2,256,548,000.00 dengan realisasi Rp. 2,256,548,000.00 atau menunjukkan kinerja sebesar 100.00% dan Restitusi atas Kelebihan Penetapan Pajak dianggarkan sebesar Rp. 39,079,920.00 dengan realisasi Rp. 39,079,920.00 atau menunjukkan kinerja sebesar 100.00%.

Secara umum Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel III.82
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 unaudited

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
PENDAPATAN	1,816,656,942,094.00	1,794,911,075,230.15	(21,745,866,863.85)	98.80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	304,351,906,094.00	305,676,436,263.15	1,324,530,169.15	100.44
Pendapatan Pajak Daerah	96,286,250,000.00	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31
Hasil Retribusi Daerah	22,858,499,000.00	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,679,000,000.00	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167,528,157,094.00	165,021,190,220.15	(2,506,966,873.85)	98.50
DANA PERIMBANGAN	1,100,652,496,000.00	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33
Dana Transfer Umum	818,442,437,000.00	812,596,054,494.00	(5,846,382,506.00)	99.29
Dana Transfer Khusus	282,210,059,000.00	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	411,652,540,000.00	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55
Pendapatan Hibah	57,455,920,000.00	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95,000,000,000.00	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229,010,130,000.00	229,010,130,000.00	0.00	100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30,186,490,000.00	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86
BELANJA	1,912,100,759,618.00	1,814,662,872,214.36	(97,437,887,403.64)	94.90
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,091,881,145,441.75	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45
Belanja Pegawai	668,354,042,426.75	648,104,050,822.16	(20,249,991,604.59)	96.97
Belanja Bunga	1,451,355,415.00	1,468,870,443.00	17,515,028.00	101.21
Belanja Hibah	61,787,200,000.00	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25
Belanja Bantuan Sosial	8,980,000,000.00	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,765,819,900.00	10,765,819,900.00	0.00	100.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	340,042,727,700.00	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86
Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	820,219,614,176.25	750,650,510,349.20	(69,569,103,827.05)	91.52
Belanja Pegawai	179,604,985,065.00	177,564,307,707.00	(2,040,677,358.00)	98.86
Belanja Barang dan Jasa	289,894,369,366.25	263,637,696,747.20	(26,256,672,619.05)	90.94
Belanja Modal	350,720,259,745.00	309,448,505,895.00	(41,271,753,850.00)	88.23
URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
SURPLUS / (DEFISIT)	(95,443,817,524.00)	(19,751,796,984.21)	75,692,020,539.79	20.69
PEMBIAYAAN DAERAH				

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	108,161,445,444.00	108,161,445,444.40	0.40	100.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108,161,445,444.00	108,161,445,444.40	0.40	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,717,627,920.00	12,717,627,920.00	0.00	100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,422,000,000.00	10,422,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	2,256,548,000.00	2,256,548,000.00	0.00	100.00
Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	39,079,920.00	39,079,920.00	0.00	100.00
PEMBIAYAAN NETTO	95,443,817,524.00	95,443,817,524.40	0.40	100.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	75,692,020,540.19	75,692,020,540.19	0.00

Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2018 unaudited

Adapun sebagai perbandingan, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016 s/d 2018 dan persentase kenaikan rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.83
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2016 s/d 2018

URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	(%) RATA-RATA
PENDAPATAN	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15	7.14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04	305,676,436,263.15	15.02
Pendapatan Pajak Daerah	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	45.75
Hasil Retribusi Daerah	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	(5.07)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	72.07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	7.03
DANA PERIMBANGAN	935,943,695,312.00	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	7.25
Dana Transfer Umum	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	(0.96)
Dana Transfer Khusus	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	70.08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	394,756,778,893.00	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	4.19
URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	(%) RATA-RATA
Pendapatan Hibah	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	1,621.46
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	13.88
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	(10.04)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00	3.34

BELANJA	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36	2.34
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,026,233,523,179.00	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	1.83
Belanja Pegawai	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	(3.17)
Belanja Bunga	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	
Belanja Hibah	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	45.20
Belanja Bantuan Sosial	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	6.62
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	33.48
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	9.49
Belanja Tidak Terduga	16,730,000.00	815,608,000.00	-	2,337.56
BELANJA LANGSUNG	708,070,558,749.58	778,741,423,431.22	750,650,510,349.20	3.19
Belanja Pegawai	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	11.24
Belanja Barang dan Jasa	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	10.08
Belanja Modal	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	(5.07)
SURPLUS / (DEFISIT)	(169,435,241,973.03)	(106,835,332,068.18)	(19,751,796,984.21)	(59.23)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	396,607,873,805.61	232,225,166,662.58	108,161,445,444.40	(47.44)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	(47.75)
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	17,729,980,680.00	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00	10.74
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	(3.00)
Pembayaran Pokok Utang	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	2,838.12
Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	39,079,920.00	
PEMBIAYAAN NETTO	384,311,148,383.61	223,996,777,512.58	95,443,817,524.40	(49.55)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	214,875,906,410.58	117,161,445,444.40	75,692,020,540.19	(40.43)

Sumber : Penjabaran – Laporan Realisasi APBD 2016, 2017 dan 2018 unaudited

BAB IV P E N U T U P

Pada tahun 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis untuk mencapai Visi “ **Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan** ”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 176,74 %. Pencapaian sasaran ini naik dibanding pencapaian Tahun 2017 sebesar 99,71 %. Dari 38 (tiga puluh delapan) sasaran strategis yang mempunyai kinerja sangat berhasil sebesar 28 sasaran, berkinerja berhasil sebanyak 7 sasaran, berkinerja cukup sejumlah 3 sasaran.

Perlu kami informasikan bahwa untuk perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara BAPPEDA, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang untuk meningkatkan kualitas SAKIP dan penyusunan LkjIP, serta mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas kinerja.
2. Merevisi RPJMD pada tahun 2019 dengan diikuti oleh dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat kabupaten maupun OPD.
3. Peningkatan efektivitas implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* pada tahun 2019.
4. Validasi Cascading dan Perjanjian Kinerja sampai pada eselon III dan eselon IV.

Rembang, Maret 2019

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ